



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**SUARA PEREMPUAN DI MEDIA CETAK  
SEBAGAI KOMUNIKASI POLITIK  
(ANALISIS FRAMING SUARA POLITISI  
PEREMPUAN DALAM KASUS HUKUM PANCUNG  
TKI RUYATI DI KOMPAS)**



**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Komunikasi**

**PUTRIA PERDANA  
NPM: 1006797944**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
KEKHUSUSAN MANAJEMEN KOMUNIKASI  
JAKARTA  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Putria Perdana**

**NPM : 1006797944**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 4 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Putria Perdana

NPM : 1006797944

Program Studi : Magister Manajemen Ilmu Komunikasi

Judul Tesis : Suara Perempuan di Media Cetak Sebagai Komunikasi Politik  
(Analisis Framing Suara Politisi Perempuan dalam Kasus Hukum  
Pancung TKI Ruyati di *Kompas*)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Magister Manajemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

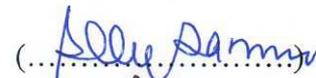
### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : DR. Pinckey Triputra, M.Sc



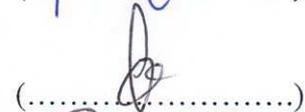
(.....)

Pembimbing : DR. Billy K. Sarwono, M.A



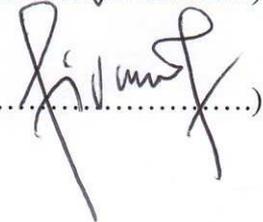
(.....)

Penguji Ahli : DR. Eriyanto, M.Si



(.....)

Sekretaris Sidang : Ir. Firman Kurniawan Sujono, M.Si



(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 4 Juli 2012

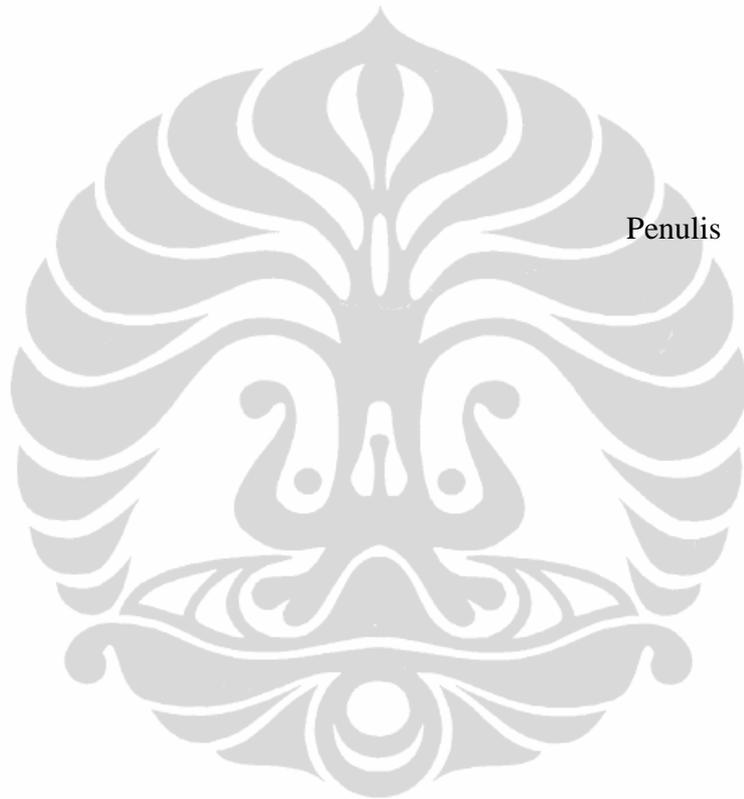
## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Jurusan Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Billy Sarwono, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Dr. Pinkey Triputra selaku ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan tesis;
3. Seluruh dosen dan staff pengajar Magister Manajemen Komunikasi UI, yang selama ini telah berbagi banyak ilmu dan bantuan serta dukungan;
4. Narasumber saya, Anggota DPR RI Ibu Rieke Diah Pitaloka dan Ibu Eva Kusuma Sundari serta Wartawan *Kompas* Bapak Windoro Adi yang menyediakan waktu dan bersedia untuk diwawancarai sebagai data sekunder dalam penelitian saya;
5. Karyawan kampus Salemba yang memberikan bantuan-bantuan kecil kepada penulis, mba Ayu dan mas Dwi yang membantu penulis mencari referensi-referensi buku di perpustakaan;
6. Teman-teman satu jurusan di Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi UI yang selama ini selalu saling memberikan semangat dan dukungan terutama dalam penyusunan tesis ini;

Akhirnya tesis ini peneliti buat agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan khususnya peneliti sendiri. Tesis ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 22 Juni 2012



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Perdana  
NPM : 1006797944  
Program Studi : Ilmu Komunikasi – Kekhususan Manajemen Komunikasi  
Departemen : Ilmu Komunikasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non – exclusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Suara Perempuan di Media Cetak Sebagai Komunikasi Politik  
Penelitian Analisis Framing Suara Politisi Perempuan dalam Kasus ‘Hukum  
Pancung TKI Ruyati di *Kompas*

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal: Juni 2012  
Yang menyatakan,

(Putria Perdana)

## ABSTRAK

Nama : Putria Perdana  
Program Studi : Manajemen Komunikasi  
Judul : Suara Perempuan di Media Cetak Sebagai Komunikasi Politik (Penelitian Analisis Framing Suara Politisi Perempuan dalam Kasus ‘Hukum Pancung TKI Ruyati di *Kompas*)

Tesis ini membahas suara politisi perempuan di *Kompas* dalam pemberitaan kasus TKI Ruyati. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis framing dan menggunakan teori *Standpoint*. Teknik pengumpulan data melalui teks berita dan wawancara. Teori *Standpoint* berpegangan pada pengalaman perempuan yang akan membawa mereka untuk memiliki beberapa pemahaman. Hasil penelitian memaparkan bahwa *frame* suara politisi perempuan sebagai kelas bawah yang tidak penting dibandingkan dengan kepentingan kaum dominan (kapitalis).

Kata kunci:  
Politisi Perempuan, TKI, *Standpoint*

## ABSTRACT

Name : Putria Perdana  
Study Program : Management Communication  
Title : Female Voice in Print Media As Political Communication (Framing Analysis Research of Voice of Women Politicians in The Case of ‘Hukum Pancung TKI Ruyati’ in *Kompas*)

This thesis discusses about the female politician voice in the case of Ruyati migrant labor news in *Kompas*. This research was a qualitative study with framing analysis and use *Standpoint* theory. Data collection technique by news text and interviews. Standpoint theory holding on the women experience which will lead them to have some comprehension. The results presented that the frame of female politicians voice as a lower class that is not important than the dominant’s interests (capitalist).

Keywords:  
Female Politicians, Migrant Labor, Standpoint

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....                                     | i         |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....                   | ii        |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                | iii       |
| KATA PENGANTAR .....                                   | iv        |
| ABSTRAK.....   | vii       |
| DAFTAR ISI .....                                       | viii      |
| DAFTAR GAMBAR .....                                    | x         |
| DAFTAR TABEL .....                                     | xi        |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                  | xii       |
| <b>1. PENDAHULUAN .....</b>                            | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                               | 1         |
| 1.2 Permasalahan Penelitian.....                       | 9         |
| 1.3 Pertanyaan Penelitian .....                        | 10        |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                            | 10        |
| 1.5 Signifikansi Penelitian .....                      | 11        |
| 1.5.1 Signifikansi Akademik .....                      | 11        |
| 1.5.2 Signifikansi Praktis.....                        | 14        |
| 1.6 Sistematika Penulisan.....                         | 15        |
| <b>2. KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>                      | <b>17</b> |
| 2.1 Pendekatan Gender .....                            | 17        |
| 2.1.1 <i>Standpoint Theory</i> .....                   | 19        |
| 2.1.2 Perempuan dalam Dunia Politik.....               | 26        |
| 2.2 Studi Framing Media.....                           | 29        |
| 2.2.1 Analisis Framing Robert N Entman .....           | 32        |
| 2.2.2 Perempuan dan Framing di Media Massa .....       | 38        |
| 2.3 Media Cetak, Berita dan Ekonomi Media.....         | 39        |
| 2.3.1 Berita .....                                     | 41        |
| 2.3.2 Produksi Berita .....                            | 45        |
| 2.3.3 Ekonomi Politik Media.....                       | 49        |
| 2.4 Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI)..... | 52        |
| 2.5 Asumsi Penelitian .....                            | 56        |
| <b>3. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>                   | <b>57</b> |
| 3.1 Paradigma Penelitian.....                          | 57        |
| 3.2 Metode Penelitian .....                            | 59        |
| 3.2.1 Penelitian Kualitatif.....                       | 59        |
| 3.2.2 Karakter Penelitian Kualitatif.....              | 62        |
| 3.3 Metode Penelitian Berperspektif Feminis.....       | 65        |
| 3.4 Sumber dan Teknik Perolehan Data .....             | 67        |
| 3.4.1 Waktu Penelitian.....                            | 68        |
| 3.4.2 Pemilihan Media.....                             | 68        |
| 3.5 Quality Criteria Penelitian .....                  | 69        |
| 3.6 Keterbatasan Penelitian.....                       | 70        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>4. Hasil Penelitian .....</b>  | <b>71</b>  |
| 4.1 Profil Kompas .....   | 71         |
| 4.1.1 Kompas sebagai Harian Umum Nasional .....   | 71         |
| 4.1.2 Kompas sebagai Sebuah Industri.....   | 73         |
| 4.2 TKI, Kekerasan dan Perekonomian Indonesia .....   | 79         |
| 4.2.1 Kasus ‘Hukum Pancung TKI Ruyati’ .....  | 80         |
| 4.2.2 Miliaran Pertahun yang Disumbangkan TKI.....  | 83         |
| 4.3 Berita Kasus ‘Hukum Pancung TKI Ruyati’ .....   | 84         |
| 4.4 Analisis Framing Robert N Entman Berita Kasus TKI Ruyati .....  | 86         |
| 4.4.1 Teks Berita 1: ‘Pemerintah Tak Dapat Hindari Hukuman’ .....   | 87         |
| 4.4.2 Teks Berita 2: ‘23 TKI Terancam Mati’ .....   | 91         |
| 4.4.3 Teks Berita 3: ‘Perlu Jeda Penempatan TKI’ .....  | 94         |
| 4.5 Temuan Lain.....  | 98         |
| 4.6 Latar Belakang Feminisme Narasumber.....  | 100        |
| <br>  |            |
| <b>5. Analisis Penelitian .....</b>   | <b>107</b> |
| 5.1 Bingkai Politisi Perempuan dalam Kasus ‘Hukum Pancung TKI Ruyati’<br>di <i>Kompas</i> .....                 | 107        |
| 5.2 Pertimbangan Pembingkai Politisi Perempuan dalam Kasus ‘Hukum<br>Pancung TKI Ruyati’ di <i>Kompas</i> ..... | 133        |
| <br>  |            |
| <b>6. Kesimpulan dan Rekomendasi .....</b>  | <b>138</b> |
| 6.1 Kesimpulan Penelitian.....  | 138        |
| 6.2 Rekomendasi atas Penelitian.....  | 139        |
| <br>  |            |
| <b>DAFTAR REFERENSI.....</b>  | <b>141</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 2.1.1 Cakupan Kelompok <i>Standpoint Theory</i> .....          | 20 |
| Gambar 2.4 Diagram Kekerasan Buruh Migrant Indonesia Tahun 2007 ..... | 54 |



## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.2.1 Pertanyaan Framing Robert N. Entman.....                         | 37 |
| Tabel 4.3 Tabel Judul Teks Berita yang Memuat Suara Politisi Perempuan ..... | 85 |
| Tabel 4.4.1 Framing Teks Berita 1: 'Pemerintah Tak Dapat Hindari Hukuman'    | 91 |
| Tabel 4.4.2 Framing Teks Berita 2: '23 TKI Terancam Mati' .....              | 94 |
| Tabel 4.4.3 Framing Teks Berita 3: 'Perlu Jeda Penempatan TKI' .....         | 98 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|  |     |
|--|-----|
| 1. Kliping Berita Kasus ‘Hukum Pancung TKI Ruyati’ ..... | 147 |
| 2. Transkrip Hasil Wawancara .....                       | 150 |
| 3. Data diri Narasumber .....                            | 153 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keterlibatan para perempuan dalam dunia politik bukan merupakan jalan yang mudah karena kemapanan kultur patriarki yang ada telah menjadi ideologi dalam kehidupan politik yang sukar untuk dilebur. Ideologi kultur patriarki yang mengkotak-kotakkan peran dan arena perempuan dan laki-laki memunculkan unsur ketidakadilan.

Secara umum masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia adalah ketidakadilan yang bersumber pada dominasi kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Ketidakadilan ini lalu memunculkan kekerasan, diskriminasi, stereotip, dan beban ganda. (Kusumaatmadja, 2007: 87)

Menurut Febiana Rima dalam tulisannya “Politik Sebagai Tindakan Komunikasi dan Peran Perempuan”, Kultur patriarki telah mengakibatkan terjadinya ketidakadilan bukan hanya pada perempuan namun juga pada kemanusiaan. (Nugroho, 2011: 218)

Kehidupan publik adalah dunia bagi semua manusia, termasuk perempuan, karena dalam dunia itulah manusia membangun dan mengembangkan dirinya sambil merawat kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Itu berarti keterlibatan perempuan dalam dunia publik wajib dilakukan karena dunia bersama juga membutuhkan perspektif perempuan demi kebaikan kehidupan bersama dan perkembangan peradaban manusia yang lebih baik.

Ketidakadilan menjadi kendala besar dalam mencapai kesejahteraan bersama, karena diakui ataupun tidak, standar kesejahteraan akan tergoncang dengan adanya ketidakadilan yang terjadi. Begitupun dengan ketidakadilan yang dirasakan perempuan dalam ruang politik.

Banyak studi yang telah menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik akan mempunyai banyak keuntungan bagi masyarakat. Jumlah perempuan yang cukup dalam institusi pengambilan keputusan, akan membuat pergeseran pada cara pandang dalam menyelesaikan masalah-masalah politik dengan mengutamakan perdamaian dan cara-cara anti kekerasan.

Selain itu, akan dihasilkan pula perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dapat memasukkan kebutuhan khusus perempuan misalnya kesehatan reproduksi, isu kesejahteraan keluarga, isu kepedulian terhadap anak, kelompok lanjut usia dan tuna daksa, dan isu-isu kekerasan seksual. Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik juga dapat mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat seperti diskriminasi di tempat kerja dan di hadapan hukum (Soetjipto, 2005: 98).

Diskriminasi terhadap perempuan tersebut melahirkan *standpoint* perempuan. *Standpoint* dimana perempuan berkedudukan lebih rendah dan terpinggirkan dari kelompok dominan yaitu kaum patriarki yang berorientasi pada kepentingan elit dan kapitalis. Perbedaan kelas secara sosial antara perempuan dan laki-laki inilah yang kemudian memberikan dampak terhadap segala kecenderungan diskriminasi yang terjadi.

Padahal, kesempatan perempuan Indonesia untuk mendapatkan keadilan berpartisipasi dalam politik mulai terbuka lebih luas sejak diberikannya kuota 30 persen di parlemen bagi perempuan Indonesia melalui UU Pemilu No. 12 tahun 2003 pasal 65 sehingga mampu terselenggaranya kesetaraan gender dan keadilan gender. UU No. 12 tahun 2003 pasal 65 (1) tersebut menyatakan:

“Setiap Partai Politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%,”  
<http://www.tempo.co.id/hg/peraturan/2004/03/16/prn.20040316-04.id.html>

Melalui UU Pemilu No. 12 tahun 2003 Pasal 65, setiap partai politik diharuskan menampung 30% keterwakilan perempuan, dimana artinya pintu bagi perempuan untuk berpolitik dan membawa permasalahannya ke wadah yang lebih tinggi semakin terbuka.

Dengan hadirnya wakil-wakil perempuan dalam jumlah yang pantas (proporsional) dalam kepengurusan partai politik maupun di lembaga legislatif akan memberi peluang kepada perempuan untuk ikut membuat kebijakan-kebijakan yang adil. Atas dasar itu, maka hanya dengan jumlah kursi mereka yang signifikan dalam lembaga politik formal, kaum perempuan dapat menciptakan perubahan yang berarti. (Kusumaatmadja, 2007: 67)

Tentu saja keberhasilan politisi-politisi perempuan tersebut mendapatkan kursi di parlemen maupun kursi pemerintahan daerah patut diapresiasi sebagai usaha keras dalam mensejajarkan posisinya dengan laki-laki meskipun dalam keadaan yang lebih berat karena peran ganda perempuan yang tidak dapat dilepaskan, yaitu sebagai wanita karir dan juga ibu rumah tangga yang harus berkonsentrasi mengurus segala keperluan rumah tangga dan bertanggung jawab atas anak-anaknya.

Kedudukan perempuan secara politik mampu dipertimbangkan dengan rasional melalui kinerja dan program-program kerjanya yang nyata dan adanya kepercayaan dari konstituen yang memilih. Politik tidak lagi menjadi permainan dan kepunyaan kaum laki-laki semata. Setelah masa jaminan kuota 30% bagi perempuan, politik tidak lagi menjadi barang yang hanya dapat dilihat dan didengar oleh perempuan seperti masa sebelumnya.

Kesempatan untuk mendapatkan keadilan dalam ranah politik tersebut ternyata tidak memberikan peningkatan *standpoint* pada perempuan. Suara-suara politisi perempuan tetap tidak terdengar keras gaungnya di antara suara vokal politisi laki-laki yang mendominasi. Loina Lalolo K. Perangin-Angin melakukan penelitian analisis isi pemberitaan perempuan pada masa kampanye 2009 di tiga media cetak yaitu Suara Pembaruan, Republika dan Kompas. Menurut Loina, perempuan kurang mendapat akses ke dunia publik.

Representasi perempuan di media lebih kecil, hampir setengahnya, daripada representasi laki-laki yang dijadikan sebagai narasumber oleh media cetak nasional. (UI, 2004)

Padahal, suara politisi perempuan akan mewakili perjuangan mereka terhadap pencapaian solusi bagi permasalahan perempuan secara umum. Masalah perkawinan, buruh perempuan, pemerkosaan, penyiksaan tenaga kerja, perdagangan perempuan, narkoba yang melibatkan perempuan, prostitusi, HIV/Aids, kekerasan rumah tangga dan masalah lainnya yang berputar di sekitar perempuan tanpa mendapat porsi perhatian yang lebih mendapat kesempatan untuk dibawa ke muka pemangku keputusan untuk segera dicari solusinya dan dibuat Undang-undang serta aturan yang tegas yang melindungi perempuan secara kuat.

Keberadaan perempuan di parlemen tidak boleh hanya menjadi hiasan, sebagai pemanis parlemen yang didominasi oleh para laki-laki. Tidak juga hanya untuk memenuhi syarat kuota 30% semata. Jumlah politisi perempuan ternyata tidak menjadi masalah utama, melainkan juga dipengaruhi kualitas dari politisi perempuan itu sendiri. Bustanul Arif menyoroti kualitas politik perempuan, dalam bukunya 'Partisipasi Politik Perempuan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Di Daerah Jawa Timur', ia menyatakan:

Kuota 30% yg telah dicapai tidak akan bermakna sama sekali manakala perempuan tidak membekali diri dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Jika target hanya untuk memenuhi kuota, atau sekedar ada perempuan yang duduk di kursi DPR atau BPD, tanpa bekal kualitas yang memadai, maka hal itu sama dengan merendahkan martabat perempuan, karena orang-orang yang masuk untuk memenuhi kuota tersebut hanya akan menjadi pajangan politik. (Arif, 30)

Perempuan memiliki banyak permasalahan yang membutuhkan perwakilan di parlemen untuk diperjuangkan secara konstitusi sebagai tindakan perlindungan atas diri perempuan Indonesia. Masalah-masalah tersebut menjadi masalah yang tidak dapat dimengerti dengan mudah oleh laki-laki dengan ideologi patriarki yang telah melekat.

Salah satu masalah perempuan Indonesia yang krusial adalah masalah ketenagakerjaan yang masih jauh dari perlindungan negara. Perempuan-perempuan Indonesia turut serta berjibaku mencari nafkah untuk keluar dari himpitan ekonomi dan memenuhi mimpi anak-anak serta keluarga mereka. Mereka rela menjadi pekerja rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokok yang sulit didapat karena kesejahteraan yang masih jauh panggang dari api. Perempuan-perempuan ini pun rela jauh dari rumah dan berada di negara antah berantah untuk mengumpulkan pundi-pundi yang dalam benak mereka akan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi keluarganya. Mereka pun menjadi Tenaga Kerja Indonesia informal atau dikenal dengan sebutan PRT.

Perjuangan TKI ternyata harus dibayar mahal. Tindak kekerasan yang kerap terjadi dan terus berulang membuat luka besar untuk wajah perempuan Indonesia yang tidak mendapat perlindungan yang cukup dari negara. Tindakan kekerasan terhadap TKI merupakan kejahatan yang seharusnya mendapat tindakan hukum yang tegas dan keras dari negara sebagai pelindung warga negaranya. Kekerasan terhadap TKI di luar negeri tidak hanya merugikan individu manusia Indonesia namun juga mencoreng citra bangsa Indonesia dengan tindakan semena-mena yang dilakukan terhadap anak bangsa. Hal ini melukai harga diri bangsa.

Padahal, keberadaan perempuan-perempuan sebagai TKI di luar negeri tidak melulu merugikan nama baik Indonesia dengan cap negara pengimpor pembantu namun juga telah memberikan pemasukan yang besar kepada kas negara. Laporan Bank Indonesia mengenai pemasukan devisa yang dihasilkan dari uang TKI yang dikirimkan hingga 2008 sebesar US\$6,617 miliar atau sekitar Rp60 triliun. (<http://bisnis.vivanews.com/news/read/227831-berapa-besar-sumbangan-devisa-tki>).

Ketua Pergantian Antar Waktu (PAW) Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Adi Putra Tahir mengungkapkan, TKI sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas sebesar US\$ 6,617 miliar pada tahun 2009 melalui pengiriman remitansi ke Indonesia. (<http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/berita/845-tki-sumbang-devisa-negara-terbesar-kedua-setelah-migas-.html>)

Sumbangan para TKI atas peningkatan perekonomian Indonesia ternyata tidak cukup menjadi alasan keselamatan kerja mereka di perantauan. Tentu kita masih ingat kasus TKI Ruyati yang mendapat hukuman pancung. Ruyati yang berasal dari Kampung Ceger RT 03/01 Kecamatan Sukatani, Bekasi, Jawa Barat, mendapat hukuman pancung di Mekah, Arab Saudi pada tanggal 18 Juni 2011.

Ruyati yang berusia 54 tahun dihukum mati karena membunuh istri majikannya, Khoiriyah Omar Moh Omar Hilwani, di Mekkah pada 12 Januari 2010 setelah bertengkar karena keinginannya untuk pulang tidak dikabulkan. Ruyati memang bukan TKI pertama yang mendapat hukuman mati. Namun mengingatkan kita, bahwa usaha menjaga dan melindungi warga negaranya, khususnya perempuan ternyata belum berhasil dilaksanakan oleh negara secara maksimal. Baik oleh pemerintah melalui diplomasi maupun parlemen melalui Undang-undang.

Kasus Ruyati dan kelemahan perlindungan atas perempuan Indonesia memberikan cubitan besar betapa lemahnya kebijakan dan hukum untuk mendukung keselamatan dan perlindungan bagi Ruyati dan perempuan TKI lainnya dalam hal keselamatan kerja dan hidup. Ruyati memperlihatkan bagaimana permasalahan perempuan belum juga direspon secara cepat dan maksimal oleh pemangku kebijakan dan masih dianggap sebagai masalah yang tidak mengancam.

Padahal, keberadaan politisi perempuan di parlemen diharapkan mampu memberikan pengaruh dan dominasi atas permasalahan yang terkait dengan perempuan. Mereka diinginkan oleh konstituen dan masyarakat perempuan secara umum untuk dapat memegang kendali dan membuat gebrakan untuk menghasilkan produk Undang-undang yang kuat dan memiliki lingkup luas yang mampu melindungi TKI, dan tentu terutama benar-benar fokus untuk memerhatikan suara-suara aspirasi dari perempuan yang mereka wakili.

Salah satu cara politisi perempuan untuk memperlihatkan keberadaannya di parlemen secara nyata dan memiliki kontribusi adalah dengan menyuarakan perjuangannya di media massa. Penggunaan media massa sebagai wahana untuk

memberikan wadah pengusungan gagasan, ide, menampung aspirasi serta membentuk pencitraan yang positif. Menurut Hikmah Anas dalam Bustanul Arif(Arif, 30) (Arif, 30), strategi yang dapat dilakukan oleh perempuan dalam berpolitik (pada semua tingkatan mulai DPR-BPD) disamping memberi kuota 30% dan peningkatan kualitas sebagaimana disebutkan di atas, antara lain:

- 1) Membangun akses ke media. Media apa pun seperti: radio, TV, Koran, internet, mampu memberikan opini bagi pemakainya. Dan setiap media, langsung ataupun tidak langsung, akan mampu memberikan pengaruh pada para konsumennya.
- 2) Perlunya Ornop yang prihatin dan peduli terhadap kondisi eksisting representasi politik perempuan yang ada untuk melakukan upaya memperkuat para kandidat perempuan. Upaya tersebut meliputi penyelenggaraan diskusi publik tentang pentingnya peningkatan representasi perempuan di lembaga perwakilan, penyelenggaraan diskusi terbatas, dan sarasehan-sarasehan untuk media.
- 3) Meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik. mengupayakan untuk menduduki posisi strategis dalam partai, seperti posisi ketua, sekretaris, karena posisi tersebut yang akan berperan dalam memutuskan banyak hal tentang kebijakan partai.
- 4) Membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan lintas partai, agama, dan profesi.

Dua strategi yang ditawarkan Hikmah Anas merujuk pada media massa. Media cetak sebagai salah satu media massa, menjadi pilihan yang dapat dimanfaatkan untuk memperdayakan kehadiran politisi perempuan di parlemen melalui *statement-statement* mereka yang vokal dan menggugat ketidakadilan atas kasus-kasus permasalahan perempuan yang terjadi (Arif, 30).

Namun, ternyata gaung suara para politisi perempuan di parlemen tidak kuat terdengar. Jumlah keterwakilan perempuan di parlemen yang saat ini sebesar 18, 04% menjadi tersamar diantara kabut politisi laki-laki yang vokal. Pemberitaan di media cetak yang menjadi salah satu alat komunikasi politik untuk

menyuarakan aspirasi dan perjuangan, terasa bias tanpa keberimbangan suara-suara politisi perempuan.

Bias yang terjadi dalam pemberitaan mengenai politisi perempuan tidak hadir begitu saja tanpa sebab. Ideologi patriarki yang masih kuat mengakar di Indonesia, memberi perempuan tempat yang sedikit dalam bidang produksi dan lebih dalam bidang domestik. Perempuan menjadi kaum marjinal di bidang produksi dan tergeser perannya menjadi obyek tontonan. Perempuan sebagai obyek tontonan tidak dapat dilepaskan dari pembingkai media yang dilakukan serta kekuatan kapitalisme ekonomi di balik media.

Yasraf Amir Piliang dalam tulisannya “Masih Adakah ‘Aura’ Wanita di Balik ‘Euphoria’ Media (Ibrahim, 1998) menyatakan tubuh wanita sendiri sebagai tontonan mengalami proses pemijaraan sebagai ‘tanda’ dalam ekonomi politik kapitalisme. Fungsi tubuh telah bergeser dari fungsi organis/ biologis/ reproduktif ke arah fungsi ekonomi politik, khususnya fungsi ‘tanda’. Media menjadikan tubuh sebagai ‘penanda’ yang dikaitkan dengan makna tertentu, sesuai dengan tujuan ekonomi politik.

Kekuatan ekonomi dibalik media sebagai penggerak telah melahirkan informasi sebagai barang dagangan yang bertujuan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Hal inilah yang kemudian dapat memberikan bias pada pemberitaan politisi perempuan, karena daya tarik yang dianggap kecil untuk disertakan dalam pemberitaan politik dan hukum dan lebih menarik jika dibungkus dalam berita-berita ringan yang sensasional.

## **1.2 Permasalahan Penelitian**

Pada penelitian terdahulu yang menjadi literatur penulis, tema penelitian berfokus pada pemberitaan mengenai politisi perempuan atau perspektif mengenai politisi perempuan sebelum menjadi anggota parlemen, sehingga belum ada penelitian yang meneliti bagaimana keterwakilan suara politisi perempuan dalam pemberitaan media massa setelah duduk di kursi parlemen. Hal inilah yang

mendorong penulis untuk melakukan penelitian pemberitaan politisi perempuan setelah mereka menjadi anggota dewan.

Pemberitaan yang mengangkat politisi perempuan akan memperlihatkan dominasi suara politisi perempuan di ruang publik ketika memperjuangkan kepentingan perempuan-perempuan Indonesia yang mereka wakili, seperti dalam kasus TKI Ruyati. Sebagai perwakilan perempuan di parlemen, semestinya suara politisi perempuan yang memperjuangkan keadilan bagi Ruyati terdengar vokal. Tidak hanya sebagai bagian dari simpati dan empatinya sebagai sesama perempuan, tetapi sebagai tanggung jawab keberadaannya sebagai perempuan di dewan.

Salah satu pemberitaan mengenai suara politisi perempuan yang dapat diteliti adalah pemberitaan di media cetak. Media cetak sebagai sarana pemberi informasi dan edukasi memegang fungsi sebagai kontrol sosial, di mana tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyajikan fakta tetapi juga memiliki kewajiban untuk tidak menyeleksi isi pemberitaannya sehingga tidak menimbulkan bias di dalam berita yang dihasilkan.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa media cetak memiliki kepentingan ekonomi dibelakangnya sebagai sebuah perusahaan komersil yang melakukan proses pembingkaiian terhadap berita yang disampaikannya sebagai modal utama untuk menarik perhatian dan mendapatkan keuntungan. Media cenderung dengan cara-cara tertentu dan ideologinya menyeleksi berita dan membingkai baik tokoh maupun konsep pemberitaan agar sesuai dengan karakternya dan memenuhi keinginan pasar yang mereka ciptakan sendiri sehingga menimbulkan bias.

Pada kasus 'Hukum Pancung TKI Ruyati', suara politisi perempuan dalam pemberitaan Harian Umum *Kompas* dapat dihitung. Teks berita didominasi oleh suara laki-laki. Padahal, Ruyati merupakan representasi persoalan perempuan Indonesia yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga namun mengalami tindakan kekerasan dan ketidakadilan. Isi berita di dalam *Kompas* yang cenderung didominasi suara laki-laki tersebutlah yang membawa saya pada

keingintahuan, bagaimana keterwakilan suara politisi perempuan dan benarkah ada bias dalam pemberitaan politisi perempuan di media cetak?

Oleh sebab itu, maka saya tertarik mengangkat judul “*Suara Perempuan di Media Cetak Sebagai Komunikasi Politik.*” dengan melakukan analisis framing suara politisi perempuan dalam kasus TKI Ruyati.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pembingkaiian suara politisi perempuan dalam berita ‘*Hukum Pancung TKI Ruyati*’ di *Harian Umum Kompas*?
2. Apa pertimbangan pembingkaiian suara politisi perempuan dalam berita ‘*Hukum Pancung TKI Ruyati*’ di *Harian Umum Kompas*?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pembingkaiian suara politisi perempuan dalam berita ‘*Hukum Pancung TKI Ruyati*’ di *Harian Umum Kompas*
2. Untuk menganalisis pertimbangan pembingkaiian suara politisi perempuan dalam berita ‘*Hukum Pancung TKI Ruyati*’ di *Harian Umum Kompas*

### **1.5 Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademis dan signifikansi praktis.

#### **1.5.1 Signifikansi Akademik**

Berbagai penelitian tentang peran politik perempuan telah banyak dilakukan sebelumnya. Jumlah kajian pustaka penelitian sebelumnya dalam penelitian ini yaitu 10 buah. Tesis mahasiswa UI mengenai politisi perempuan

lebih fokus pada pemberitaan politisi perempuan pada masa kampanye Pemilu (sebelum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat). Ada pula tesis-tesis lain yang terkait dengan penelitian mengenai politisi perempuan ataupun mengenai teori standpoint dan mengenai buruh perempuan. Selain tesis, juga terdapat disertasi dan jurnal.

Penelitian mengenai pemberitaan politisi perempuan pada masa kampanye Pemilu ditulis oleh Loina Lalolo K. Perangin-Angin (UI, 2004) yang meneliti isi pemberitaan tentang perempuan, dan representasi perempuan dalam berita Kampanye Pemilu 2004 di tiga media yaitu Suara Pembaruan, Republika dan *Kompas*. Teknik analisis dilakukan dengan analisis isi secara multilevel dan multistage dalam tiga tataran atau aras, yaitu tekstual, wacana dan sosiokultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan kurang mendapat akses ke dunia publik, karena representasi perempuan di media lebih kecil, hampir setengahnya, daripada representasi laki-laki yang dijadikan sebagai narasumber oleh media cetak nasional.

Tesis kedua ditulis oleh Irene Erlyska (UI, 2004) yang menggunakan model wacana *critical discourse analysis (CDA)* dari Norman Fairclough dan analisis teks berdasar teori Pan dan Konsicki. Hasil penelitian menunjukkan frame yang ditemukan bahwa Metro TV, stasiun televisi yang mengukuhkan diri sebagai Election Channel menonjolkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik perlu mendapatkan perhatian lebih. Banyak caleg perempuan yang berkualitas dengan visi dan misi yang jelas harus terhadang dengan kendala-kendala yang disebabkan oleh budaya patriarki.

Penelitian politisi perempuan lainnya oleh Nucha Ayuningrum (UI, 2009) yang meneliti analisis isi berita tokoh perempuan, di harian nasional *Kompas* pada kampanye Pemilu 2009 (12 Juli 2008-5 April 2009). Unit analisis yang digunakan adalah unit sintaksis dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam media massa, khususnya *Kompas*, masih cenderung sedikit jumlahnya. Ditinjau dari sebaran topik, mayoritas pemberitaan adalah pemilu legislatif, terutama mengenai keterwakilan perempuan dalam politik.

Penelitian keempat oleh Hj. Samrotunnajah Ismail (UI 2008) yang berfokus pada kajian mengenai gambaran pencerminan integritas elite politik perempuan yang terlihat dari implementasi atas komitmen yang disampaikan pada saat kampanye. Dari hasil kajian diperoleh gambaran bahwa komitmen yang disampaikan pada saat kampanye 2004, cenderung dalam garis besar mengisyaratkan solusi masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum dan keadilan serta kepentingan kesetaraan kaum perempuan.

Penelitian berikutnya mengenai standpoint jurnalis perempuan oleh Diah Amalia (UI 2010) yang membahas *Standpoint* jurnalis perempuan di majalah bisnis dan ekonomi terhadap profesinya dan juga apakah mereka memiliki pemahaman tentang jurnalisme berperspektif gender. Hasil penelitian memaparkan bahwa jurnalis perempuan memiliki *standpoint* yang menganggap penting adanya kesadaran dan sensitifitas gender dalam dirinya untuk bisa memproduksi berita yang membela kepentingan perempuan dalam majalah bisnis dan ekonomi. Namun budaya patriarki dan kapitalis yang terdapat dalam area pribadi dan publik masih menahan upaya mereka.

Penelitian Reinanda Sarah Manalu (UI, 2011) mengenai buruh migrant. Penelitian bertujuan mengetahui cara pembingkaihan surat kabar Kompas atas berita tentang Ceriyati, pekerja migran perempuan, sebagai korban tindakan kekerasan. Penelitian menggunakan metode analisis framing model Gamson dan Modigliani. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan membentuk Ceriyati sebagai kaum marjinal dan kecenderungan Pemerintah Indonesia yang lemah terhadap Pemerintah Malaysia dalam menanggulangi masalah korban tindakan kekerasan yang dialami pekerja migran perempuan.

Disertasi Billy K. Sarwono (UI, 2004) yang bertujuan memahami bagaimana ibu rumah tangga kelas menengah di Jabotek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi) memberikan pemaknaan terhadap karir politik Megawati Soekarnoputri sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Penelitian kritis dan perspektif feminis dan kerangka kajian budaya pemikiran Stuart Hall mengenai encoding dan decoding. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan ibu rumah tangga. Hasil

penelitian menunjukkan adanya resistensi pemaknaan perempuan terhadap hal-hal yang terkait dengan kondisi eksternal Megawati dalam posisinya sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Terhadap berbagai informasi di media massa yang terkait dengan posisi Megawati sebagai presiden, pandangan informan tidak harus setuju sebagaimana ditunjukkan oleh media massa.

Disertasi selanjutnya oleh Umaimah Wahid (UI, 2006) yang meneliti media massa dan hegemoni negara terhadap realitas politik perempuan. Media Industri sebagai elemen penting untuk menaikkan posisi tawar kaum perempuan terhadap negara, justru berperan sebagai pendukung budaya patriarki yang berlaku ditengah masyarakat. Metode analisis isi kualitatif untuk menemukan tema-tema utama dalam teks Kompas dan Media Indonesia yang berhubungan dengan proses perjuangan kaum perempuan meraih kuota 30 pesen di Parlemen. Teori yang digunakan Marxist Humanist Antonio Gramsci dengan konsep hegemoni-counter. Kesimpulan penelitian yaitu sistem budaya patriarki masih berlangsung di masyarakat dan didukung oleh negara bahkan oleh sebagian perempuan itu sendiri sehingga menciptakan realitas yang merugikan kaum perempuan.

Sementara jurnal-jurnal yang menjadi referensi yaitu jurnal Media dan Pendidikan Politik Perempuan oleh Ida Wiendijarti dan Susilastuti Dwi N yang membahas mengenai pengaruh pendidikan politik terhadap perempuan Indonesia untuk memasuki politik. Insitusi media massa berperan sebagai pengkritisi dalam perubahan budaya dan nilai-nilai sosial di mana bukanlah sensitifitas gender. Artikel-artikel tersebut menganalisis aturan media massa untuk memberikan dukungan atas kekuatan perempuan di dalam sistem politik. Jurnal kedua adalah jurnal Perempuan, Politik dan Media oleh Abdul Rozak mengenai representasi dan citra yang diberikan media massa atas partisipasi perempuan di dalam politik dan pemberitaannya. Media massa sebagai bagian dari sosialisasi atas ide kesetaraan gender, termasuk dalam area politik, di dalam realitasnya tetap memiliki masalah sensitif.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya mengenai suara politisi perempuan, fokusnya pada pemberitaan masa kampanye (ketika mereka belum menjadi

anggota DPR RI). Sementara, penelitian tesis ini berfokus pada suara politisi perempuan setelah mereka berada di DPR RI. Penelitian ini ingin melihat keterwakilan dan usaha-usaha politisi perempuan memperjuangkan keadilan dan solusi bagi permasalahan perempuan melalui suara-suara mereka di dalam pemberitaan.

Penelitian tesis ini juga melakukan wawancara dengan narasumber anggota DPR RI dan salah satu wartawan *Kompas*. Relasi antara politisi perempuan dan wartawan juga akan memengaruhi pola hubungan dan berimplikasi pada kesempatan dimuatnya suara politisi perempuan di dalam pemberitaan.

### **1.5.2 Signifikansi Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada politisi perempuan di DPR RI agar menggunakan kesempatan melalui media cetak untuk menyuarakan aspirasi perempuan dengan menjalin hubungan yang baik dengan media sehingga keterwakilan suara politisi perempuan di media cetak menjadi berimbang dengan suara laki-laki.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini merupakan penjelasan mengenai latar belakang keterwakilan suara politisi perempuan di media massa yang masih rendah. Sementara suara politisi perempuan di DPR RI mewakili perjuangan perempuan mendapatkan keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan di bidang ekonomi dan hukum, terutama dalam penelitian ini perjuangan atas keadilan bagi TKI Ruyati yang dihukum pancung.

## **Bab II Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab permasalahan penelitian, maka pada bab ini digunakan teori *Feminist Standpoint* oleh Nancy Harstock untuk mengetahui bagaimana posisi suara politisi perempuan di Harian Umum *Kompas* dalam pemberitaan kasus 'Hukum Pancung TKI Ruyati'. Ruyati menjadi korban eksekusi mati tanpa upaya diplomasi dari pemerintah Indonesia, padahal TKI menjadi penyumbang devisa negara. Perspektif ekonomi media juga digunakan untuk memaparkan basis kapitalisme *Kompas* sebagai sebuah industri.

## **Bab III Metodologi Penelitian**

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian teks ini menggunakan analisis framing Robert N. Entman. Selain sumber utama teks berita, penelitian ini juga menggunakan sumber kedua yaitu wawancara narasumber.

## **Bab IV Hasil Penelitian**

Bab ini memaparkan temuan-temuan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai suara politisi perempuan di *Kompas* pada kasus 'Hukum Pancung TKI Ruyati'. Penelitian menunjukkan dari 22 berita yang muncul di *Kompas*, hanya terdapat 2 suara politisi perempuan di dalam 3 berita. Temuan lainnya yaitu bahwa dalam berita Ruyati, *Kompas* belum menjadikan politisi perempuan sebagai narasumber utama. Selain itu, hubungan keeratan antara politisi perempuan dan wartawan berpengaruh terhadap pemilihan politisi perempuan tersebut sebagai narasumber penulisan berita.

## **Bab V Analisis Penelitian**

Bab ini menganalisis temuan-temuan penelitian dengan teori *Standpoint*. Melihat hubungan antara rendahnya keterwakilan suara politisi perempuan di *Kompas* dalam kasus 'Hukum Pancung TKI Ruyati'. Analisis menunjukkan bahwa politisi perempuan dianggap sebagai kaum rendah yang masih berada di

bawah kaum elit (kapitalis) dalam hal ini *Kompas* sebagai sebuah perusahaan besar.

## **Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi**

Bab ini berisi kesimpulan penelitian mengenai suara politisi perempuan di *Kompas* dalam berita 'Hukum Pancung TKI Ruyati'. Rekomendasi yang diberikan diantaranya agar ada peneliti yang melakukan penelitian mengenai hubungan politisi perempuan dan media massa.



## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### 2.1 Pendekatan Gender

Kata Gender berasal dari bahasa Inggris, yaitu *gender* yang berarti jenis kelamin. Dalam *Webster's News Dictionary* (Echols dan Shadily, 1983: 265), gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. (Darma, 2009: 167). Gender pada dasarnya membedakan sifat laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Perbedaan inilah yang kemudian memengaruhi cara pandang dan tindakan serta keputusan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal.

Fakih dalam Darma mengungkapkan (Darma, 2009: 167) bahwa perempuan di masyarakat dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dikenal kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat dan karakter-karakter yang dikonstruksi oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan tersebut yang memberikan peran terhadap lahirnya budaya maskulin untuk laki-laki dan feminin untuk perempuan.

Permasalahan pada gender bukan terletak pada kodratnya melainkan pada ketidakadilan dalam pembagian kerja yang dirasakan oleh perempuan. Dalam pembagian ini, umumnya perempuan dikategorikan ke dalam sektor domestik (rumah tangga) sementara laki-laki di sektor publik (masyarakat). Sektor domestik merupakan sektor yang statis dan konsumtif sementara sektor publik dinamis dan memiliki sumber kekuasaan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan yang pada akhirnya dapat menghasilkan serta mengendalikan perubahan sosial.

Stereotip gender lambat laun menimbulkan ketimpangan gender di masyarakat, terutama terhadap perempuan. Hal ini kemudian menimbulkan ketidakadilan gender, di mana dominasi laki-laki atas perempuan terjadi. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk (Fakih dalam

Darma, 2009: 177) seperti: (1) marginalisasi (pemiskinan ekonomi), (2) subordinasi (anggapan tidak penting/ peminggiran bagi perempuan dalam rumah tangga atau politik), (3) pembentukan stereotip atau pelabelan negatif terhadap perempuan, (4) kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga, (5) beban kerja yang lebih banyak dan lebih panjang, (6) diskriminasi (perbedaan peran dan kedudukan dan represi (pengucilan).

Ketidakadilan yang dirasakan perempuan pada akhirnya melahirkan gerakan perempuan atau dikenal dengan feminisme. Gerakan ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, hukum, dan pertahanan. Gerakan feminisme melahirkan kajian perempuan yang mencoba mengangkat perempuan ke permukaan sehingga keadilan dan kesetaraan gender secara struktural dan kultural dapat diwujudkan. Menurut Saptari dan Holzner (Darma, 2009: 194) ada dua tujuan kajian perempuan yaitu:

1. Memperoleh pemahaman tentang perkembangan mekanisme hubungan asimetris atas dasar jenis kelamin, ras, dan kelas dalam suatu masyarakat serta pelestariannya.
2. Mencari strategi yang dapat mengubah situasi tersebut ke situasi yang mewujudkan hubungan yang lebih simetris.

Pusat kajian gender (teori feminis) pada perempuan (Ritzer dan Goodman, 2008: 403-404) terpusat pada tiga hal. Pertama, sasaran utama studinya, titik tolak seluruh penelitiannya, adalah situasi dan pengalaman wanita dalam masyarakat. Kedua, dalam proses penelitiannya, perempuan dijadikan “sasaran” sentral; artinya, mencoba melihat dunia khusus dari sudut pandang wanita terhadap dunia sosial. Ketiga, teori feminis dikembangkan oleh pemikir kritis dan aktivis atau pejuang demi kepentingan perempuan, yang mencoba menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk perempuan—dan dengan demikian, menurut mereka, untuk kemanusiaan.

### 2.1.1 *Standpoint Theory*

Teori *Feminist Standpoint* diperkenalkan oleh Nancy Hartsock pada tahun 1983. Teori ini mengklaim bahwa pengalaman, pengetahuan dan perilaku komunikasi terbentuk dalam bagian besar grup sosial di tempat mereka berasal. Standpoint berargumen bahwa tidak terdapat standar objektivitas untuk mengukur sudut pandang seseorang. Teori Standpoint melakukan advokasi kritis mengenai *status quo* dikarenakan struktur kekuasaan yang mendominasi.

*Standpoints come from resisting those in power and refusing to accept the way society defines their group* (Wood dalam West dan Turner, 2010: 502)

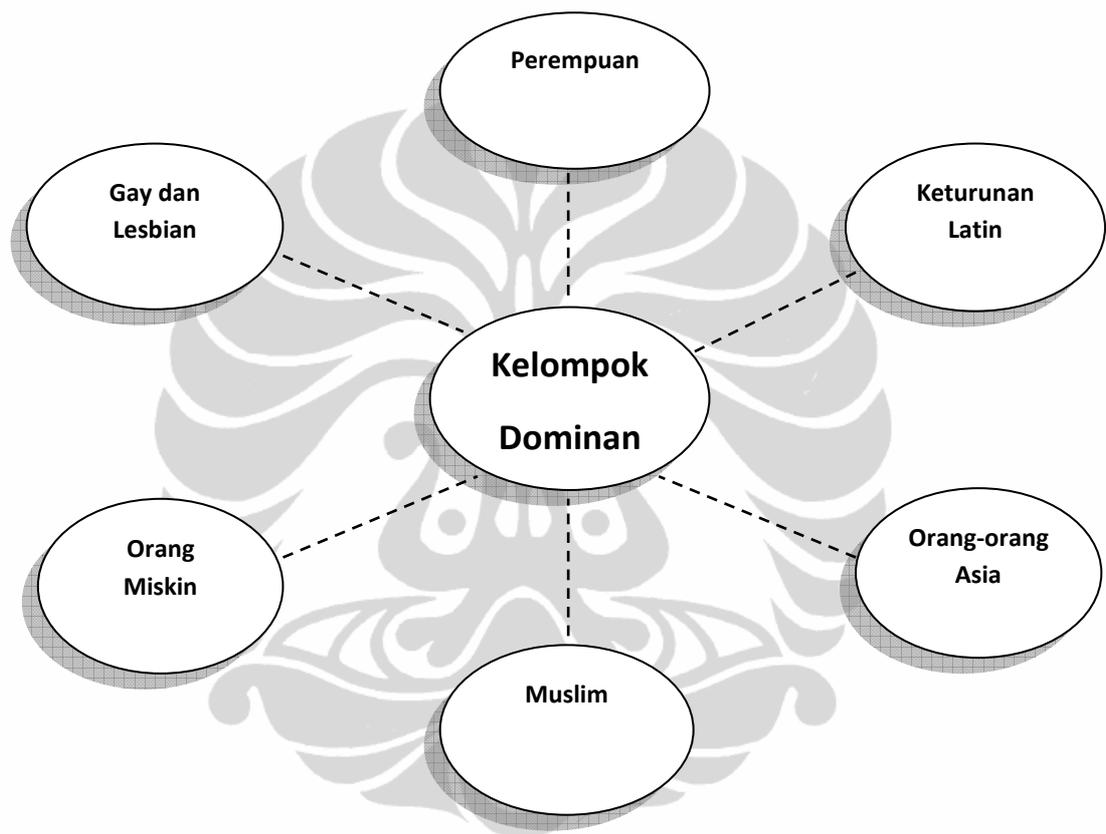
Nancy Hartsock mengadopsi pemikiran filsuf Jerman G.W.F. Hegel yang membahas mengenai hubungan tuan dan budak dalam membentuk perbedaan sikap para partisipan dalam hubungan tersebut. Juga pemikiran Karl Marx (West dan Turner, 2008: 500) yang berpendapat bahwa posisi pekerja membentuk kasus pekerja dalam meraih pengetahuannya. Marx mengklaim bahwa visi yang benar dari kelas sosial adalah keberadaan satu-satunya dari dua posisi kelas di dalam masyarakat kapitalis.

Nancy Hartsock lalu membaurkan ide-ide Hegel dan teori Marxis untuk mulai mengadaptasikan teori *Standpoint* yang digunakan untuk mempelajari hubungan diantara perempuan dan laki-laki. Melalui karyanya dengan ide-ide ini, pada tahun 1983 Harstock menerbitkan "*The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism*". Harstock memiliki ketertarikan untuk membuat perempuan hadir dalam teori Marx dan dengan demikian bisa menghasilkan teori Marxis-Feminis.

Harstock pun juga menerapkan konsep Hegel mengenai tuan dan budak dan pemikiran Marx mengenai kelas dan kapitalisme pada isu-isu mengenai jenis kelamin (kategori biologis laki-laki dan perempuan) dan gender (kategori perilaku maskulinitas dan feminitas). Ini merupakan bentuk adaptasi dari teori *Standpoint* yang umum, dan karenanya kebanyakan orang terkadang menyebut teori *Standpoint* sebagai *Feminist Standpoint Theory*, sebagaimana disebutkan

oleh Nancy Harstock pada tahun 1983. Kita harus mengakui ada keberagaman ini tetapi melihat bahwa karakteristik penentu yang menyatukan semua jenis feminisme adalah posisi sosial perempuan dan keinginan untuk mengakhiri dominasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (West dan Turner, 2010: 503).

**Gambar 2.1.1 Cakupan kelompok *Standpoint Theory***



Sumber: Diadaptasi dari Wood (West dan Turner, 2010: 505)

Teori *Standpoint* dapat digunakan untuk menganalisis berbagai sikap berdasarkan ras, kelas dan status ekonomi. Namun teori *Standpoint* Nancy Harstock menerapkan prinsip-prinsipnya pada sikap perempuan secara khusus. Peneliti teori *Standpoint* seperti Sandra Harding dan Julia Wood (Griffin, 2006: 482-483) mengklaim bahwa salah satu cara terbaik untuk mencari tahu bagaimana dunia itu berjalan adalah dengan melalui *standpoint* perempuan atau kelompok

masyarakat lain yang termaginalkan. *Standpoint* adalah tempat bagi kita untuk melihat dunia di sekeliling kita. Sinonim untuk *standpoint* adalah *viewpoint*, *perspective*, *outlook*, dan *position*. Perlu dicatat bahwa setiap kata ini memperlihatkan spesifik lokasi dalam waktu dan ruang dimana para peneliti mengambil tempat sambil mengarahkan nilai dan perilaku. Kelompok sosial tempat kita berada didalamnya sangat berperan penting dalam menambah pengalaman dan pengetahuan kita, termasuk juga cara kita memahami dan berkomunikasi dengan diri sendiri, orang lain, dan dunia.

Teori *Standpoint* memberikan titik awal untuk pemahaman mengenai beberapa dinamika yang dialami oleh kaum perempuan. Teori *Standpoint* memberikan kerangka untuk memahami sistem kekuasaan. Kerangka ini dibangun atas dasar pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari orang. Individu-individu adalah konsumen aktif dari realitas mereka sendiri dan bahwa perspektif individu-individu itu sendiri merupakan sumber informasi yang paling penting mengenai pengalaman mereka. Sebab perspektif dari mereka yang kurang berkuasa akan lebih objektif daripada mereka yang berkuasa. (Griffin, 2006: 482-483)

*Feminist Standpoint* bertujuan untuk mengkritisi adanya dominasi dari kaum laki-laki di dalam setiap aspek kehidupan masyarakat baik budaya patriarki maupun ideologi kekuasaannya. Adanya kelas dalam masyarakat telah membedakan kelas majikan dan kelas buruh atau pun membedakan ras yang pada akhirnya hanya berujung pada penempatan posisi perempuan di tengah masyarakat yaitu berada pada kelas kedua. Keadaan ini dapat terjadi karena adanya konstruksi budaya patriarki yang sangat kental di dalam diri masyarakat sehingga masyarakat itu sendiri memandang bahwa perempuan hanyalah kelompok yang berada di kelas kedua.

### **Asumsi Teori Standpoint**

Konsep teori Standpoint yang diutarakan Hartsock memiliki lima asumsi mengenai kehidupan sosial, yaitu (West and Turner, 2010 : 505):

1. Material life (or class position) structures and limits understandings of social relations
2. When material life is structured in two opposing ways for two different groups, the understanding of each will be an inversion of the other. When there is a dominant and a subordinate group, the understanding of the dominant group will be both partial and harmful
3. The vision of the ruling group structures the material relations in which all groups are forced to participate
4. The vision available to an oppressed group represent struggle and an achievement
5. The potential understanding of the oppressed (the standpoint) makes visible the inhumanity of the existing relations among groups and moves us toward a better and more just world.

Kelima asumsi tersebut mengungkapkan bahwa kehidupan material yang menyusun dan membatasi pemahaman akan hubungan sosial, dimana mengalami struktur dalam dua cara yang berlawanan. Ketika terdapat kelompok dominan dan kelompok bawahan, maka pemahaman dari kelompok yang dominan akan bersifat parsial dan merugikan. Selain itu, visi dari kelompok yang berkuasa akan menyusun hubungan material dimana semua kelompok dipaksa berpartisipasi. Sementara visi yang ada bagi kelompok tertindas merepresentasikan pergulatan dan prestasi. Potensi pemahaman dari mereka yang tertindas (sikap) membuat dapat dilihatnya ketidakmanusiawian dari hubungan yang ada di antara kelompok dan menggerakkan kita menuju dunia yang lebih baik dan adil.

*Epistemology* dan *ontology Standpoint* juga di dasarkan pada beberapa asumsi berikut ini: a) Semua pengetahuan adalah produk dari kegiatan sosial, dan karenanya tidak ada pengetahuan yang benar-benar objektif. b) Kondisi budaya yang secara khusus melingkupi kehidupan perempuan menghasilkan pengalaman dan pemahaman yang secara rutin berbeda dari yang dihasilkan oleh kondisi bingkai kehidupan pria. Pemahaman yang berbeda ini sering kali menghasilkan pola komunikasi yang unik. c) Memahami fitur-fitur unik dari pengalaman perempuan merupakan usaha yang layak dilakukan. d) Kita hanya dapat mengetahui pengalaman perempuan dengan memperhatikan interpretasi perempuan mengenai pengalaman ini (West dan Turner, 2010: 505-507).

Peneliti-peneliti teori *Standpoint* banyak yang menganjurkan menggunakan teori ini untuk menyelidiki pengalaman individu-individu yang terpinggirkan, tidak ada cara yang berbeda posisi masyarakat memberikan titik pandang yang subjektif dari orang-orang berinteraksi dengan diri sendiri dan dunia. Teori *Standpoint* berpendapat bahwa, meskipun terdapat beberapa persamaan dalam sudut pandang di antara anggota kelompok sosial tertentu, perbedaan masih keluar. Dengan demikian, teori ini memiliki gagasan bahwa tidak ada titik yang secara surei objektif dalam sudut pandang lain; pada intinya, semua kebenaran adalah sudut pandang.

### **Kunci Konsep Teori Standpoint**

Teori *standpoint* menjadi populer di kalangan penelitian komunikasi karena memiliki hubungan di mana komunikasi bertanggung jawab dalam posisi membentuk sudut pandang saat berjuang dan mempertahankan argumentasinya dalam pembelajaran tentang keberadaan individu pada lingkungan sosial melalui interaksi dengan individu lainnya. Teori ini pun mampu mengubah status quo dan menciptakan sebuah perubahan dengan memberikan suara bagi kelompok yang suaranya jarang didengar. Kesemua konsepnya berakar di dalam komunikasi.

Roseann Mandziuk (2003) memiliki poin bagaimana komunikasi, di dalam bentuk kampanye peringatan, mungkin akan berusaha untuk menciptakan sikap dalam kesadaran publik. Teori *Standpoint* karenanya, mengilustrasikan kesentralan komunikasi baik dalam membentuk dan menyalurkan sikap. Selain itu, teori ini menunjuk pada kegunaan komunikasi sebagai alat dalam mengubah *status quo* dan menghasilkan perubahan.

Dengan memberikan suara bagi mereka yang pandangannya jarang di dengar (Buzzanell, 2004), metode-metode yang dihubungkan dengan teori ini berfokus pada praktik-praktik komunikasi. Sebagaimana diamati oleh Julia Wood (1992), apakah suara perempuan sendiri diberikan legitimasi tampaknya secara khusus penting bagi penilaian para ilmuwan komunikasi mengenal nilai dari posisi teoretis alternatif. (West dan Turner, 2010: 511).

Konsep-konsep utama dari teori Standpoint adalah: *standpoint*, *situated knowledges*, dan *sexual division of labor* (West dan Turner, 2010: 508-511):

### 1. *Standpoint*

*Standpoint* yang merupakan konsep utama dari teori ini adalah lokasi, yang dimiliki bersama oleh kelompok yang mengalami status sebagai orang luar, di dalam struktur sosial, yang memberikan sejenis pemahaman bagi pengalaman orang yang telah dijalani. Lebih jauh lagi dari perspektif Nancy Harsock terungkap bahwa *Standpoint* itu tidak sekedar dipahami secara sederhana sebagai posisi yang diinginkan (dalam pengertian bias), tetapi diinginkan dalam arti diikutsertakan. Konsep keikutsertaan (*engagement*) tersebut diperjelas oleh para peneliti dengan membedakan antara *Standpoint* dan perspektif.

Menurut O'Brien Hallstein (2000) dalam (West dan Turner, 2010: 508) mengatakan bahwa perspektif dibentuk oleh pengalaman yang dibentuk oleh lokasi seseorang dalam sebuah hierarki sosial, sedangkan *Standpoint* hanya diraih setelah ada pemikiran, interaksi, dan perjuangan. Namun menurut Sandra Harding (1991) dalam (West dan Turner, 2010: 509) berpendapat bahwa *Standpoint* dimediasikan secara sosial karena *Standpoint* didefinisikan oleh lokasi sosial tertentu dengan kategori kebutuhan parsial atau tidak lengkap. Lokasi tersebutlah yang menentukan sebagian posisi dalam kehidupan sosial terlihat oleh grup parsial manapun.

Oleh karena itu, posisi atau lokasi terendah dalam hierarki masyarakat memiliki tingkat akurasi yang besar dengan mengacu pada kemampuan untuk melampaui batas visi parsial dan melihat keseluruhan sebagai bagian dari lokasi sosial secara spesifik.

### 2. *Situated Knowledges*

Konsep *Situated Knowledge* atau pengetahuan tersituasi adalah kontribusi dari Donna Haraway (1998). Istilah ini berarti pengetahuan setiap orang didasarkan pada konteks dan keadaan. Dengan begitu pengetahuan bersifat ganda

dan tersituasi di dalam pengalaman. Sehingga apa yang dipelajari seseorang dari posisinya sebagai perawat orang tuanya yang sakit berbeda dengan pengetahuan yang dikembangkan orang lain dari posisinya sebagai jurnalis.

Pengetahuan tersituasi menegaskan pada kita bahwa apa yang kita ketahui dan lakukan tidak berasal dari dalam melainkan merupakan hasil pembelajaran dari pengalaman-pengalaman kita. Jadi ketika akan merawat anggota keluarganya yang lanjut usia, jurnalis itu akan belajar mengenai pengetahuan merawat juga. Komunitas lokal yang berbeda mungkin akan mendefinisikan sikap secara berbeda tergantung dari pengalaman mereka.

### 3. *Sexual Division of Labor*

Pada umumnya, posisi peran sosial antara laki laki dan perempuan dibedakan atas peran sosial disektor publik dan peran sosial disektor domestik, maka jika demikian, peran sosial laki-laki biasanya lebih dominan disektor publik yang bersifat produktif dimana hasil dari aktifitas disektor ini selalu dihargai dengan sejumlah material tertentu seperti finansial, sedangkan perempuan pada umumnya ditempatkan pada peran sosial disektor domestik dengan fungsi-fungsi reproduksinya, yang dalam kenyataan tidak pernah dihargai dengan sejumlah material tertentu, karena seolah olah peran sosial domestik ini merupakan peran yang memang seharusnya dilakukan oleh perempuan.

*Feminist Standpoint Theory* Harstock yang terinspirasi oleh Marxisme berpijak pada pemikiran bahwa perempuan dan laki-laki terlibat dalam pekerjaan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin mereka, yang berakibat pada pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin (*sexual division of labor*). Pembagian ini tidak hanya menempatkan orang untuk mengerjakan tugas-tugas yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, tetapi hal ini juga mengeksploitasi perempuan dengan menuntut kerja tanpa memberikan upah sekaligus memberikan perempuan tanggungjawab dalam pemeliharaan yang tidak digaji dan dalam reproduksi dari tenaga kerja di masa kini dan masa depan (Chafetz, 1997: 104).

Selain itu, ketidaksetaraan yang diderita perempuan di tempat kerja ketika mereka terlibat dalam kerja keras untuk mendapatkan upah juga dihubungkan dengan kewajiban mereka atas pekerjaan domestik yang tidak digaji. Sebagaimana diungkapkan oleh Nancy Hirschmann (1997), sikap feminis membuat perempuan dapat mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan di rumah sebagai kerja dan kerja keras produktif akan nilai dibandingkan hanya merupakan hasil akhir yang penting dan esensial dari alam atau fungsi biologis yang dialami oleh perempuan secara pasif. Karena itu *Standpoint Theory* menggarisbawahi eksploitasi dan distorsi yang muncul ketika pekerjaan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.

Teori *Standpoint* menunjukkan kepada kita cara lain dalam memandang posisi, pengalaman, dan komunikasi yang relatif dari berbagai kelompok sosial. Teori ini memiliki kecondongan politis dan kritis yang jelas dan teori ini menunjukkan kekuasaan dalam kehidupan sosial. Teori ini menghasilkan banyak kontroversi karena orang menemukan teori ini baik menyinggung atau sesuai dengan pandangan mereka sendiri mengenai kehidupan sosial. Teori *Standpoint* bersifat heuristik dan provokatif. Teori ini juga kompatibel dengan teori-teori komunikasi yang lain, memungkinkan kita mengkombinasikan teori itu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih berguna bagi perilaku komunikasi manusia. Teori *Standpoint* sangat menjanjikan untuk menunjukkan perbedaan dalam perilaku komunikasi dari kelompok-kelompok sosial yang berbeda (West dan Turner, 2010: 512).

### **2.1.2 Perempuan dalam Dunia Politik**

Perempuan yang mengalami konstruksi sosial melalui paham patriarki, awalnya sama sekali tidak dapat memasuki dunia politik. Tempat perempuan yang diposisikan di sektor domestik menjadikan ruang dan peluang perempuan memasuki ranah politik kecil. Apalagi, tekanan kultural dan agama seakan mengukung cita-cita perempuan untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Sarwono Kusumaatmadja (Kusumaatmadja, 2007: 83) Politik perempuan adalah sikap perempuan untuk ikut dalam mengambil keputusan sekaligus menentukan keputusan tersebut. Sikap perempuan mengambil langkah politik tersebut sebagai bagian dari perjuangan perempuan mendobrak ketidakadilan yang terjadi akibat dominasi kelas dan kekuasaan oleh laki-laki selama ini. Melalui keputusan politik yang dihasilkan, maka perempuan secara luas akan mendapat jaminan keadilan dan kesetaraan dalam kehidupannya. Tentu langkah perempuan menuju dunia politik membutuhkan dukungan dari partai politik sebagai “kendaraan”.

Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan partai politik dalam hubungannya dengan partisipasi perempuan dalam politik antara lain menyangkut lima hal. Pertama, melakukan perubahan dalam struktur internal partai-partai politik yang memungkinkan perempuan lebih terlibat dalam partai sebagai anggota atau fungsionaris partai. Kedua, mencantumkan kualifikasi atau kesetaraan gender yang terukur dan transparan hingga perempuan lebih dapat berkiprah dan berkompetisi ketika mencalonkan diri. Ketiga, membentuk apa yang disebut komite kesetaraan gender yang tugasnya mengkaji pelbagai aturan dan kebijakan dalam perekrutan kandidat dan posisi kepemimpinan dalam partai politik. Keempat, menyertakan minimal 30% caleg perempuan, dan didasarkan lewat metode silang, yakni nama-nama caleg dituliskan bersilang antara caleg laki-laki dan caleg perempuan. Kelima, menetapkan 30% perempuan sebagai calon anggota pengurus partai politik. (Kusumaatmadja, 2007: 67)

Keterwakilan perempuan di dalam politik mendapat kesempatan setelah adanya “jatah” 30% berdasarkan UU Pemilu No. 12 tahun 2003 pasal 65 sehingga mampu terselenggaranya kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesempatan ini tentu merupakan perubahan besar terhadap persoalan ketidakadilan perempuan dalam dunia politik, karena melalui kuota 30%, perempuan memiliki hak untuk berada di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan ikut serta memutuskan kebijakan untuk kaumnya.

Keberadaan perempuan di dunia politik menjadi jawaban atas semangat demokrasi yang memberikan harapan baru bagi perempuan. Peran perempuan

tidak lagi terpenjara sebatas sektor domestik yaitu rumah tangga dan reproduksi semata, namun pula meliputi urusan penting dalam posisi sebagai anggota DPR RI.

...peran dan partisipasi perempuan bisa ikut serta dalam membangun demokrasi di Indonesia, terutama peran mereka di parlemen yang posisinya sangat strategis dan penting. (Soetjipto, 2005: 43)

Meskipun demikian, politik Indonesia masih merupakan politik patriarki yang masih menggunakan cara-cara laki-laki dalam praktiknya. Seperti rapat-rapat malam hingga pukul 3 pagi hingga kebijakan partai politik untuk memberi urutan nomor dalam pencalonan kadernya yang dirasa tidak adil karena calon perempuan kerap mendapat nomor bawah. Menurut Azza Karam (Karam dkk, 1999: 118), Pada saat perempuan memasuki parlemen, perjuangan mereka masih belum selesai. Di parlemen, perempuan memasuki bidang laki-laki. Parlemen dibentuk, diorganisasikan dan didominasi oleh laki-laki, yang bertindak untuk kepentingan mereka dengan membangun prosedur-prosedur yang menguntungkan diri mereka sendiri.

Tentu karakter dan cara-cara politik yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki akan berbeda, dan hal ini menjadi kekhawatiran karena meskipun telah menjadi anggota dewan, politisi perempuan tetaplah perpanjangan partai politik yang masih menganut paham patriarki. Sehingga kecemasan bahwa kesempatan bagi perempuan memasuki dunia politik hanya semu dan dijadikan “pemanis” saja bagi hegemoni laki-laki sebagai pemegang kekuasaan di dalam politik.

### **Komunikasi Politik Politisi Perempuan**

Komunikasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari, dan dipengaruhi oleh, budaya politik suatu masyarakat. Pada saat yang sama, komunikasi politik juga dapat melahirkan, memelihara dan mewariskan budaya politik.

Dengan memerhatikan struktur pesan serta pola-pola komunikasi politik yang diperankannya, maka dapat dianalisa budaya politik suatu masyarakat. Komunikasi politik sendiri, dalam pandangan Muis (1998: 6), mencakup organisasi-organisasi massa yang memperjuangkan suatu cita-cita politik melalui kegiatan berserikat serta menyatakan pendapatnya secara terbuka.

Sebagai aktor politik, tentu politisi perempuan memerlukan komunikasi politik untuk mendapatkan dukungan dan respon atas keberadaannya sebagai pemangku kebijakan di parlemen. Komunikasi politik yang baik akan membawa para politisi yang tidak hanya cantik tetapi pintar ini pada level yang lebih tinggi dari sekedar lolos menjadi perwakilan konstituen.

## 2.2 Studi *Framing* Media

Pada dasarnya, *framing* (Eriyanto, 2002: 10) adalah metode untuk melihat cara bercerita (*story telling*) media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan sebuah berita. Gagasan mengenai *framing*, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955 (Sudibyo dalam Sobur, 2009: 161).

Analisis *framing* cocok digunakan untuk melihat konteks sosial-budaya suatu wacana, khususnya hubungan antara berita dan ideologi, yakni proses atau mekanisme mengenai bagaimana berita membangun, mempertahankan, mereproduksi, mengubah, dan meruntuhkan ideologi. Analisis *framing* dapat digunakan untuk melihat siapa mengendalikan siapa dalam suatu struktur kekuasaan, pihak mana yang diuntungkan dan dirugikan, siapa si penindas dan si tertindas. (Mulyana dalam Eriyanto, 2002: xiv-xv)

Konsep *framing* digunakan secara luas dalam ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realitas oleh media. Setiap hari kita membaca dan melihat peristiwa-peristiwa yang sama dan diberitakan oleh media yang berbeda secara tidak sama. Cara-cara media melihat dan mengkonstruksi peristiwa tersebut merupakan proses pembingkaihan (*framing*). Dalam perspektif komunikasi, analisis *framing* digunakan untuk membedah ideologi ataupun cara-cara yang digunakan media ketika mengkonstruksi fakta yang ada di lapangan.

Seperti disebutkan di muka, pada dasarnya, pekerjaan media massa adalah mengkonstruksikan realitas. Isi media adalah hasil para pekerja mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya, di antaranya realitas politik.

Pada umumnya, terdapat tiga tindakan yang biasa dilakukan pekerja media massa (setiap orang bekerja pada sebuah organisasi media), khususnya oleh para komunikator massa (sejumlah orang dari pekerja media yang bertanggung jawab atas editorial sebuah media), tatkala melakukan konstruksi realitas politik yang berujung pada pembentukan makna atau citra mengenai sebuah kekuatan politik. (Hamad, 2004 :16-23)

*Pertama*, dalam hal pilihan kata (simbol) politik. Sekalipun media massa hanya bersifat melaporkan, namun telah menjadi sifat dari pembicaraan politik untuk selalu memperhitungkan simbol politik. Dalam komunikasi politik, para komunikator bertukar citra-citra atau makna-makna melalui lambang. Mereka saling menginterpretasikan pesan-pesan (simbol-simbol) politik yang diterimanya. Dalam konteks ini, sekalipun melakukan pengutipan langsung (*direct quotation*) atau menjadikan seorang komunikator politik sebagai sumber berita dengan pilihan simbol yang digunakan sumber tersebut. Tetapi, manakala media massa membuat ulasan, sebutlah editorial, pilihan kata itu ditentukan sendiri oleh sang komunikator massa.

*Kedua*, dalam melakukan pemingkakan (*framing*) peristiwa politik. Minimal oleh sebab adanya tuntutan teknis: keterbatasan-keterbatasan kolom dalam halaman (pada media elektronika), jarang ada media yang membuat berita sebuah peristiwa secara utuh, mulai dari menit pertama kejadian hingga ke menit paling akhir. Atas nama kaidah jurnalistik, peristiwa yang panjang, lebar, rumit, dicoba "disederhanakan" melalui pemingkakan (*framing*) fakta-fakta dalam bentuk berita sehingga layak terbit atau layak tayang. Untuk kepentingan pemberitaan ini, komunikator massa seringkali hanya menyoroti hal-hal yang "penting" (mempunyai nilai berita) dari sebuah peristiwa politik. Dari segi ini saja, mulai terlihat ke arah mana pembentukan (formasi) sebuah berita. Ditambah pula dengan berbagai kepentingan, maka konstruksi realitas politik sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentingan (menarik keuntungan atau pihak mana yang diuntungkan) dengan berita tersebut.

*Ketiga*, menyediakan ruang atau waktu untuk sebuah peristiwa politik. Justru hanya jika media massa memberi tempat pada buah peristiwa politik, maka

peristiwa akan memperoleh perhatian dari masyarakat. Semakin besar tempat yang diberikan semakin besar pula perhatian yang diberikan oleh khalayak. Pada konteks ini media massa memiliki fungsi *agenda setter* sebagaimana yang dikenal dengan Teori *Agenda Setting*. Tesis utama teori ini adalah besarnya perhatian masyarakat terhadap sebuah isu amat bergantung seberapa besar media, apalagi sejumlah media, menaruh sebuah kasus sebagai *headline*, diasumsikan kasus itu pasti memperoleh perhatian yang besar dari khalayak. Ini tentu berbeda jika, misalnya, kasus tersebut dimuat di halaman dalam, bahkan dipojok bawah pula. Faktanya, konsumen media jarang memperbincangkan kasus yang tidak dimuat oleh media, yang boleh jadi kasus itu justru sangat penting untuk masyarakat.

Cara pandang atau perspektif melalui konstruksi (Nugroho, Eriyanto, Surdiasis dalam Sobur, 2009: 162) pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut. Karenanya, berita menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang *legitimate*, objektif, alamiah, wajar, atau tak terelakkan. (Imawan dalam Sobur, 2009: 162)

Di dalam *framing* media, terdapat beberapa variabel yang memengaruhi konstruksi bingkai dan konstruksi realitas sosial (Wicks dalam Kalbfleisch, 2005: 342), yaitu:

1. Politik atau orientasi ekonomi media

Prinsip-prinsip dan pilihan seoran wartawan dan pekerja media terhadap orientasi politik akan memengaruhi tulisannya. Jurnalis dengan perspektif liberal atau konservatif akan meninggalkan objektivitasnya, mereka mungkin melakukan seleksi terhadap organisasi dan bekerja dengan kolega-kolega yang memiliki kecenderungan politik dan kepercayaan yang sama, yang mana menjadi orientasi politik.

2. Praktek komunikasi dan pembatasan-pembatasan

Produser dari pesan-pesan bekerja dengan logika dan organisasi pembatasan-pembatasan organisasi (Shomaker & Reese, 1996). Kepedulian faktor ekonomi dapat mengarahkan berita apa yang ditutupi dan apa yang diungkap.

Informasi kompleks harus ditekan untuk diakomodasi ke dalam struktur media seperti televisi, harian umum, majalah, dan internet. Karena institusi alami dari organisasi jurnalis, nilai-nilai berita ini termasuk aturan-aturan persetujuan diputuskan oleh praktisi media dan dibawah aspirasi wartawan ketika kuliah.

### 3. Sistem kepercayaan jurnalistik

Para jurnalis dan editor membuat keputusan-keputusan secara tidak sadar maupun sadar untuk menjelaskan informasi dasar dalam sistem kepercayaan mereka. Sistem kepercayaan ini terkandung dengan skema hubungan nilai suatu berita (Wicks, 1992). Pesan-pesan inilah yang diberikan warna oleh kecenderungan mereka, yang mana kemungkinan mempengaruhi baik struktur dan isi dari pesan (Geiger & Reeves, 1991). Agenda pribadi dan bias dari produser berita juga memberikan pengaruh bagaimana pesan-pesan dikonstruksi. Objektivitas, meskipun merupakan tujuan dari keprofesionalan seorang komunikator adalah hal yang tak dapat diperoleh.

### 4. Teknik-teknik menarik perhatian audiens

Tujuan objektif organisasi media adalah untuk menarik audiens. Memberikan informasi kepada anggota audiens seringkali hanya sebagai tujuan kedua. Hal ini, bagaimanapun, selaras dengan kenyataan bahwa drama atau berita yang memiliki unsur emosional sangat penting sehingga berada pada posisi terdepan dalam penyiaran ataupun di halaman depan pada pemberitaan.

#### 2.2.1 Analisis *Framing* Robert N. Entman

Pada dasarnya, analisis *framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Mulanya, *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974, yang mengandaikan *frame*

sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas.

Menurut Eriyanto (Eriyanto, 2009: 189), frame berita muncul dalam dua level. Pertama, konsepsi mental yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita. Kedua, perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai peristiwa.

Dalam penelitian ini analisis framing yang digunakan adalah analisis framing Robert N. Entman yang merupakan salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media. Menurut Entman (Eriyanto, 2009: 185), meskipun analisis framing dipakai dalam berbagai bidang studi yang beragam, satu faktor yang menghubungkannya adalah bagaimana teks komunikasi yang disajikan, bagaimana representasi yang ditampilkan secara menonjol mempengaruhi khalayak.

Framing dalam pikiran Entman bisa menjadi paradigma penelitian komunikasi. Framing dapat dipakai dalam beberapa konsep, misalnya.

Pertama, otonomi khalayak. Bagaimana khalayak menafsirkan dan mengkode symbol dan pesan yang diterima. Bagaimana sebuah teks dibaca secara dominan oleh khalayak, dan kenapa teks dibaca dengan cara pandang tertentu dan bukan dengan cara lain. Kedua, praktik jurnalistik. Ranah penelitian ini misalnya melihat bagaimana frame mempengaruhi kerja wartawan. Apa yang diperhatikan oleh wartawan pertama kali ia meliput peristiwa, kenapa ia melihat aspek tertentu, alasan apa yang menyebabkan ia melihat dengan cara tertentu dan bukan dengan cara lain. (Eriyanto, 2009: 185)

Robert N. Entman (1991) melihat *framing* dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas . Kedua faktor ini dapat lebih mempertajam *framing* berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dalam penekanan isi beritanya. Perspektif wartawanlah yang akan menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan dibuangnya. Di balik semua ini, pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita. Penonjolan membuat informasi menjadi lebih bermakna.

Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok sudah barang tentu punya peluang besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami realitas. Karena itu dalam praktiknya, *framing* dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu lain; serta menonjolkan aspek isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana penempatan yang mencolok (menempatkan di *headline*, halaman depan, atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan.

Pada dasarnya, pola penonjolan tersebut tidaklah dimaknai sebagai bias, tetapi secara ideologis sebagai strategi wacana upaya menyuguhkan pada publik tentang pandangan tertentu agar pandangannya lebih diterima. Kata penonjolan (*salience*) didefinisikan sebagai membuat sebuah informasi lebih diperhatikan, bermakna, dan berkesan.

Suatu peningkatan dalam penonjolan mempertinggi probabilitas penerima akan lebih memahami informasi, melihat makna lebih tajam, lalu memprosesnya dan menyimpannya dalam ingatan. Bagian informasi dari teks dapat dibuat lebih menonjol dengan cara penempatannya atau pengulangan atau mengasosiasikan dengan simbol-simbol budaya yang sudah dikenal.

Bagaimanapun, tingkat penonjolan teks dapat sangat tinggi bila teks itu sejalan dengan skemata sistem keyakinan penerima. Skemata serta konsep-konsep tersebut erat berhubungan dengan kategori, *scripts*, atau *stereotype*, yang merupakan kumpulan ide di dalam mental yang memberi pedoman seseorang untuk memproses informasi. Karena penonjolan merupakan sebuah produk interaksi antara teks dan penerima, maka kehadiran *frame* dalam teks tidak menjamin pengaruhnya terhadap pemikiran khalayak (Entman, 1993).

*Framing*, kata Entman (1993), memiliki implikasi penting bagi komunikasi politik. *Frames*, menurutnya, menuntut perhatian terhadap beberapa aspek dari realitas dengan mengabaikan elemen-elemen lainnya yang memungkinkan khalayak memiliki reaksi berbeda. Politisi mencari dukungan

dengan memaksakan kompetisi satu sama lain. Mereka bersama jurnalis membangun *frame* berita. Dalam konteks ini, lanjut Entman, *framing* memainkan peran utama dalam mendesak kekuatan politik, dan *frame* dalam teks berita sungguh merupakan kekuasaan yang tercetak ia menunjukkan identitas para aktor atau *interest* yang berkompetisi untuk mendominasi teks.

Namun Entman menyayangkan, banyak teks berita dalam merefleksikan permainan kekuasaan dan batas wacana atas sebuah isu, memperlihatkan homogenitas *framing* pada satu tingkat analisis, dan belum mempersaingkannya dengan *framing* lainnya. Konsep *framing*, dalam pandangan Entman, secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkap *the power of a communication text*. *Framing analysis* dapat menjelaskan dengan cara yang tepat pengaruh atas kesadaran manusia yang didesak oleh transfer (atau komunikasi) informasi dari sebuah lokasi, seperti pidato, ucapan/ungkapan, *news report*, atau novel.

*Framing*, kata Entman, secara esensial meliputi penyeleksian dan penonjolan. Membuat *frame* adalah menseleksi beberapa aspek dari suatu pemahaman atas realitas, dan membuatnya lebih menonjol di dalam suatu teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga mempromosikan sebuah definisi permasalahan yang khusus, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan atau merekomendasikan penanganannya (Siahaan, 2001:8081).

G.J. Aditjondro (1992) mendefinisikan *framing* sebagai metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya. Menurut Aditjondro proses *framing* merupakan bagian tak terpisahkan dari proses penyuntingan yang melibatkan semua pekerja di bagian keredaksian media cetak.

Reporter di lapangan menentukan siapa yang diwawancarainya. Redaktur, dengan atau tanpa berkonsultasi dengan redaktur pelaksana, menentukan apakah laporan si reporter akan dimuat atukah tidak, dan menentukan judul apa yang

akan diberikan. Petugas tatamuka, dengan atau tanpa berkonsultasi dengan para redaktur tersebut, menentukan apakah teks berita itu perlu diberi aksentuasi foto, karikatur, atau bahkan ilustrasi lain atau tidak, serta foto, karikatur, atau bahkan ilustrasi mana yang dipilih.

Bahkan, kata Aditjondro, proses *framing* tidak hanya melibatkan para pekerja pers, tapi juga pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus-kasus tertentu yang masing-masing berusaha menampilkan sisi-sisi informasi yang ingin ditonjolkannya (sambil menyembunyikan sisi-sisi lain), sambil mengaksentuasikan kesahihan pandangannya dengan mengacu pada pengetahuan, ketidaktahuan, dan perasaan para pembaca. Proses *framing* menjadikan media massa sebagai arena di mana informasi tentang masalah tertentu diperebutkan dalam suatu perang simbolik antara berbagai pihak yang sama-sama menginginkan pandangannya didukung pembaca.

Memang, salah satu yang menjadi prinsip analisis *framing* adalah bahwa wartawan bisa menerapkan standar kebenaran, matriks objektivitas, serta batasan-batasan tertentu dalam mengolah dan menyuguhkan berita. Dalam merekonstruksi suatu realitas, wartawan juga cenderung menyertakan pengalaman serta pengetahuannya yang sudah mengkristal menjadi skemata interpretasi (*schemata of interpretation*). Dengan skemata ini pula wartawan cenderung membatasi atau menyeleksi sumber berita, serta memberi porsi yang berbeda terhadap tafsir atau perspektif yang muncul dalam wacana media.

Konsepsi framing Entman pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi di dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap suatu peristiwa yang diwacanakan. Berikut 4 buah pertanyaan yang melatarbelakangi konsepsi framing Entman (Eriyanto, 2009: 188-189):

|  |   |
|--|---|
| Define Problems<br>(Pendefinisian masalah)                     | Bagaimana suatu peristiwa/ isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?  |
| Diagnose causes<br>(Memperkirakan masalah atau sumber masalah) | Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah? |
| Make moral judgement<br>(Membuat keputusan moral)              | Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?          |
| Treatment Recommendation<br>(Menekankan penyelesaian)          | Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/ isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?                    |

**Tabel 2.2.1** Pertanyaan dalam *Framing* Robert N. Entman

Berikut penjelasan dari konsep framing Robert N. Entman (Eriyanto, 2009: 190-191):

*Define problems* adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai framing. Elemen ini merupakan *master frame/* bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda.

*Diagnose causes* merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa berarti apa (*what*), tetapi juga bisa berarti siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula.

*Make moral judgement* adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan/ memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut.

Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.

*Treatment recommendation* merupakan elemen yang dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

### 2.2.2 Perempuan dan *Framing* di Media

Potret diri perempuan di media massa,--menurut Marwah Daud Ibrahim (Ibrahim dan Suranto, 1998: 107)—, dalam literature, surat kabar/ majalah, film, televisi, iklan, dan buku-buku masih memperlihatkan stereotip yang merugikan: perempuan pasif, tergantung pada pria, didominasi, menerima keputusan yang dibuat pria, dan terutama melihat dirinya sebagai simbol seks.

Mengapa gambaran tentang perempuan dalam media massa belum menggembirakan betul, Marwah Daud Ibrahim mengungkapkan empat alasan (Ibrahim dan Suranto, 1998: 108).

Pertama dan yang paling sederhana karena realitas sosial dan budaya perempuan memang belumlah menggembirakan juga. Media pada dasarnya adalah cermin dan refleksi dari masyarakat secara umum.

Kedua, media massa pada dasarnya cenderung mengangkat hal-hal yang menarik dalam masyarakat. Ini pada gilirannya membuat media meliput orang-orang yang berpengaruh dari berbagai bidang kehidupan: politik, agama, sastra, teknologi, ekonomi, dan sebagainya. Jadi kalau potret perempuan masih minim dalam deretan orang berpengaruh itu berarti bahwa dalam kenyataannya orang dinilai berpengaruh itu sangat terbatas jumlahnya yang berkelamin perempuan.

Ketiga, orang media biasanya menganggap hal-hal yang memilukan sebagai sesuatu yang menarik untuk diangkat. Tampaknya, pelakon dari hal-hal yang memilukan, mengurus air mata dan emosi adalah perempuan. Keempat, karena yang mendominasi media: pemilik, penulis, reporter, editor, dan sebagainya masih didominasi oleh pria.

Konservatisme media massa atas *framing* perempuan tersebut dijaga oleh budaya patriarki. Julia I. Suryakusuma mengungkapkan, ideologi patriarki bisa langgeng karena dipelihara secara sadar maupun tidak sadar. Sistem nilai patriarki diberi pupuk dan disebarluaskan bukan hanya melalui laki-laki tapi juga wanita (Subandy dkk, 1998: 150).

Jika melihat fungsi media massa sebagai pembaharu dan pemegang kontrol sosial, semestinya media memiliki kecenderungan untuk melakukan gebrakan dan perlawanan terhadap budaya yang cenderung merendahkan dan mendominasi perempuan. Bukan justru melegalkan dan memupuk ketertindasan terhadap perempuan. Seperti yang dinyatakan Julia I Suryakusuma dalam tulisannya 'Perempuan dan Konservatisme Media Massa' berikut ini:

Media massa di Indonesia tampaknya masih merupakan kekuatan konservatif ketimbang progresif. Peran media massa bukan sebagai pendobrak nilai-nilai, melainkan sebagai penjaga *status-quo*. (Subandy dkk, 1998: 153)

Pembingkaiian perempuan di media massa sebagai kelas bawah dan objek masih terjadi hingga kini dan memperlihatkan ketidakmampuan media melakukan pembaruan dan melepaskan keberpihakannya atas dominasi patriarki. Padahal, menurut Habermas (Hardt, 2005: 237), Media sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari dalam 'dunia kehidupan' berfungsi sebagai bentuk-bentuk komunikasi yang umum. jadi pers, radio, dan televisi, misalnya, memiliki fungsi yang mungkin. Media adalah partisipan yang bebas dari keterbatasan ruang dan waktu (*spatial-temporal*) mereka, menyediakan berbagai konteks, dan menjadi instrument dalam penciptaan ruang publik yang mampu melayani kepentingan-kepentingan otoriter atau emansipatoris.

### **2.3 Media Cetak, Berita dan Ekonomi Media**

Media massa adalah sarana utama untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi. Informasi yang benar akan mencerahkan kehidupan karena akan membantu menjernihkan pertimbangan untuk bisa mengambil keputusan yang

tepat. Informasi yang tepat akan menjadi sarana pendidikan yang efektif. Memiliki akses ke informasi berarti kemudahan untuk mendapatkan kekuasaan atau mempertahankannya, yang pada gilirannya akan membantu orang mendapatkan keuntungan.

Sayangnya, hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar sering tidak dijamin karena adanya pertarungan kepentingan dalam hal politik, ekonomi, atau budaya. Media massa tidak lagi hanya berbasis informasi namun juga telah menjelma menjadi sebuah industri. Dalam cara berpikir industri, informasi pertama-tama dianggap sebagai barang dagangan. Ciri komersil ini menjadi lebih penting daripada misi utama media, yaitu untuk klarifikasi dan memperkaya debat demokrasi (Ramonet dalam Haryatmoko, 2007: 20).

Semakin banyaknya media cetak yang tumbuh dan bermunculan, melahirkan sebuah persaingan yang sengit diantara media cetak itu sendiri untuk mendapatkan pembaca. Pada akhirnya membuat media cetak di bawah tekanan persaingan yang semakin keras dan tuntutan mendapatkan keunutan yang semakin besar. Haryatmoko menulis, banyak pimpinan media datang dari dunia perusahaan bukan lagi dimonopoli oleh dunia jurnalisme. Menurutnya, para pimpinan ini tidak terlalu peka akan tuntutan informasi yang benar (Haryatmoko, 2007: 21).

Komersialitas media massa, termasuk media cetak memberikan pilihan yang sedikit kepada masyarakat sebagai pembaca untuk mendapatkan berita sebagai informasi yang benar-benar netral dan tanpa adanya bias kepentingan dibalik penulisan dan penyajian berita tersebut. Padahal, akses media cetak masih menjadi pilihan masyarakat karena mudah didapatkan dan harganya terjangkau. Media cetak juga memberikan ulasan yang detail dan lengkap serta dapat didokumentasikan untuk dibaca disela-sela waktu.

Fakta bahwa media cetak telah menjadi bagian dari industri media dapat dilihat sebagai upaya menjadikan berita, sebagai komoditas utama, semata-mata sebagai produksi barang yang dijual dengan tujuan laku keras dan berimplikasi

pada keuntungan besar yang didapatkan oleh media tersebut sebagai sebuah perusahaan.

Pada akhirnya, dengan pola ini, proses penulisan dan penyajian berita sebagai bahan yang ditawarkan kepada pembaca sebagai pembeli, akan ditentukan oleh banyak faktor termasuk laku atau tidaknya berita tersebut jika disajikan. Hal inilah yang dapat membangun bias dalam berita, dimana berita ditulis tidak sejujurnya fakta yang terjadi namun karena adanya unsur-unsur ekonomi media dibelakangnya.

### 2.3.1 Berita

Berdasarkan kemungkinan yang dapat diperannya, media massa merupakan kekuatan raksasa yang sangat diperhitungkan. Dalam berbagai analisis tentang kehidupan sosial, ekonomi dan politik, media sering ditempatkan sebagai salah satu variabel determinan. Bahkan media, terlebih dalam posisinya sebagai suatu institusi informasi, dapat pula dipandang sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses-proses perubahan sosial-budaya dan politik. Bahkan, pers pun kerap disebut-sebut sebagai salah satu pilar demokrasi.

Media sesungguhnya memiliki fungsi kontrol sosial di masyarakat. Biasanya, terdapat 2 cara kontrol sosial yang dilakukan oleh media cetak, yaitu secara eksplisit, melalui penyajian tajuk rencana (editorial) dan artikel (column), dan secara implisit, melalui penyajian berita (news). Beberapa unsur yang menjadi ciri khas berita adalah (1) berita merupakan laporan fakta atau opini, (2) unsur waktu yang merupakan laporan tercepat (timeless) atau laporan pertama, dan (3) unsur menarik minat atau penting bagi kepentingan umum (public interest).

Sebagai kontrol sosial, media memanfaatkan informasi untuk menyampaikan pesan (isi) yang memiliki makna dan tujuan tertentu dalam penulisannya. Dalam studi media, ada tiga pendekatan untuk menjelaskan isi media seperti yang dinyatakan Brian McNair dalam Agus Sudibyo (Sudibyo,

2001: 2-4), yaitu pendekatan politik-ekonomi, pendekatan organisasi, pendekatan kulturalis

Pertama, pendekatan politik-ekonomi (*the political-economy approach*). Pendekatan ini berpendapat bahwa isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media. Faktor seperti pemilik media, modal, dan pendapatan media dianggap lebih menentukan bagaimana wujud isi media. Faktor-faktor inilah yang menentukan peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam pemberitaan, serta ke arah mana kecenderungan pemberitaan sebuah media hendak diarahkan.

Dalam pendekatan ini, mekanisme produksi berita dilihat sebagai bagian integral dari relasi ekonomi dalam struktur produksi. Pola dan jenis pemberitaan ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi yang secara dominan menguasai pemberitaan. Dalam teori ini penyaringan dalam proses produksi berita terjadi justru dengan memperhitungkan kekuatan-kekuatan ekonomi politik.

Chomski dan Herman, misalnya, menawarkan pendekatan yang mereka sebut sebagai mempropagandakan nilai-nilai tertentu untuk didesakkan kepada publik. Dalam model mereka ini, memang ada unsur penyaring, namun penyaringan ini merepresentasikan kekuatan ekonomi politik yang ada dalam masyarakat. Ada lima penyaringan: (1) ukuran besar-kecil, kepemilikan dan orientasi pemasaran media; (2) pengiklan; (3) sumber berita; (4) falk; (5) ideology antikomunisme.

Kedua, pendekatan organisasi (*organizational approaches*). Pendekatan organisasi, justru melihat pengelola media sebagai pihak yang aktif dalam proses pembentukan dan produksi berita. Dalam pendekatan ini, berita dilihat sebagai hasil dari mekanisme yang ada dalam ruang redaksi. Praktik kerja, profesionalisme, dan tata aturan yang ada dalam ruang organisasi adalah unsur-unsur dinamik yang mempengaruhi pemberitaan.

Proses produksi berita adalah mekanisme keredaksian semata, dimana setiap organisasi berita mempunyai pola dan mekanisme tersendiri untuk memberitakan suatu peristiwa. Mekanisme itu bersifat internal dan tidak

ditentukan oleh kekuatan di luar diri media. Media dianggap otonom dalam menentukan apa yang boleh atau tidak boleh, apa yang baik atau buruk, dan apa yang layak atau tidak layak untuk diberitakan.

Ketiga, pendekatan kulturalis (*culturalist approach*). Pendekatan ini merupakan gabungan antara pendekatan ekonomi politik dan pendekatan organisasi. Proses produksi berita di sini dilihat sebagai mekanisme yang rumit yang melibatkan faktor internal media (rutinitas organisasi media) sekaligus juga faktor eksternal di luar diri media. Mekanisme yang rumit itu ditunjukkan dengan bagaimana perdebatan yang terjadi dalam ruang pemberitaan. Media pada dasarnya memang mempunyai mekanisme untuk menentukan pola dan aturan organisasi, tetapi berbagai pola yang dipakai untuk memaknai peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekuatan-kekuatan ekonomi politik di luar diri media.

Pengaruh eksternal media menurut pendekatan kulturalis mempunyai posisi yang berbeda dibandingkan dengan pendekatan ekonomi politik. Dalam pendekatan ekonomi politik, pengaruh eksternal itu digambarkan bersifat langsung dan koersif. Kekuatan pemodal, pengiklan, atau partai politik berpengaruh langsung dalam berbagai bentuk larangan atau keharusan untuk menulis berita dengan cara dan konteks tertentu. Dalam pendekatan kulturalis, pengaruh kekuatan ekonomi politik dominan dalam pemberitaan itu diyakini tidak bersifat langsung. Dalam banyak kasus, justru seringkali tidak disadari oleh wartawan. Wartawan menganggap beritanya objektif, berimbang, dan dua sisi, padahal secara tidak langsung berita itu ternyata melanggengkan dan menguntungkan kekuatan ekonomi politik yang dominan.

Berdasarkan kemungkinan yang dapat diperannya, media massa merupakan kekuatan raksasa yang sangat diperhitungkan. Dalam berbagai analisis tentang kehidupan sosial, ekonomi dan politik, media sering ditempatkan sebagai salah satu variabel determinan. Bahkan media, terlebih dalam posisinya sebagai suatu institusi informasi, dapat pula dipandang sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses-proses perubahan sosial-budaya dan politik. Bahkan, pers pun kerap disebut-sebut sebagai salah satu pilar demokrasi.

Shoemaker & Reese (1996) menyatakan bahwa di dalam menyajikan berita pada khalayak, maka isi media akan dipengaruhi oleh beberapa hal berikut, yaitu:

1. Ideologi yang dianut, dengan mana sebuah institusi media melandaskan operasional usahanya.
2. Individu-individu yang bekerja di dalam institusi media tersebut. Setiap individu mempunyai karakteristiknya masing-masing dan hal ini akan berpengaruh terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Latar belakang dan sikap pribadi akan berpengaruh kepada isi media sebagai hasil dari pekerjaannya.
3. Rutinitas yang menjadi kebiasaan di dalam media tersebut. Isi yang muncul pada media massa adalah hasil dari rutinitas pekerjaan yang dilakukan oleh para individu dengan banyak latar belakang tadi, seperti masalah deadline, pembagian ruang di dalam penerbitan, nilai berita, struktur penulisan berita, dan lain sebagainya.
4. Pengaruh organisasional. Setiap organisasi dan institusi mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan yang paling mendasar adalah keuntungan. Tujuan-tujuan ini akan mempengaruhi isi media.
5. Pengaruh dari luar organisasional. Pengaruh dari luar organisasi terhadap media bisa sangat beragam jenisnya. Hal seperti ini dapat muncul dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang melakukan lobi-lobi untuk isi tertentu dari media, orang-orang yang menciptakan peristiwa rekayasa untuk mendapat liputan berita, dan pemerintah yang secara langsung mengatur isi media melalui peraturan-peraturannya menyangkut nama baik dan hal-hal yang berbau cabul.

Dalam penelitian ini peristiwa komunikatif yang akan diteliti adalah Pemberitaan Kasus 'Hukum Pancung TKI Ruyati' periode 20 Juni 2011 sampai 1 Juli 2011 dengan diputuskannya moratorium TKI oleh pemerintah.

### 2.3.2 Produksi Berita

Mempelajari sebuah berita atau hasil laporan dalam media cetak, tentu tidak dapat dilepaskan dari proses panjang diproduksinya berita itu sendiri. Produksi berita adalah proses hubungan yang sangat kuat antara jurnalis dalam rangkaian waktu yang sangat mendesak dengan sumber berita di sisi lain yang dianggap legitimate, melalui jaringan kontak dan prosedur, sebagai sumber “fakta” dan “fakta substantif lainnya”.

Istilah gatekeeping dipergunakan untuk menggambarkan proses di mana seleksi dibuat dalam kerja media, terutama melalui keputusan untuk melewatkan atau tidak melewatkan satu laporan berita tertentu melewati “gate” dari medium berita menuju saluran berita. Tetapi, sebenarnya, istilah gatekeeping dapat diterapkan bukan hanya pada kantor berita dan penerbit, tetapi pada konteks yang lebih luas menyangkut juga kerja editorial maupun produksi dalam media cetak, yang berhubungan dengan keputusan tentang distribusi dan pemasaran dari produk-produk media yang telah ada. Artinya, proses gatekeeping ini berhubungan dengan kekuasaan untuk memberikan atau menahan akses pada suara masyarakat yang berbeda dan seringkali ini menjadi sumber konflik.

Prosesnya sendiri dimulai ketika berbagai pesan potensial berjalan melalui sejumlah saluran untuk mencapai beberapa tipe organisasi komunikasi, seperti layanan kabel, kantor kehumasan, jaringan surat kabar, jaringan televisi, dan lain sebagainya. Merujuk pada Pamela J Shoemaker, (dalam Tumber, 1999: 73), masing-masing organisasi memiliki sejumlah anggota staf yang beroperasi dalam batasan posisi peran input, dengan masing-masing memiliki kekuasaan untuk mengontrol pesan-pesan potensial yang memasuki organisasi, dan kekuasaan untuk membentuk pesan-pesan tersebut.

Dalam organisasi kompleks, para pameran gatekeeper kemudian bertugas untuk memilih pesan dan kemudian menyalurkannya pada satu atau lebih gatekeeper internal, yang kemudian melakukan proses seleksi mereka sendiri dan juga berusaha membentuk pesan-pesan tersebut sedemikian rupa dalam berbagai cara. Pesan-pesan yang bertahan “hidup” kemudian ditransmisikan kepada

gatekeeper terakhir untuk proses pembentukan, seleksi akhir, dan kemudian disebar-luaskan kepada khalayak atau organisasi komunikasi lain. Proses gatekeeping internal dalam organisasi menyatu dalam rutinitas dan karakteristik organisasi komunikasi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi cara para gatekeeper ini mengambil keputusan.

Dari sini kita dapat melihat bagaimana kompleksnya proses gatekeeping ini. Para individu gatekeeper yang memiliki kesukaan atau ketidaksenangan, gagasan tentang sifat alamiah dari pekerjaannya, cara pikirnya tentang suatu masalah tertentu, strategi pengambilan keputusan yang diinginkan, dan nilai-nilai individu, yang kesemuanya akan mempengaruhi proses memilih atau menolak ( dan membentuk) sebuah pesan.

Memang, gatekeeper sendiri tidaklah benar-benar bebas dalam menentukan pilihan pribadinya. Para individu gatekeeper ini bekerja dalam lingkup tekanan rutinitas organisasi dalam melakukan semua aktivitasnya. Semua keputusan yang diambil sudah tentu harus terjadi dalam kerangka kerja organisasi yang bersangkutan, yang jelas juga memiliki sejumlah prioritasnya sendiri, tetapi juga secara berkesinambungan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain dari luar organisasi, atau bahkan institusi sosial-yang dapat menghindar dari fakta bahwa mereka terikat dengan sistem sosial di mana mereka berada.

Konsumsi teks media dicirikan oleh praktek dan rutinitas dari institusi itu sendiri. Teks media dikonsumsi dalam konteks domain private, di rumah dan dalam konteks kehidupan keluarga. Riset dalam penerimaan media menunjukkan sejumlah cara dimana konsumsi teks media seringkali disisipkan dalam kehidupan domestic. Sehingga, sangatlah penting untuk mengkonseptualisasi konsumsi teks media sama seperti produksi media dalam pengertian transformasi yang terjadi sepanjang peristiwa komunikatif.

Merujuk pada perspektif diatas, jelas bahwa banyak hal yang akan mempengaruhi bagaimana sebuah berita dikumpulkan, diolah, dan kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Kepentingan pemilik perusahaan dan kepentingan bisnis menjadi dua faktor utama yang mendominasi, diluar faktor

eksternal lainnya, seperti situasi politik dan sistem pers yang berlaku di negara tersebut.

Gatekeeper, dalam hal ini berbagai pihak yang ada di bagian redaksi memiliki kewenangan yang sangat luas untuk memodifikasi sebuah berita menjadi informasi yang layak muat dan layak sebar. Sudah tentu modifikasi ini akan disesuaikan dengan berbagai hal dan berbagai kepentingan di lingkungan sekitarnya. Berita bukan lagi bahan asli, tetapi sudah menjadi bahan jadi sesuai dengan keperluannya. Ketika pada akhirnya, masyarakat menerima berita tersebut, semua informasi yang telah diolah, diracik dan dibumbui itu dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak. Informasi tersebut menjadi sesuatu yang dianggap sangat penting untuk dipikirkan.

Sebagai perantara informasi, media cetak, menurut Roger Fidler (Fidler, 2003: 397), diharapkan melaporkan dengan jujur dan obyektif, menyelidiki, menganalisis, menjelaskan, menyaring, mengecek kebenarannya, mengorganisasikan, meletakkan dalam konteks dan memberi pemahaman atas informasi yang sering berlawanan yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang berbeda. Di negara-negara demokratis, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai “anjing penjaga” pemerintah dan mewaspadaan warga terhadap kejahatan dan ancaman-ancaman terhadap kebebasan dan hak-hak sipil mereka. Media cetak seharusnya memberikan suatu konteks sosial dan membantu menjelaskan arti penting relatif dari peristiwa-peristiwa dan isu-isu serta membantu pemahaman umum atas dunia yang kita diami ini.

Habermas, seperti dikutip oleh Norman Fairclough (1995: 44), menekankan pentingnya media sebagai sebuah *public sphere* politik yang efektif, sebuah ruang bagi debat rasional dan diskusi masalah-masalah politik. Namun ternyata, peran itu saat ini tidak berjalan dengan baik, yang terjadi adalah komersialisasi media, sehingga khalayak lebih berperan sebagai pengamat (spectator) dan bukan partisipa, sebagai konsumen (dari hiburan yang tersedia), dan bukan sebagai warga negara.

Pada dasarnya bias berita terjadi karena media massa tidak berada di ruang vakum. Media sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik dan fakta yang kompleks dan beragam. Dalam bukunya Analisis Teks Media, Alex Sobur (2009: 30) mengajukan pendapat dari dua orang tokoh tentang bias media ini. Pertama, yaitu Louis Althusser yang mengemukakan bahwa:

Media dalam hubungannya dengan kekuasaan, menempati posisi strategis, terutama karena anggapan akan kemampuannya sebagai sarana legitimasi. Media massa sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan, agama, seni dan kebudayaan merupakan bagian dari alat kekuasaan negara yang bekerja secara ideologis guna membangun kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa (*ideological states apparatus*)

Sementara pendapat kedua adalah dari Antonio Gramsci yang menentang pendapat Althusser dengan mengabaikan resistensi ideologis dari kelas ter subordinasi dalam ruang media. Bagi Gramsci,

media merupakan arena pergulatan antar-ideologi yang saling berkompetisi (*the battle ground for competing ideologies*).

Media adalah ruang dimana berbagai ideologi dipresentasikan. Ini berarti, disatu sisi media bisa menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi, dan kontrol atas wacana publik. Namun, disisi lain, media juga bisa menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan media bisa menjadi alat untuk membangun kultur dan ideologi dominan bagi kepentingan kelas dominan, sekaligus juga bisa menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.

Dari kedua pernyataan diatas, Sobur kemudian menyimpulkan bahwa sesungguhnya media massa (tentu saja termasuk media cetak), bukanlah sesuatu yang bebas, independen, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. Jelasnya, ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa. Disamping kepentingan ideologi antara masyarakat dan negara, dalam diri media massa juga terselubung kepentingan yang lain, misalnya kepentingan kapitalisme pemilik modal, kepentingan keberlangsungan (*sustainability*), lapangan kerja bagi para

karyawan, dan lain sebagainya. Dalam kondisi dan posisi seperti ini, media massa tidak mungkin berdiri statis di tengah-tengah, dia akan bergerak dinamis diantara pusaran-pusaran kepentingan yang sedang bermain. Kenyataan inilah yang menyebabkan bias berita di media massa adalah sesuatu yang sulit dihindari.

Media yang menganut bias juga dinyatakan oleh Severin dan Tankard (1992) dalam buku *Communication Theories*:

*The mass media forces attention to certain issues. They build up publik images of political figures. They are constantly presenting objects suggesting what individuals in the mass should think about, know about, have feeling about... It may not be successful much of the time in telling people what to think, but it is stunningly successful in telling its readers what to think about.*

Bias, menurut Mc Quail (2000: 109), memiliki beberapa tipe. Pertama adalah bias pengalaman rasa (*bias of sense experience*), yang membuat kita dapat mengalami dunia dalam citra visual yang lebih banyak atau lebih kurang. Kedua, dalam bentuk dan representasi (*bias of form and representation*), dengan “pesan” (terutama dalam media cetak) dikode secara kuat atau bahkan tidak dikode sama sekali, seperti dalam kasus fotografi. Ketiga, ada bias terhadap isi pesan (*bias of message content*), dalam pengertian ada yang terlalu atau malah kurang realistik atau ada juga yang polisemi, ada yang berformat terlalu terbuka atau bahkan terlalu tertutup. Keempat, ada bias dalam penggunaan konteks (*bias of context of use*), dengan beberapa media dianggap membiarkan dirinya masuk pada penerimaan privat dan individualistis, sementara yang lain dianggap lebih kolektif dan saling dibagi oleh khalayak. Dan kelima, ada bias dalam hubungan (*bias of relationship*), yang tergambarkan dalam pola hubungan pengirim dan penerima dalam media interaktif.

### **2.2.3 Ekonomi Politik Media**

Media massa tidak lagi hanya menjadi pengantar informasi kepada masyarakat, media massa telah tumbuh menjadi sebuah industri dan produk yang

memiliki kekuatan ekonomi dibelakangnya. Dengan jatuhnya masa pemerintahan Soeharto, akses berita dan informasi menjadi lebih luas dan dapat dinikmati oleh setiap orang dari segala kelas. Informasi yang datang bersama udara demokrasi membawa media menjadi konsumsi masyarakat apalagi didukung pula oleh perkembangan teknologi internet yang semakin berkembang yang membawa pula informasi di dalamnya.

Kekuatan ekonomi di belakang media massa memberi banyak pengaruh terhadap media baik dalam hal ideologi, penulisan berita, dan kemasan media tersebut. Apalagi dengan pesatnya pertumbuhan media-media massa baru seperti televisi dan harian umum yang mengakibatkan tingkat persaingan yang tinggi, media menjadi lebih kompetitif dalam mendapatkan pembacanya.

Industri media cetak merupakan industri media yang melalui proses panjang dalam pembentukannya. Tentunya, media cetak memiliki kebutuhan ekonomi yang tinggi baik dengan percetakan, biaya kertas, biaya distribusi dan lain-lain. Picard bahkan menilai bahwa industri media cetak (khususnya dalam hal ini Koran merupakan industri yang berpengalaman dalam konsentrasi ekonomi).

*The newspaper industry has experienced significantly increased economic concentration, and the amount of concentration found increase rapidly as the size of the market decreases. (Picard dalam Owers, 1998: 114)*

Seperti ditunjukkan oleh Dhakidae, pers di Indonesia berubah di masa Orde baru, dari sebuah medium wacana politik menjadi industri komersial yang signifikan. Kami melihat secara singkat perkembangan pers yang secara politis bersifat lentur dan secara komersial sanggup bertahan di tahun-tahun pertengahan (1970-an-1980-an) era Orde baru, melewati sensor, korporatisasi, dan investasi. (Sen dan Hill, 2001: 62)

Investasi ekonomi di media memang menjanjikan. Selain pasar yang memberikan respon positif terhadap keberadaan media, perkembangan media semakin lama semakin tinggi. Tingkat keuntungan yang dapat dicapai dari pengiklan dapat memberikan kekuatan ekonomi yang cukup untuk menggerakkan media itu bahkan mengembangkannya menjadi lebih besar lagi.

Basis ekonomi media (ekonomi politik) merupakan teori media yang dikembangkan dari pendekatan Marxis sejauh ia memunculkan perhatian tentang bagaimana hegemoni media berfungsi untuk melayani kepentingan yang kuat (kuasa dan kapital). Teori ekonomi politik memfokuskan pada pemahaman mengenai arti penting basis ekonomi media. Teori-teori ekonomi politik menjelaskan bagaimana kepemilikan bentuk-bentuk media bisa memasukkan posisi-posisi ideologis dan mitos-mitos sosial orang-orang yang mengkreasi pesan media. Industri berita atau bisnis berita bisa dibaca sebagai ‘berita sebagai industri’, terutama tatkala praktik jurnalisme sangat digerakkan oleh pasar dan jurnalis mulai menjadi sekedar sekrup dalam mesin industri bisnis media. (Ibrahim dalam Hardt: 2005: xvi)

Pasar informasi (news business) pertama-tama adalah untuk mencari keuntungan (Haryatmoko, 2007: 23). Tidak boleh terlambat, tidak boleh didahului oleh Koran lain atau televisi lain. Untuk itu media siap berlomba menyiarkan yang sensasional atau spektakuler, dengan harga apapun, yang terkadang sampai mengorbankan profesionalisme. Perubahan media menanggalkan profesionalisme dalam menyampaikan informasi menjadi mencari keuntungan, seperti logika simulasi J. Baudrillard, orang tidak pernah akan sampai pada kebenaran karena antara realitas, representasi, hiperrealitas atau tipuan tidak bisa dicek atau dibedakan lagi. Persaingan menghalalkan semua cara. (Haryatmoko, 2007: 22)

Persaingan tersebut bukan tanpa alasan. Keterhubungan antara iklan dan media yang menjadikan iklan sebagai sumber pendapatan utama media untuk menghidupi dirinya membuat independensi media lenyap. Menurut Dennis McQuail dalam buku *Mass Communication Theories* (McQuail, 2005: 223):

*The distinction has both an economic and a non-economic significance. In respect of the latter, it is usually believed (from the critical or public interest and professional perspectives) that the higher the dependence on advertising as source of revenue, the less independent the content from the interests of the advertisers and business generally.*

Dengan adanya kebutuhan pengiklan untuk memasuki ruang media sebagai sarana promosi mereka terhadap target konsumen, maka hubungan

ekonomi yang saling menguntungkan pun mulai dijalin antara media dan pengiklan. Media sendiri membutuhkan sumber pendapatan untuk membiaya produksi dan distribusi informasinya. Pada akhirnya ekonomi media tidak dapat dihindari sebagai dampak dari keterhubungan kekuasaan dalam sistem pasar.

Ekonomi media berfokus pada bagaimana industri media mengalokasi sumber-sumber untuk menciptakan informasi dan isi hiburan agar mampu memenuhi kebutuhan audiens, pengiklan, dan institusi sosial lainnya (Picard dalam Owers dkk, 1998: 2). Hubungan media dan iklan membenarkan bahwa media tidaklah tanpa kontrol. Picard justru berpendapat bahwa yang paling efektif mengontrol isi media adalah ekonomi. (Owers dkk, 1998: 1)

#### **2.4 Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

Hak WNI untuk mendapatkan pekerjaan dan kebebasan memilih pekerjaan dilindungi UUD 1945, Pasal 27 Ayat 2, bahwa setiap Warga Negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak ini tidak boleh dibatasi maupun dikungkung oleh alasan apapun. Kebebasan memilih pekerjaan ini tentu sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan baik untuk pekerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah dikategorikan sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja rumah tangga (PRT). TKI bidang informal sebagai PRT ini didominasi oleh perempuan dan ditempatkan di negara-negara tujuan yang membutuhkan bantuan PRT. Keberadaan TKI sebagai PRT di luar negeri memang memberikan label kepada Indonesia sebagai negara pengimpor pembantu. Namun di sisi lain, pada dasarnya pengiriman TKI ke luar negeri untuk menjawab permintaan 'pasar' yang tinggi atas sumber daya manusia untuk mengurus pekerjaan domestik (rumah tangga). Sehingga sebenarnya hubungan yang terjalin adalah hubungan *simbiosis mutualisme*, yaitu hubungan saling menguntungkan.

Pengiriman, penempatan dan perlindungan TKI dilakukan oleh negara di bawah Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) secara langsung untuk melakukan pemantauan. Penempatan tenaga kerja di luar negeri ini diatur oleh Pasal 34 UU Nomor 13 Tahun 2003. Pengaturan ini juga berdasarkan Konvensi ILO Nomor 88 pasal 6 huruf b butir IV yang berbunyi (<http://www.bnp2tki.go.id/hasil-penelitian-mainmenu-276/226-permasalahan-pelayanan-dan-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri.html>):

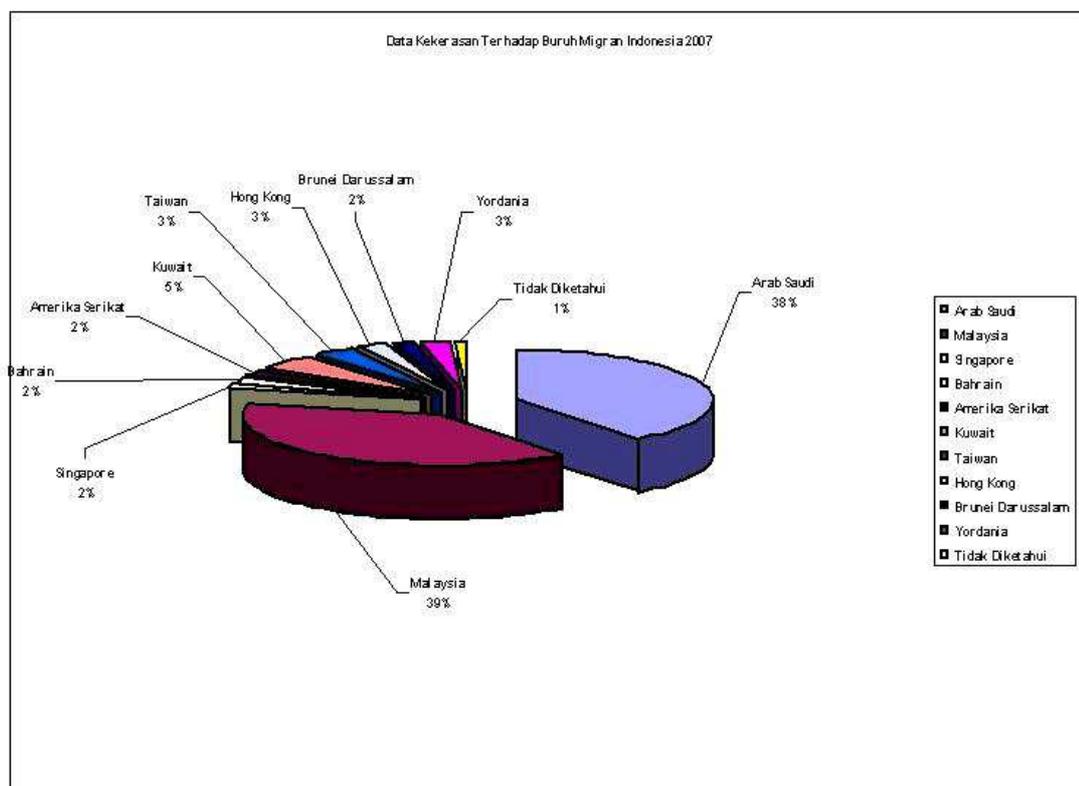
“Pemerintah diwajibkan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempermudah setiap perpindahan tenaga kerja dari satu Negara ke Negara yang lain yang mungkin telah disetujui oleh Pemerintah Negara penerima Tenaga Kerja Indonesia”.

Pengiriman dan penempatan TKI sektor domestik didominasi oleh perempuan. Menurut Sarwono Kusumaatmadja (2007: 17), sampai tahun 2004, dari sekitar 3 juta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sekarang berada dan bekerja di luar negeri sebagian besar yakni 70% di antaranya adalah perempuan dan 95% dari Tenaga Kerja Wanita (TKW) bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT). Tidak dapat dipungkiri, kemiskinan menjadi pangkal munculnya PRT, terutama di daerah-daerah pedesaan yang menjadi tempat berasalnya PRT paling banyak.

Fenomena dan potret kemiskinan di pedesaan inilah yang kemudian menjadikan pekerjaan rumah tangga sebagai pilihan pekerjaan perempuan-perempuan. Mereka memilih menjadi PRT untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan bagi anak-anaknya serta keinginan untuk mencapai kesejahteraan yang layak. Perempuan-perempuan ini hanyalah korban dari kekuasaan laki-laki dalam bidang ekonomi yang menguasai sistem produksi.

## Kekerasan Terhadap TKI

Berdasarkan hal tersebut, keberadaan dan perlindungan TKI dijamin oleh negara sebagai pengirim TKI ke negara tujuan. Namun sayangnya, perlindungan TKI masih menjadi masalah pemerintah Indonesia. Data Migrant Care, sebuah lembaga swadaya yang memperjuangkan nasib buruh migrant memperlihatkan diagram kekerasan yang dialami buruh Indonesia pada tahun 2007.



**Gambar 2.4** Diagram Kekerasan Buruh Migrant Indonesia tahun 2007

Tindakan kekerasan terhadap perempuan yang berprofesi sebagai TKI seperti dipaksa bekerja tanpa jam kerja yang jelas, pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan perkosaan. Bahkan banyak kasus yang menunjukkan upah kerja TKI setelah bekerja berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun belum dibayarkan oleh majikan mereka. Belum lagi ancaman hukuman mati yang dihadapi TKI karena hukum di negara tempat mereka bekerja memiliki aturan sendiri.

Kasus hukuman mati terhadap TKI dapat kita lihat dari Kasus Ruyati. Ruyati dijatuhi hukum pancung oleh pemerintah Arab Saudi setelah membunuh majikannya. Ironisnya, eksekusi terhadap Ruyati tersebut tidak diketahui oleh pemerintah Indonesia sehingga eksekusi Ruyati tanpa pendampingan. Padahal penyebab Ruyati melakukan pembunuhan karena keinginannya untuk pulang ke Indonesia tidak dipenuhi oleh majikannya.

Kesemrawutan persoalan TKI juga dapat terlihat dari adanya pungutan liar terhadap TKI yang terjadi di KBRI dan KJRI Malaysia. Modus pungutan liar ini terbitnya SK/[Surat Keputusan](#) ganda, untuk SK pungutan tinggi ditunjukan sewaktu memungut biaya, sedangkan SK pungutan rendah digunakan sewaktu menyetero uang pungutan kepada negara. Pungli ini berawal dari [PPATK](#) yang mencium aliran dana tidak wajar dari para pegawai negeri di Konjen Penang pada Oktober 2005, dikemudian hari terungkap, pungutan serupa juga terjadi di [KBRI](#) Kuala Lumpur. Pungli ini menyeret para pejabat ke meja hijau, termasuk mantan [Duta Besar](#) Indonesia untuk Malaysia [Hadi A Wayarabi](#), [Erick Hikmat Setiawan](#) (kepala KJRI Penang) yang divonis 20 bulan penjara dan M Khusnul Yakin Payapo (Kepala Subbidang Imigrasi Konjen RI Penang).

Selain pungutan liar, TKI juga dibayang-bayangi tindakan pemotongan gaji mereka secara ilegal. Hampir semua TKI atau buruh migran Indonesia mengalami potongan gaji secara ilegal. Potongan ini disebutkan sebagai biaya penempatan dan "bea jasa" yang diklaim oleh PJTKI dari para TKI yang dikirimkannya. Besarnya potongan bervariasi, mulai dari tiga bulan sampai tujuh, bahkan ada yang sampai sembilan bulan gaji. Tidak sedikit TKI yang terpaksa menyerahkan seluruh gajinya dan harus bekerja tanpa gaji selama berbulan-bulan. Praktik ini memunculkan kesan bahwa TKI adalah bentuk perbudakan yang paling aktual di Indonesia.

Ironisnya, posisi TKI yang mendapatkan banyak ketidakadilan berbanding terbalik dengan sumbangan pemasukan yang mereka berikan ke kas negara. Menurut data yang ada di *Kompas* (21/6/2011), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperoleh penerimaan negara bukan pajak rata-rata Rp. 750 miliar per tahun. Hal inilah yang memberikan gelar TKI sebagai pahlawan Devisa

Negara. Hal ini memperlihatkan bahwa TKI hanya kaum bawah yang diperas tenaganya dan diambil keuntungan darinya tanpa ada upaya memberikan perlindungan kepadanya karena pemerintah lebih memilih melindungi kaum elit.

## 2.5 Asumsi Penelitian

Penelitian ingin melihat keterwakilan suara politisi perempuan di media cetak dalam kasus 'Hukum Pancung TKI Ruyati'. TKI yang didominasi secara besar oleh perempuan mewakili persoalan perempuan yang belum terpenuhi. TKI menghasilkan devisa yang besar bagi negara, namun perlindungan bagi mereka masih belum maksimal. Perjuangan memberikan perlindungan kepada TKI melalui kebijakan politik dapat dilakukan politisi perempuan yang memiliki posisi strategis. Apalagi, perspektif politisi perempuan sebagai perempuan mampu memahami persoalan yang dialami perempuan-perempuan TKI secara lebih mendalam. Perjuangan yang dilakukan oleh politisi perempuan tersebut dapat didorong dengan suara mereka di media cetak. Namun kekuasaan (hegemoni) media cetak sebagai industri kapitalis melakukan seleksi dan *framing* terhadap suara politisi perempuan di media cetak.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Paradigma Penelitian

Paradigma diartikan sebagai kumpulan longgar tentang asumsi yang secara logis dianut bersama, konsep, atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian. Orientasi atau perspektif teoretis adalah cara memandang dunia, asumsi yang dianut orang tentang sesuatu yang penting, dan apa yang membuat dunia, bekerja.

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis konstruktivisme (*critical constuctionism*). Paradigma kritis konstruktivisme ini berkembang pada zaman *Frankfurt School* yang kemudian telah menggabungkan antara teori konflik dan teori simbolik interaksionisme yang keduanya menjadi latar belakang munculnya teori kritikal konstruksionisme tersebut. Terlihat jelas bahwa keadaan sosial dan budaya di tengah masyarakat ini adalah tidak terjadi dengan sendirinya namun dikarenakan terbentuk oleh budaya yang mempengaruhi mereka yakni budaya patriarki.

Budaya yang menempatkan posisis laki-laki sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau sebagai kaum borjuis yang memiliki kekuasaan tinggi dengan kepentingan-kepentingannya. Berdasarkan keadaan ini, maka posisi perempuan kembali dipertegaskan berada di posisi kedua atau sebagai kaum proletar yang tingkat kekuasaannya sangat rendah begitu juga dengan kepentingan-kepentingannya.

Menurut Milton M. Campos, kritis konstruktivisme merupakan penggabungan antara konstruktivisme yang dilihat dengan kritis epistemologi. Terjadinya penggabungan ide tersebut berhubungan dengan bagaimana orang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan dampak struktur kekuasaan dalam masyarakat.

Cavallaro berpendapat, fase ‘teori kritis’ kerap dihubungkan secara historis dengan aktivitas Madzhab Frankfurt. Aktivitas tersebut berlangsung antara awal 1920-an hingga akhir 1950-an dengan tujuan melampaui pembacaan yang semata-mata fungsional dan pragmatic terhadap teori-teori Marx melalui sebuah pendekatan ‘kritis diri’ (*self-critical*) yang secara konsisten mencermati hubungan antara teori-teori Marx dan budaya kontemporer.

Kini, frase ‘teori kritis’ umumnya tidak lagi digunakan secara spesifik. Teori kritis memaparkan sekelompok pendekatan yang telah mengajukan sebuah penilaian radikal terhadap gagasan tentang makna, sejarah, identitas, kekuasaan, produksi budaya dan konsumsi budaya. (Cavallaro, 2004: xviii)

Kritis konstruktivisme ini berbeda dengan sosial konstruktivisme yang mana kritis konstruktivisme menekankan pada peran kepentingan kaum elit dalam proses konstruksi masalah. Dengan meminjam pemahaman dari teori konflik, kritis konstruktivisme membuktikan bahwa cara masalah-masalah sosial dibentuk, dipahami, dan dipresentasikan kepada khalayak, kurang lebih, merefleksikan kepentingan-kepentingan dari masyarakat elit sebagai yang utama daripada kepentingan masyarakat dengan tingkat kekuasaan rendah. (Heiner, 2006: 10)

Dengan kata lain bagaimana pemerintah (penguasa atau kaum borjuis) membentuk dan mempresentasikan setiap fenomena-fenomena sosial sebagai masalah masyarakat yang harus tetap mengedepankan kepentingan mereka sendiri. Jadi kritis konstruktivisme melihat masalah tindak kekerasan atas diri pekerja migran perempuan merupakan masalah sosial yang melibatkan masyarakat bawah sebagai kaum yang minim kekuasaan. Di lain pihak pun masalah sosial ini menjadi sebuah perjuangan bagi masyarakat bawah untuk dapat mensuarakannya hingga ke kaum elit di atas.

Namun perlu diingat bahwa kritis konstruktivisme ini tidak membantah bahwa masalah sosial terbentuk secara tidak adil dan membahayakan masyarakat. Akan tetapi, kritis konstruktivisme membuktikan pandangan kritis bahwa masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat telah dibelokkan oleh kekuatan-kekuatan hubungan yang terjalin antara penguasa dan yang dikuasai dalam proses pembentukannya. Jadi, kritis konstruktivisme tidak terlalu penting untuk

memenuhi pencarian solusi atas sebuah masalah, tetapi berguna bagi penetapan perspektif yang mengizinkan peneliti untuk menafsirkan apa yang menjadi masalah dalam masyarakat. Keinginan peneliti dalam menafsirkan sebuah masalah sosial yang tidak terlalu berat di kalangan masyarakat elit (Heiner, 2006: 11).

Pada tesis ini, penulis menggunakan paradigma *critical constructionism* karena ingin menguraikan realitas yang dikonstruksi oleh kelompok dominan (*Kompas* sebagai industri kapitalis) terhadap suara politisi perempuan dalam kasus ‘Hukum Pancung TKI Ruyati’. Konflik yang muncul dalam penelitian ini ketika suara politisi perempuan dalam pemberitaan Ruyati hanya sedikit dibandingkan suara politisi laki-laki padahal politisi perempuan merupakan keterwakilan perempuan di DPR. Sementara interaksi simbolik yang terlihat dalam penelitian ini adalah unsur *me*, *myself* dan *I* yang terdapat di dalam politisi perempuan yang melihat keterhubungannya dengan TKI Ruyati sebagai perempuan yang tertindas dan keterhubungannya dengan media massa.

## **3.2 Metode Penelitian**

### **3.2.1 Penelitian Kualitatif**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sejarah awal penelitian kualitatif dipengaruhi oleh harapan-harapan politis dan ideologi dari para periset. Mereka mencari temuan-temuan penelitian yang mengukuhkan teori dan keyakinan kepercayaan yang ada. Periset kualitatif tidak saja mengkaji sejarah, bahkan juga turut memainkan peran di dalamnya.

*Qualitatif research* adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. (Strauss and Corbin dalam Sukidin, 1997: 1)

Peneliti buku penelitian kualitatif lainnya, Denzin dan Lincoln, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penulis lainnya memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses induktif, dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan *setting* fenomena yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti.

Terdapat beberapa fungsi dan pemanfaatan penelitian kualitatif yang disebutkan oleh Dr. Lexy J. Moleong dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, yaitu untuk keperluan: pada penelitian kualitatif awal di mana subjek penelitian tidak didefinisikan secara baik dan kurang dipahami; pada upaya pemahaman penelitian perilaku dan penelitian motivasional; untuk penelitian konsultatif; memahami isu-isu rumit sesuatu proses; memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang; untuk memahami isu-isu sensitif; untuk keperluan evaluasi; untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif; untuk meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang subjek penelitian; untuk lebih memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui; untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui; digunakan untuk meneliti sesuatu secara mendalam; dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk menelaah sesuatu latar belakang misalnya tentang motivasi; digunakan untuk menggunakan hal-hal yang belum banyak diketahui ilmu pengetahuan; dimanfaatkan oleh peneliti yang ingin meneliti sesuatu dari segi prosesnya.

Sebagai perangkat tafsir fenomena sosial, penelitian kualitatif tidak mengistimewakan salah satu metodologi atas metodologi lain. Di antara metode dan praktik penelitian kualitatif, digunakan pula dalam konteks lain di dalam studi-studi kemanusiaan. Masing-masing metode dan strategi penelitian memiliki jejak-jejak historis yang khas dari disiplinnya sendiri-sendiri. Penggunaan dan arti metode penelitian kualitatif yang berbeda-beda menyulitkan diperolehnya kesepakatan di antara para periset mengenai definisi yang mendasar atasnya.

Peneliti kualitatif memasuki area penelitian yang diminatinya untuk menafsirkan fenomena yang ditemuinya, tidak memanipulasi atau mengontrolnya, dan berusaha mencampurinya sedikit mungkin. Peneliti kualitatif menekankan logika individu-individu yang diteliti, daripada logika formal. Dalam penelitian kualitatif, peran bahasa dan makna-makna yang dianut subjek penelitian, menjadi penting.

Ada beberapa asumsi kunci dari apa yang disebut tulisan ilmiah kualitatif. Menurut Gorman & Clayton yang disadur oleh Septiawan Santana K. dalam buku *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, diungkapkan bahwa penulis kualitatif melaporkan *meaning of events* dari apa yang diamati oleh penulis. Laporan tersebut berisi pengamatan berbagai kejadian dan interaksi yang diamati langsung oleh penulis dari tempat kejadian. Penulis juga terlibat secara partisipatif di dalam observasinya. Sehingga penulis menjadi pengamat langsung.

Penelitian kualitatif menekankan pentingnya memahami bagaimana orang menginterpretasikan berbagai kejadian di dalam kehidupan mereka. Dengan pola pikir induktif, peneliti menarik hal-hal khusus yang ia temui dalam setiap kejadian di mana ia sedang melakukan pengamatan ke dalam kesimpulan secara umum yang merujuk pada pola perilaku atau asumsi dari kejadian atau tindakan sosial yang dilakukan oleh subjek penelitian tersebut.

### 3.2.2 Karakter Penelitian Kualitatif

Metode kualitatif mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles dan Huberman, 1994: 6-7).

Dilihat dari apa yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman, dapat dikatakan bahwa metode kualitatif menyajikan hal khusus dan unik yang terjadi dalam realitas sosial sehari-hari di dalam kehidupan kita. Hal khusus dan unik tersebut kemudian diungkap secara terbuka dan rinci namun menggunakan kerangka dan batasan-batasan ilmiah yang menaunginya.

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau suatu organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Bogdan dan Taylor dalam Sukidin, menyatakan bahwa karakter khusus penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan keunikan individu, kelompok, masyarakat, atau mengungkapkan keunikan subjek (individu, kelompok, masyarakat, atau suatu organisasi tertentu) secara komprehensif dan serinci mungkin diperlukan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu *setting* tertentu pula. Kesemuanya itu dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Dalam bukunya, Dr. Lexy J. Moleong (Moleong, 2009) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lainnya. Terdapat 11 ciri penelitian kualitatif.

#### 1. Latar alamiah

Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Hal ini dilakukan menurut Lincoln dan Guba,

karena *ontology* alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.

Menurut mereka hal tersebut didasarkan atas beberapa asumsi: (1) tindakan pengamatan memengaruhi apa yang dilihat, karena itu hubungan penelitian harus mengambil tempat pada keutuhan-dalam-konteks untuk keperluan pemahaman; (2) konteks sangat menentukan dalam menetapkan apakah suatu penemuan mempunyai arti bagi konteks lainnya, yang berarti bahwa suatu fenomena harus diteliti dalam keseluruhan pengaruh lapangan; dan (3) sebagian struktur nilai kontekstual bersifat determinatif terhadap apa yang akan dicari.

## 2. Manusia sebagai alat (instrumen)

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena, jika memanfaatkan alat yang bukan-manusia dan mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.

## 3. Metode kualitatif

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

## 4. Analisis data secara induktif

Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif, yaitu dari khusus ke umum dengan beberapa alasan. Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data; kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akontabel; ketiga, analisis demikian lebih dapat

menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya; keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan; dan terakhir, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.

#### 5. Teori dari dasar (*grounded theory*)

Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Hal ini dikarenakan, pertama, tidak ada teori *a priori* yang mencakupi kenyataan-kenyataan ganda yang mungkin akan dihadapi; kedua, penelitian ini mempercayai apa yang dilihat sehingga ia berusaha untuk sejauh mungkin menjadi netral; dan ketiga, teori dari-dasar lebih dapat responsif terhadap nilai-nilai kontekstual.

#### 6. Deskriptif

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

#### 7. Lebih mementingkan proses dari hasil

Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi “proses” daripada “hasil”. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

#### 8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah-masalah dalam penelitian. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, batas menentukan kenyataan ganda yang kemudian mempertajam fokus. Kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus. Dengan kata lain,

bagaimana pun, penetapan fokus sebagai masalah penelitian penting artinya dalam usaha menemukan batas penelitian.

9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data

Peneliti kualitatif mendefinisikan validitas, realibilitas dan objektivitas dalam versi lain dibandingkan lazim digunakan dalam penelitian klasik. Menurut Lincoln dan Guba, hal ini disebabkan oleh validitas internal cara lama telah gagal karena hal itu menggunakan isomorfisme antara hasil penelitian dan kenyataan tunggal di mana penelitian dapat dikonvergensi. Kedua, validitas eksternal gagal karena tidak taat asas dengan aksioma dasar dari generalisasinya. Ketiga, kriteria reliabilitas gagal karena mempersyaratkan stabilitas dan keterlaksanaan secara mutlak dan keduanya tidak mungkin digunakan dalam paradigma yang didasarkan atas desain yang dapat berubah-ubah. Keempat, kriteria objektivitas gagal karena kuantitatif justru memberi kesempatan interaksi antara peneliti-responden dan peranan nilai.

10. Desain yang bersifat sementara

Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan.

11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama

Penelitian kualitatif lebih menghendaki agar penelitian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sumber data.

### **3.3 Metode Penelitian Berperspektif Feminis**

Penelitian Suara Politisi Perempuan di media cetak yang dilakukan ingin melihat sejauh mana politisi perempuan sebagai perempuan memiliki kecenderungan untuk menyuarakan permasalahan perempuan lainnya. Berdasarkan tema serta teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian ini memiliki perspektif feminis.

Penelitian ini menggunakan perspektif feminis karena penelitian ini berusaha untuk mengangkat pengalaman dan pengetahuan perempuan dalam kehidupannya bermasyarakat, yang mencakup pula hubungan gender di dalamnya. (Sarwono, 2004: 70)

Tujuan penelitian yang feminis menurut Amal (Sarwono, 2004: 70) adalah agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak saja mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan praktis gender, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan strategis gender.

Menurut (Littlejohn dan Foss, 2008: 306), studi media feminis telah menjadi penelitian yang kuat dalam studi budaya.

*Most recently, feminist media studies have been interested in how audiences actually mold, or negotiate, the meanings of media messages (meaning-negotiation studies). With these shifts, perspectives on gender have changed as well.* (Littlejohn and Foss, 2008: 306)

Adapun ciri dari penelitian berperspektif feminis (Sarwono, 2004: 70-71) adalah *bukan* penelitian *tentang* perempuan, tetapi penelitian *untuk* perempuan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengubah kehidupan perempuan menjadi lebih baik sehingga kesenjangan hubungan antar gender yang merugikan perempuan dapat dimarjinalkan.

Ciri yang terakhir adalah bahwa ketika melakukan wawancara mendalam, peneliti harus mampu menempatkan diri dalam posisi mereka yang diteliti secara kritis. Ini berarti peneliti harus mampu memberikan empatinya secara kritis kepada kaum perempuan yang sedang diteliti dengan mengesampingkan emosi yang berlebihan yang bisa menjaga hasil penelitian yang obyektif, yaitu mampu membedakan secara pernyataan dan kenyataan yang murni.

Melalui penelitian berperspektif feminis, penulis berharap dapat mengetahui lebih jauh permasalahan komunikasi perempuan terutama politisi perempuan dalam menyuarakan kepentingan perempuan yang mereka wakili di

media massa. Sehingga penulis dapat memberikan rekomendasi terhadap permasalahan tersebut.

### 3.4 Sumber dan Teknik Perolehan Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari berita-berita yang termuat di surat kabar *Kompas* sebagai sumber data primer. Berita-berita tersebut terutama berita yang terkait dengan kasus 'Hukum Pancung TKI Ruyati' yang dikenai tuduhan melakukan pembunuhan atas majikannya di Mekah, Arab Saudi. Berita-berita tersebut diambil dari dimulainya pemberitaan kasus TKI Ruyati 20 Juni 2011 hingga 1 Juli 2011.

Penulis mengkhususkan jenis beritanya yaitu hanya yang berupa *hard news*. Bentuk lain berita seperti pojok, opini, atau pun karikatur tidak dimasukkan oleh penulis sebagai data yang akan dianalisis. Pengkhususan ini dilakukan agar penulis dapat lebih fokus melihat pbingkaian Harian Umum Kompas terhadap teks berita TKI Ruyati tersebut.

Teknik perolehan data yang digunakan yaitu studi pustaka atas teks-teks berita di Harian Umum Kompas. Selain itu, penulis juga menggunakan tesis-tesis terdahulu yang mengungkapkan penelitian terkait dengan pemberitaan politisi perempuan di media massa.

Di samping teks sebagai sumber utama data, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara sebagai data sekunder. Wawancara dilakukan dengan Politisi perempuan yang suaranya muncul dalam pemberitaan Ruyati di *Kompas*. Politisi yang diwawancara adalah Eva Kusuma Sundari (Anggota Komisis III DPR RI) dan Rieke Diah Pitaloka (Anggota Komisis IX DPR RI). Selain politisi perempuan, penulis juga melakukan wawancara dengan wartawan *Kompas* yang menulis teks berita mengenai kasus TKI Ruyati, Windoro Adi.

### 3.4.1 Waktu Penelitian

Waktu yang dipergunakan dalam penelitian kasus hukum pancung TKI Ruyati, dimulai 20 Juni 2011 ketika pertama kali berita Ruyati dimuat di harian umum hingga 1 Juli 2011 dengan adanya keputusan moratorium TKI oleh Pemerintah Indonesia. Dipilihnya kasus TKI Ruyati dikarenakan Ruyati mewakili ribuan TKI yang mengalami tindakan kekerasan padahal devisa yang mereka sumbangkan memberikan pendapatan ekonomi yang besar bagi Indonesia.

### 3.4.2 Pemilihan Media

Penelitian ini menggunakan media cetak nasional sebagai subjek penelitian untuk meneliti kasus TKI Ruyati karena media cetak lebih mudah diperoleh dalam proses penelitiannya. Media cetak yang dipilih adalah Harian Umum *Kompas* karena HU ini mewakili masyarakat secara luas dan memiliki jumlah oplah yang besar. Surat kabar pagi *Kompas* (Sen dan Hill, 2001: 68) adalah harian paling prestisius dan paling laku di Indonesia (lebih dari setengah juta kopi terjual setiap hari pada 1995), dan juga surat kabar 'berkualitas terbesar di Asia Tenggara

Dengan tiras yang begitu besar (Sarwono, 2004: 89), *Kompas* berhasil menjaring banyak iklan. Penghasilannya dari iklan mencapai Rp. 6,8 miliar per bulan. *Kompas* adalah penerima anggaran pemasangan iklan di media pers Indonesia terbesar selama 1982-1986. Secara kurun lima tahun itu, *Kompas* meraup seperempat belanja iklan di surat kabar yang totalnya mencapai Rp. 327 miliar.

Selama ini sikap politik *Kompas* dalam melakukan pemberitaan cenderung bersikap netral dan dekat dengan pemerintahan. Semua sisi dan aspek berita tertentu diberitakan secara adil dalam menunjang harkat manusia. Sementara itu, komitmen yang diemban oleh surat kabar *Kompas* selama ini adalah sebagai surat kabar yang bisa mencerdaskan bangsa supaya lebih maju, berpikir dinamis, terbuka, dan demokratis (dikutip dari tesis Bambang Wijiatmoko, 2010: 39).

Penelitian ini menganalisis tiga judul berita yaitu 'Pemerintah Tak Dapat Hindari Hukuman', '23 TKI Terancam Mati', dan 'Perlu Jeda Penempatan TKI'. Ketiga berita tersebut dipilih dari jumlah keseluruhan 22 berita yang muncul di *Kompas* pada periode 20 Juni 2011 hingga 1 Juli 2011. Ketiga berita ini dipilih karena ketiga berita ini memuat suara politisi perempuan, di mana penulis ingin melakukan analisis suara politisi perempuan.

### 3.5 *Quality Criteria* Penelitian

*Quality criteria* pada penelitian ini menggunakan *historical situatedness*, yaitu sejauh mana penelitian memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi dan politik (Hidayat, 2008: 89). Penelitian ini berusaha untuk memenuhi kriteria tersebut dengan melihat kepada konteks ekonomi Harian Umum *Kompas* dan konteks politik pemerintah terhadap TKI.

Secara ekonomi, *Kompas* memiliki kepentingan untuk menjaga produksi kerjanya dari ancaman dan gangguan yang dapat menggoyang kestabilan dan kelangsungan *Kompas*. Sementara dari sisi politik, *Kompas* lahir dan tumbuh dalam perkembangan politik Indonesia yang mengalami pasang surut dan mengambil posisi cukup netral dalam pemberitaan dengan tidak memiliki basis kecenderungan politik tertentu.

Konteks politik pemerintah yang tidak memaksimalkan perlindungan terhadap TKI juga melatarbelakangi lahirnya berita mengenai TKI Ruyati. Pemerintah tidak melakukan diplomasi politik secara maksimal untuk membebaskan Ruyati dari hukuman mati, padahal hal tersebut pernah dilakukan Presiden Gus Dur ketika membebaskan pembantu rumah tangga Siti Zaenab dari hukuman mati pada tahun 1999.

Ketidakpedulian pemerintah atas nasib TKI ini mempertegas kepentingan pemerintah yang hanya berorientasi pada devisa yang dihasilkan oleh TKI tanpa melakukan usaha perlindungan terhadap TKI. Konteks-konteks inilah yang

diasumsikan digunakan oleh *Kompas* sebagai landasan dalam mengkonstruksi sebuah realita di dalam penulisan berita.

### 3.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan di antaranya adalah bahwa penelitian ini merupakan penelitian terhadap teks maka peneliti tidak dapat mengetahui secara lebih mendalam bagaimana sebenarnya proses pengkonstruksian yang dilakukan *Kompas* terhadap suara politisi perempuan dan bagaimana latar belakang para pekerja dan wartawan di *Kompas*. Selain itu penelitian ini juga tidak melakukan analisa terhadap khalayak sehingga peneliti tidak dapat mengetahui bagaimana pembaca Harian Umum *Kompas* memandang frame *Kompas* terhadap suara politisi perempuan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Profil *Kompas*

*Kompas* merupakan salah satu HU nasional yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. *Kompas* menjadi HU yang memiliki oplah yang tinggi dengan cakupan wilayah yang luas. Tidak hanya populer dikalangan pekerja, pelajar dan mahasiswa juga menggemari harian pagi ini. Bahasa *Kompas* yang mudah dimengerti dan sederhana dianggap sebagai salah satu kelebihan media cetak yang terbit di Jakarta pada 28 Juni 1965 ini.

##### 4.1.1 *Kompas* sebagai Harian Umum Nasional

Pada awalnya menurut Mallarangeng (2010: 50), *Kompas* diterbitkan oleh sejumlah wartawan yang waktu itu telah cukup sukses menerbitkan majalah bulanan *Intisari*; antara lain P.K Ojong dan Jakob Oetama – masing-masing menjadi Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi *Kompas*. Staf redaksi dan wartawan pada awal harian ini terbit, antara lain, Drs J. Adisubrata, Marcel Beding, Threes Susilastuti, Lie Hwat Nio, Th. Purba, dan August Parengkuan.

*Kompas* dilahirkan dalam situasi sejarah ketika “politik menjadi panglima”. Partai politik diakui sebagai satu-satunya organisasi sosial yang boleh menyalurkan aspirasi politik masyarakat. Karena itu setiap harian umum yang terbit pada waktu itu diharuskan untuk mengaitkan dirinya (berafiliasi) dengan salah satu partai politik yang ada. Dalam hal ini *Kompas* memilih berafiliasi dengan Partai Katolik yang waktu itu dipimpin oleh IJ. Kasimo (setelah keharusan untuk berafiliasi ini ditiadakan, *Kompas* melepaskan diri dari Partai Katolik dan menjadi independen) (Mallarangeng, 2010: 51).

Berikut ini data oplah tahun 2007 HU *Kompas* di Indonesia yang dibagi menjadi tiga zona, yaitu (*Kompas Media Kit*, 2007: 5):

1. Zona 1 (Batavia) meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan jumlah oplah yaitu 314.562 eksemplar dengan rata-rata 1 eksemplar *Kompas* dibaca oleh 4 orang.
2. Zona 2 (Jawa) meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur dengan jumlah oplah yaitu 435.470 eksemplar dengan rata-rata 1 eksemplar *Kompas* dibaca oleh 4 orang.
3. Zona 3 (Nusantara) meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dengan jumlah oplah yaitu 500.650 eksemplar dengan rata-rata 1 eksemplar dibaca oleh 4 orang.

Berdasarkan data oplah harian umum *Kompas* di atas, maka tepatlah pemilihan HU *Kompas* ini sebagai sumber data primer dalam penelitian ini dikarenakan harian umum *Kompas* merupakan salah satu harian umum nasional yang beroplah tinggi. Selain itu dapat dilihat juga melalui profil pembaca dari harian umum *Kompas* yaitu (*Kompas Media Kit*, 2007: 1):

1. Jenis kelamin Pria : 72% Wanita: 28%.
2. Usia jumlah terbesar pada usia 30-49 tahun 47%; <15-19 tahun 3%; 35-39 tahun 13%; 20-24 tahun 18%; 40-44 tahun 10%; 25-29 tahun 17%; 45-49 tahun 7%; 30-34 tahun 17%; >=50 tahun 16%.
3. Tingkat pendidikan jumlah terbesar pada pendidikan >= S1: 61,56%; Lulus SD: 0,46%; Sarjana S1: 50,11%; Lulus SLTP : 1,23%; Sarjana S2 : 10,23%; Lulus SLTA : 21,50%; Sarjana S3 : 1,22%; Lulus Akademi (diploma) : 10,50%; Lainnya : 0,11%; Sarjana Muda : 4,65%.
4. Pekerjaan utama jumlah terbesar pada pekerja di sektor swasta 52% Tidak/belum bekerja: 11%; Karyawan/staf swasta: 36%; Ibu RT: 4%; PNS: 12%; Pensiunan/Purnawirawan: 6%; TNI/Polisi: 1%; Masih sekolah: 9%; Lainnya: 1%; Wiraswasta: 16%; Karyawan/staf BUMN: 4%.

Berdasarkan data di atas, maka terlihatlah pola pembaca harian umum *Kompas* yaitu rata-rata mereka adalah laki-laki yang sudah mengenyam bangku pendidikan sarjana, berusia produktif yang berkisar 30-49 tahun, dan bekerja di sektor swasta. Dengan melihat pola pembaca yang ada, maka dapat terlihat bahwa harian umum *Kompas* itu sendiri lebih ke arah budaya patriarki dan melihat kaum kapitalis yang memegang kendali dalam pemberitaan suatu peristiwa.

Penelitian ini pun melihat visi dan misi yang diemban oleh harian umum *Kompas* itu sendiri sehingga pemilihan media ini semakin tepat adanya. Visi

harian umum *Kompas* menurut (*Kompas Media Kit*, 2004: 4) adalah menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat serta menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan. Dengan kiprah *Kompas* dalam industri pers “Visi *Kompas*” berpartisipasi membangun masyarakat Indonesia baru berdasarkan Pancasila melalui prinsip *humanism transcendental* (persatuan dalam perbedaan) dengan menghormati individu dan masyarakat adil dan makmur.

Sedangkan misi harian umum *Kompas* adalah mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara professional, sekaligus memberi arah perubahan (*trendsetter*) dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi terpercaya. Harian umum *Kompas* berperan serta ikut mencerdaskan bangsa, menjadi nomor satu dalam semua usaha di antara usaha-usaha lain yang sejenis dalam kelas yang sama. Hal tersebut dicapai melalui etika usaha bersih dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain (*Kompas Media Kit*, 2004: 4).

#### **4.1.2 *Kompas* sebagai Sebuah Industri**

Di Indonesia (Sen dan Hill, 2001: 80), ideologi akan pers yang kritis namun tidak partisan tak pernah memiliki jenis kekuasaan/ kekuatan yang hegemonik seperti pada demokrasi Barat. Pers Indonesia memiliki basis di belakangnya, bergantung kepada ke mana arah pemilik media berpihak. Ideologi yang bebas murni dari keberpihakan hampir nihil.

Gagasan tentang sebuah Pilar ke empat yang non-partisan tak pernah sepenuhnya ada di Indonesia. Pada peralihan abad, dengan munculnya nasionalisme, Koran yang kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda segera menjadi pers perjuangan, yaitu sekumpulan pers dengan komitmen partisan untuk meraih kemerdekaan. Selama tahun-tahun pertama kemerdekaan, pers disebut Soekarno ‘alat Revolusi’, bertanggungjawab untuk menyemangati dan memobilisasi opini publik. Berbagai partai politik menjadi sponsor media

tersebut. Dalam transisi politik memasuki Orba, pers dituntut menjadi penjaga ideologi 'Pancasila' yang 'bebas dan bertanggungjawab' (Sen dan Hill, 2001: 63)

Semua perusahaan pers yang bertahan di masa pelarangan anti-kiri adalah perusahaan kecil yang sekedar bertahan hidup. Pelarangan, krisis ekonomi, dan kekacauan politik, dapat memangkas penjualan Koran dan majalah hingga separuhnya antara 1965 dan 1967. Koran-koran yang bertahan dengan secara eksplisit mempromosikan rezim Orba, mulai menerjemahkan dukungan mereka ke modal. Mereka melobi pemerintah untuk memasukkan pers ke dalam UU Penanaman Modal Dalam Negeri Juli 1968. Pers tengah direkonstruksi secara resmi dari alat ideologi bagi kelompok politik, ke industri yang memproduksi barang kebutuhan pasar.

Pada 1972 (Sen dan Hill, 2001: 67), harian umum terkemuka, *Kompas*, meminjam 75% dari modal yang diperlukan untuk membangun sebuah kantor percetakan baru, yang memungkinkan mereka mempersingkat waktu produksi. Hingga pertengahan 1970-an, angka sirkulasi kembali ke level pra 1965 dan terus meningkat menuju tahun 1990-an. Kecenderungan ke arah komersilisasi semakin meningkat di Koran-koran yang berhasil bertahan dari pelarangan tahun 1974.

Koran ini didirikan pada 1965 oleh para wartawan Cina dan Jawa atas inisiatif Partai Katolik, namun hubungan dengan partai telah dihapuskan pada 1971, menjelang restrukturisasi partai-partai politik pada 1973. Dari sirkulasi awalnya 5.000 copy, angka penjualan meningkat secara konsisten karena *Kompas* memiliki reputasi kedalaman analistis dan gaya penulisan yang rapi. Menganggap gaya tulisannya sebagai '*determined boringness*' (gaya yang membosankan tapi tegas), Ben Anderson (Sen dan Hill, 2001: 68) menggambarkan *Kompas* sebagai 'harian umum Orba yang sempurna'.

Peningkatan penjualan *Kompas* memperlihatkan peningkatan pasar pembacanya. Media dalam produksinya memiliki target pasar, hal ini seperti yang dijelaskan oleh McQuails,

*In general, markets can be defined according to place, people, type of revenue and the nature of the product or service. A more fundamental line of economic division in the media business is between the consumer market for media products and services and the advertising market, in which a service is sold to advertisers in the form of access to the audience. (McQuails, 2005: 222)*

Pengiklan sebagai pembeli dalam pasar media memiliki peluang menemukan target konsumennya yaitu pembaca media tersebut. Sehingga penerapan ini menjadikan media sebagai pelaku dalam pasar yang memiliki kepentingan 'barang' produksinya dibeli oleh konsumen.

*Kompas* berhasil lolos dari pelarangan besar-besaran yang terjadi pada 1970-an, dengan menerapkan nilai kehati-hatian dan *self-censorship* dalam isu-isu politik yang sensitive, meskipun dengan kesadaran yang semakin meninggi akan kerapuhannya. *Kompas* merespon kerapuhan itu dengan strategi diversifikasi dan reinvestasi besar-besaran sepanjang tahun 1980-an. Pada awal 1990-an *Kompas* memiliki kerajaan bisnis yang terdiri dari 38 perusahaan, secara bersama-sama dikenal sebagai Kompas-Gramedia Group. Kelompok ini tak hanya terdiri dari berbagai penerbit buku Gramedia dan percetakannya, tetapi juga sebuah stasiun radio, perusahaan perjalanan/ wisata, hotel, mesin alat berat, supermarket, asuransi, bank, industri periklanan, tambak udang, mebel rotan, perusahaan perfilman, pabrik tisu, warung telekomunikasi, lembaga pendidikan bahasa Inggris, lembaga pendidikan computer dan banyak lagi. (Sen dan Hill, 2001: 69)

Meningkatnya oplah *Kompas* selama lebih daripada dua dekade itu adalah membesarnya perusahaan. Akibat lainnya (Mallarangeng, 2010: 57) adalah membengkaknya modal perusahaan. Dengan modal yang besari ini *Kompas* melakukan ekspansi bisnis, baik dengan menerbitkan, membeli, atau pun bekerja sama dengan perusahaan pers lain, serta memasuki kawasan-kawasan bisnis nonpers.

Melalui berbagai buku, majalah, dan harian umum, Kompas-Gramedia mendominasi industri penerbitan (Siar dalam Sen dan Hill, 2001: 69). Tercatat *Kompas* telah memasuki sedikitnya enam jenis usaha yang berbeda (pers, penerbitan buku, percetakan, pasar swalayan, bank, dan tambak udang). Khusus

bagi usaha pers, media yang telah berhasil dikembangkan adalah: *Intisari* (majalah bulanan), *Bola* (majalah olahraga mingguan), *Jakarta-Jakarta* (majalah berita mingguan), *Bobo* (majalah bulanan anak-anak), *Hai* majalah mingguan remaja), *Senang* (majalah hiburan), *Nova* (majalah wanita), *Monitor* (tabloid mingguan). (Mallarangeng, 2010: 58)

Jika melihat ekspansi besar-besaran yang dilakukan *Kompas* untuk memperluas cakupan bisnisnya tersebut, maka tak dapat dipungiri *Kompas* telah mengambil masa monopoli dalam percetakan dan penerbitan. Menurut Litman,

*When discussing the newspaper industry, the term monopoly is used to describe situations in which there is only one paper published in the market or in which joint monopolies exist. The term competition is often incorrectly applied to situations in which more than one paper exist, because situations in which two papers exist are not competitive in the economic sense but are more correctly labeled duopolies. In situations in which two or more papers exist, the papers often exhibit characteristics of oligopoly and monopolistic competition rather than competition in the economic sense. (Owers dkk, 1988: 114)*

*Kompas* telah menjadi konglomerat informasi. Hampir seluruh bidang kategori informasi dikuasai dan dimiliki *Kompas*, yang artinya arus informasi pun tidak dapat lagi secara bebas dan netral namun telah mengalami unsur-unsur ekonomi dari perkembangan *Kompas* sebagai sebuah industri.

Argumentasi *Kompas* atas perilaku ekspansif seperti ini diberikan oleh Jakob Oetama (1987: 40):

Surplus modal yang terjadi untuk apa? Dibagi habis untuk karyawan kiranya tidaklah bijaksana. Jika setelah reinvestasi masih ada sisanya, surplus itu sesuai dengan prinsip hak milik berfungsi sosial, perlu dibuat produktif. Membuat produktif modal sesuai dengan prinsip hak milik berfungsi sosial adalah menanamkan modal tersebut dalam usaha-usaha.

Faktor lain yang melatarbelakangi perilaku ekspansif seperti itu tidak hanya bersifat ekonomi tapi juga politik (Mallarangeng, 2010: 59). “Kita tidak punya kepastian hukum. Kita sangat labil dari segi politik, kata P. Swantoro, Wakil Pimpinan Umum *Kompas*.”

Persoalan perluasan perusahaan *Kompas*, baik dengan menerbitkan jenis pers yang baru atau pun melakukan berbagai bisnis nonpers, pertama-tama haruslah dipahami sebagai dinamika inheren dalam sistem kapitalisme – modal senantiasa bersifat ekspansif. Bagaimanapun ideal motivasi yang mendasarinya, *Kompas* tetaplah suatu industri yang melandaskan hidupnya pada sistem ini.

Banyak kritik dan peringatan telah dilontarkan oleh pengamat dan intelektual terhadap perilaku *Kompas* yang ekspansif tersebut. Pada pokoknya kritik tersebut ingin mengatakan bahwa *Kompas* telah mengaburkan batas antara idealism dan komersialisme. Kepentingan-kepentingan ekonomi *Kompas* telah demikian besar sehingga sangat rentan terhadap intervensi pemerintah di satu pihak, dan di pihak lain akan membuatnya senantiasa menjaga hubungan baik dengan pemerintah; padahal sebagai lembaga pers, *Kompas* harus menjaga jarak agar dapat terus mengawasi dan mengkritik pemerintah. (Mallarangeng, 2010: 60)

Jakob Oetama (Prisma, No. 6, 1988):

...dalam perekonomian ada otodinamikanya sendiri yang bisa membawa kita hanyut. Bisa juga membuat kita melakukan kompromi yang agak terlalu jauh..

...bisnis apa pun punya tali temali dengan birokrasi. Tanpa sadar kita bisa melakukan kompromi demi bisnis.

[karena itu]...kita harus sadar, ...kita bersedia untuk diingatkan...namun yang penting bagaimana kita sanggup membangun komitmen dan visi kita. ...itulah... jatidiri kita.

Agenda reformasi yang menyebar ke seluruh masyarakat kelas menengah berpendidikan di tahun-tahun menjelang mundurnya Soeharto pada Mei 1998 secara tegas memasukkan tuntutan akan kebebasan pers yang lebih besar. Wartawan, bagian dari profesional kelas menengah, menyokong aspirasi tersebut. Namun lebih dari itu, di pasar baru yang kompetitif, Koran-koran harus tetap relevan bagi pembaca kelas menengah yang semakin anti-pemerintah. Dalam dekade dimana televisi komersial merupakan bentuk hiburan terbesar dan internet tampak sebagai benteng pertukaran informasi yang bebas, pers memerlukan setidaknya munculnya kebebasan dari pemerintah yang semakin tidak populer untuk memelihara statusnya sebagai penjual berita utama. Wacana pers bebas

tertanam dalam ekonomi politik Orba di masa akhirnya. Setelah memotong hubungan kepartaian dengan pers, membangkitkan konglomerasi pers, membuka bangsa dengan teknologi satelit dan komunikasi digital, Orba mungkin, tanpa disadari, meninggalkan ideologi yang jauh lebih kuat berakar atas Pilar ke Empat dan para martir Indonesia yang pertama bagi kebebasan pers. (Sen dan Hill, 2001: 84)

Harian umum *Kompas* menurut Solomon (Sen dan Hill, 2001: 69), secara teratur menerima bagian yang lebih besar (lebih dari seperempat) dari pendapatan iklan harian umum nasional. Pada tahun 1997, kelompok ini memiliki 9 harian umum, 5 tabloid, dan 14 majalah. Kompas-Gramedia menunjukkan keinginannya untuk terus beroperasi di bawah sejumlah hambatan terhadap isi berita yang ditetapkan oleh pemerintah Orba, sambil mengambil keuntungan penuh atas kebijaksanaan pemerintah mendukung perusahaan besar sejak pertengahan 1970-an. Kekuatan ekonominya, yang berkembang di era Orba, telah diatur untuk bertahan terhadap rezim politik tersebut.

Harian umum pagi *Kompas* adalah harian paling prestisius dan paling laku di Indonesia (lebih dari setengah juta kopiterjual setiap hari pada 1995), dan juga harian umum 'berkualitas terbesar di Asia Tenggara. (Sen dan Hill, 2001: 68) Perbaikan mutu informasi *Kompas* diungkapkan oleh R. Fadji (1988) (dalam Mallarangeng, 2010: 56) yang menemukan bahwa tingkat kredibilitas informasi yang disajikan oleh *Kompas* cukup tinggi di kalangan mahasiswa Fisipol UGM. Kredibilitas yang baik di kalangan mahasiswa ini sangat penting untuk melihat persepsi pembaca, sebab mahasiswa masuk ke dalam salah satu golongan sosial (yaitu golongan berpendidikan menengah ke atas) yang menjadi sasaran utama harian *Kompas*.

Herb Feith (Mallarangeng, 2010: 57) bahkan mengatakan bahwa *Kompas*, bersama majalah *Tempo*, adalah media yang tetap paling penting yang mengartikulasikan kepentingan-kepentingan pembaruan di Indonesia (*Inside Indonesia, April 1989*).

#### 4.2 TKI, Kekerasan dan Perekonomian Indonesia

Jumlah penduduk Indonesia yang berkisar 200 ribu jiwa memberikan tempat keempat sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Populasi yang besar berimbas pada kebutuhan tempat tinggal dan tentunya kebutuhan ekonomi. Sayangnya, jumlah tersebut didominasi oleh masyarakat ekonomi rendah yang tidak memiliki pendidikan dan keahlian. Dapat dibayangkan dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan himpitan harga yang tinggi serta keahlian yang minim, akan mendesak setiap warga negara Indonesia memutar otaknya mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Ketidakterediaan lapangan pekerjaan yang memadai di negaranya sendirilah yang membawa warga negara Indonesia melirik negara lain sebagai tempat mereka mengais rezeki. Dengan keahlian yang minim dan pendidikan rendah, sebagian besar dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut mencari pekerjaan di bidang domestik atau menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Kebutuhan negara-negara tetangga atas sumber daya manusia seakan gayung bersambut dengan kebutuhan lahan pekerjaan yang ada. Sebagian besar TKI memilih negara dengan basis Islam sebagai tempat tujuan mereka seperti Malaysia dan Arab Saudi. Data dari *Kompas* menunjukkan jumlah yang signifikan atas kedua negara, per tahun 2010 jumlah TKI ke Malaysia berjumlah 116.056 sementara ke Arab Saudi sebesar 228.890. Jumlah di kedua negara tersebut lebih besar dibandingkan dengan negara tujuan lainnya seperti Taiwan, Singapura, Hongkong, Korea, UEA, Qatar dan Oman (28/6/2011).

TKI yang berangkat ke luar negeri sebagai PRT didominasi oleh kaum perempuan yang merasa memiliki keterampilan dalam mengurus pekerjaan rumah, apalagi mereka tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk mencari pekerjaan lain. Alasan ekonomi yang paling kuat melandasi kepergian perempuan-perempuan ini menjadi TKI. Mereka ingin membantu suami-suami mereka untuk mencari nafkah. Mereka ingin menyekolahkan anak-anak mereka yang terhambat biaya pendidikan yang serba mahal. Mereka memiliki mimpi dan cita-cita yang besar terhadap kesejahteraan hidup mereka dan keluarga mereka

setelah bekerja menjadi TKI. Meski taruhannya adalah jauh dari anak-anak dan keluarga yang mereka cintai.

Fenomena TKI dan ketangguhan perempuan-perempuan Indonesia untuk merantau di negara lain demi gaji yang berkisar 1,5 juta hingga dua juta perbulan ini ternyata tidak hanya berpotensi meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka sendiri di kampung, namun turut pula memberikan respon positif bagi perekonomian nasional Indonesia karena devisa yang dihasilkan oleh para TKI ini menjadi sumber pendapatan yang besar bagi negara. Sumbangan yang besar atas devisa negara tersebutlah yang kemudian melekatkan TKI sebagai pahlawan devisa negara.

Sayangnya, meskipun TKI merupakan pahlawan devisa negara, nasib para TKI di luar negeri jauh dari kata aman apalagi sejahtera. Permasalahan yang timbul dari para TKI ini menyangkut masalah kekerasan yang mereka alami ketika mereka bekerja di luar negeri. Harian Umum *Kompas* dalam artikelnya 'Perlindungan Harus Optimal' (21/6/2011), menyajikan sekitar 19.023 TKI mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak, 11.141 TKI mengalami sakit akibat kerja, 3.835 TKI mengalami penganiayaan, 2.548 TKI tidak dibayarkan gajinya, 2.500 TKI mengalami pelecehan seksual oleh majikannya dan banyak lagi permasalahan lainnya yang dialami para TKI.

Ironisnya, meski sebagian besar dari TKI mengalami kekerasan dan penganiayaan selama bekerja di luar negeri, mereka tetap mau kembali lagi menjadi TKI karena iming-iming uang yang dapat mereka dapatkan setelah mereka bekerja. Padahal jika dibandingkan uang yang mereka dapatkan dengan kerusakan fisik dan psikologi yang mereka alami setelah mendapatkan penganiayaan tidaklah sebanding.

#### **4.2.1 Kasus “Hukum Pancung TKI Ruyati”**

Ruyati binti Satubino yang berusia 54 tahun mendapatkan hukuman pancung pada tanggal 18 Juni 2011 setelah pengadilan menjatuhinya eksekusi

mati karena dia telah membunuh majikannya. Kasus Ruyati menjadi berita yang besar karena eksekusinya tidak diketahui oleh pemerintah dalam hal ini Kemenlu dan tanpa pendampingan dari keluarganya. Kasus Ruyati juga menjadi tamparan bagi Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, karena tepat empat hari sebelumnya Presiden SBY justru berpidato mengenai perlindungan buruh migrant dalam Konferensi ke-100 Perburuhan Internasional ILO di Genewa, Swiss.

Ruyati sendiri mengakui atas pembunuhan yang dilakukannya. Ruyati menyatakan, pembunuhan tersebut dilakukan karena dia sudah tidak tahan lagi atas siksaan yang kerap dideritanya dari majikannya. Berita hukuman pancung terhadap Ruyati menggebrak tanah air, karena kembali membuka persoalan yang tidak pernah mendapat perhatian dan solusi dari pemerintah selama ini. Ruyati hanya satu dari banyak TKI yang mengalami hukuman. Ruyati juga hanya satu dari ribuan TKI yang mengalami kekerasan dari majikannya saat bekerja. Padahal, perlindungan terhadap segenap warga negara merupakan tanggung jawab pemerintah dan negara. Apalagi perlindungan kepada TKI yang jelas-jelas menjadi penyumbang devisa yang besar bagi perekonomian negara.

Pemberitaan Ruyati baru diangkat ke permukaan pada tanggal 20 Juni 2011 hingga 1 Juli 2011. Ruyati menjadi perhatian media dan masyarakat dan mendapat porsi perbincangan yang besar karena kasus Ruyati ini tidak hanya menjadi permasalahan besar kurangnya komunikasi pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait dengan urusan TKI, namun juga memperlihatkan bahwa ada ketidakberdayaan pemerintah dalam melindungi warganya. Padahal ada banyak cara untuk memberikan usaha perlindungan, sekalipun dengan diplomasi maksimal langsung ke Arab Saudi untuk menjalin kesepakatan bersama.

Ruyati menjadi gambaran yang menyedihkan akan nasib perempuan Indonesia yang berangkat menuju kematiannya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Perempuan-perempuan Indonesia kerap menjadi korban dari sistem pasar dan perlakuan yang tidak adil dari hukum. Hadirnya perempuan-perempuan sebagai TKI tidak begitu saja, mereka dicari hingga ke desa oleh agen-agen yang akan mendapatkan bonus per tiap kepala. Mereka diiming-imingi uang yang besar

dan kesejahteraan yang baik. Dalam proses mereka menuju rumah penampungan, perempuan-perempuan Indonesia ini di minta membayar uang. Setelah mereka sampai di negara tujuan, mereka juga dimintai uang kembali oleh agen di sana. Begitu pula setelah mereka pulang kembali ke tanah air, mereka kembali dimintai uang oleh petugas-petugas imigrasi dan lain-lain. Pungutan-pungutan liar atas TKI ini tidak terpantau namun terjadi. Meskipun begitu, ketegaran perempuan-perempuan ini tetap membawa mereka bekerja sebagai TKI.

Ruyati tercatat telah berangkat tiga kali sebagai TKI. Ruyati sebelumnya pernah berangkat ke Arab Saudi pada kurun waktu 1998-2003 dan 2004-2008. Ketika itu, dengan bekerja sebagai pekerja rumah tangga, Ruyati berhasil menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Dia berhasil menyekolahkan anak-anaknya dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Meskipun Ruyati sendiri belum memenuhi kebutuhannya sendiri. Perlu tiga hingga empat kali pulang-pergi menjadi TKI untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadi TKI itu sendiri.

Kasus Ruyati menjadi mengemuka karena Ruyati menggerakkan elemen bangsa untuk mendesak pemerintah melakukan moratorium pengiriman TKI ke Malaysia dan Arab Saudi, dua negara yang dianggap memiliki permasalahan TKI yang besar. Ruyati juga telah menyelamatkan Darsem, TKI lainnya yang berasal dari Jawa Timur yang juga terancam hukuman mati. Akibat kasus Ruyati, Darsem mendapat perhatian dan terbebas dari hukuman mati dengan tebusan sebesar 4,7 Miliar yang dikeluarkan pemerintah Jawa Timur dan sumbangan masyarakat lainnya.

Ruyati menjadi marcusuar diantara kerumitan dan ketidakteraturan proses pengiriman TKI, penempatan TKI hingga perlindungan TKI. Ruyati dan TKI lainnya adalah perwakilan wajah Indonesia, perwakilan wajah bangsa. Mereka adalah hoga diri bangsa yang harus diselamatkan dan dilindungi. Sehingga semestinya pemerintah selaku pemangku kekuasaan benar-benar bertindak tegas dan maksimal dalam melindungi warga negaranya, termasuk TKI.

#### 4.2.2 Miliaran pertahun yang disumbangkan TKI

Persoalan TKI yang membelitnya memang bukan tanpa keuntungan yang masuk ke kantong negara. Berdasarkan informasi dari Ketua Pergantian Antar Waktu (PAW) Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Adi Putra Tahir, TKI merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas sebesar US\$ 6,617 miliar pada tahun 2009 melalui pengiriman remitansi ke Indonesia. Jumlah sebesar itu semestinya menempatkan TKI di posisi terhormat yang menjadi prioritas untuk dilindungi dari segala kemungkinan terburuk yang akan mereka alami.

Menurut data yang ada di *Kompas* (21/6/2011), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperoleh penerimaan negara bukan pajak rata-rata Rp. 750 miliar per tahun, di mana senilai 500 miliar berasal dari dana perlindungan TKI. Oleh sebab itu pemerintah seharusnya melakukan perlindungan yang optimal terhadap TKI yang sedang tersangkut masalah hukum ataupun mengalami kekerasan dari majikan mereka di tempat mereka bekerja. Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo menyatakan, telah tersedia dana Rp. 95 miliar untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri (23/6/2011).

Jumlah dana perlindungan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajar adanya mengingat jumlah penambahan pendapatan negara melalui devisa yang telah diberikan TKI juga tidak kecil jumlahnya. Apalagi dengan dana perlindungan yang memang sudah dianggarkan tersebut, tidak hanya akan memberikan rasa aman dan perlindungan kepada TKI namun juga dapat meningkatkan produksi kerja TKI sehingga justru akan menambah pundi-pundi kembali ke kas negara.

Pemerintah sendiri sebenarnya juga mengalami hubungan simbiosis mutualisme dengan keberadaan TKI yang bekerja di luar negeri. Terutama untuk sektor domestik yang jumlahnya mendominasi. Apalagi pemerintah juga belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang mencukupi dan memadai untuk menampung sumber daya manusia berusia produktif yang tidak sedikit. Ditambah pula dengan kurangnya pemberian pendidikan keahlian dan loka karya bagi

penduduk produktif sehingga mereka tidak hanya dapat bergantung pada sektor domestik melulu.

Peningkatan mutu dan kualitas manusia Indonesia semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana negara dan memutar keuntungan negara untuk dikembalikan sebesar-besarnya kepada kemakmuran rakyatnya. Jika setiap keuntungan yang diberikan TKI dipergunakan pemerintah untuk modal membuka lapangan pekerjaan dan mendukung usaha kecil menengah serta menyuntik modal bagi wirausaha muda baru, perekonomian tidak mesti bergantung pada devisa yang diberikan oleh TKI. Sehingga pada akhirnya pengiriman TKI dapat diminimalisir atau bahkan dihentikan selamanya.

Lapangan pekerjaan dengan upah yang layak masih menjadi persoalan yang belum bisa dipecahkan pemerintah. Masalah ini berhadapan dengan naluri dasar sektor swasta yang masih bergumul pada keuntungan yang besar dan pengeluaran perusahaan yang seminim mungkin. Membuka lapangan pekerjaan baru dan menggerakkan kewirausahaan tidak hanya mengurangi resiko terjadinya tindakan pelanggaran hukum dan kekerasan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, namun juga memberdayakan masyarakat dan mengembangkan kemampuan serta kualitas pribadi dan kehidupan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang mandiri dan kreatif.

#### **4.3 Berita Kasus “Hukum Pancung TKI Ruyati” di *Kompas***

Pemberitaan mengenai kasus hukuman pancung TKI Ruyati yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi pada tanggal 18 Juni 2011 tidak terlalu banyak. Dari pencarian berita yang dilakukan penulis selama penelitian, didapatkan sekitar 22 berita (*hard news*) dan 16 artikel (*soft news*) yang terkait dengan kasus eksekusi mati Ruyati selama periode masa pemberitaan TKI Ruyati, yang dimulai pada tanggal 20 Juni 2011 hingga pemberitaannya mulai hilang pada tanggal 1 Juli 2011.

Pemilihan kasus TKI Ruyati ini dikarenakan eksekusi hukum pancung yang dilakukan pemerintah Arab Saudi kepada Ruyati hampir tidak terdeteksi oleh pemerintah Indonesia. Kasus ini juga menjadi momen penting pada tahun 2011 karena setelah hukum pancung Ruyati, pemerintah didesak mengeluarkan kebijakan moratorium TKI ke Arab Saudi dan Malaysia. Selain itu juga karena besarnya kasus Ruyati, maka dibentuklah Satgas (satuan tugas) khusus yang menangani permasalahan TKI yang diketuai oleh Humphrey Djemat. Oleh sebab faktor-faktor itulah, pemilihan kasus TKI Ruyati untuk melihat bagaimana suara politisi perempuan memperjuangkan kepentingan perempuan yang mereka wakili, dipilih oleh penulis.

Dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan pada teks berita (*hard news*) saja. Dari jumlah 22 berita *hard news* yang terdapat di HU *Kompas*, penulis menemukan tiga berita yang memuat suara politisi perempuan. Ketiga berita tersebut terkait dengan kasus TKI Ruyati. Ketiga berita inilah yang akan dianalisis oleh penulis untuk melihat bingkai yang terdapat di dalamnya, dan bagaimana politisi perempuan digambarkan dalam bingkai pemberitaan tersebut.

Berikut di bawah ini adalah daftar ketiga berita yang berisi suara politisi perempuan:

| <b>NO</b> | <b>Judul Teks Berita</b>                  | <b>Halaman</b> | <b>Hari dan Tanggal Terbit</b> |
|-----------|---|----------------|--------------------------------|
| 1         | Pemerintah Tak Dapat Hindari Hukuman Mati | 1              | Senin, 20 Juni 2011            |
| 2         | 23 TKI Terancam Mati                      | 17             | Senin, 20 Juni 2011            |
| 3         | Perlu Jeda Penempatan TKI                 | 15             | Rabu, 22 Juni 2011             |

**Tabel 4.3 Judul Teks Berita yang Memuat Suara Politisi Perempuan**

#### **4.4 Analisis *Framing* Robert N. Entman Berita Kasus “Hukum Pancung TKI Ruyati”**

Penelitian yang dilakukan penulis hanya berfokus pada suara politisi perempuan di dalam pemberitaan kasus ‘Hukum Pancung TKI Ruyati’. Hal ini dikarenakan penulis berorientasi ingin mengetahui keterwakilan suara politisi perempuan setelah mereka berada di parlemen, apakah cukup vokal ataukah justru melemah.

Suara politisi perempuan tidak hanya memperlihatkan upaya-upaya perempuan sebagai politisi menyuarakan aspirasi kepentingan kaum perempuan dengan segala permasalahan mereka, namun juga dapat menjadi tolak ukur untuk menilai seberapa jauh kepedulian dan kesamaan tujuan antara politisi perempuan dan kaum perempuan dalam mencapai cita-cita kesetaraan dan keadilan di dalam kehidupan perekonomian dan hukum.

Sebagai perwakilan dari kaum perempuan Indonesia, tentunya politisi perempuan yang telah duduk di kursi strategis sebagai pemangku kebijakan, telah melalui proses panjang hingga tiga kali seleksi. Pertama, seleksi oleh diri sendiri, kemudian seleksi oleh partai politik dan terakhir seleksi oleh masyarakat sebagai pemilih. Proses ini seharusnya mampu memberikan pembelajaran dan meningkatkan mutu serta kualitas politisi perempuan untuk menatap ke masa depan dan mengambil bagian dari tugas sebagai perempuan demi memperjuangkan hak-hak dan kepentingan penyelesaian persoalan bagi permasalahan kaum perempuan.

Pencarian solusi yang matang atas persoalan yang berada di sekitar kaum perempuan menjadi oase harapan dari kaum perempuan kepada para politisi perempuan yang mewakili mereka berada di DPR RI. Politisi perempuan memiliki keleluasaan dan pengaruh yang dapat ikut mengarahkan dan menghasilkan kebijakan-kebijakan hukum yang lebih ramah perempuan dan mendukung pembaruan sistem yang tidak lagi bias gender dan mengandung ketidakadilan terhadap perempuan Indonesia.

Pada pemberitaan yang berjumlah 22 berita, penulis menemukan ada dua politisi perempuan yang muncul di dalam pemberitaan terkait kasus TKI Ruyati. Hal ini sangat ironis dikarenakan, berita lainnya justru didominasi oleh suara laki-laki. Kedua politisi perempuan tersebut berada pada tiga berita, sehingga penulis akan melakukan analisis framing terhadap ketiga berita untuk melihat apakah terdapat framing tertentu dalam penulisan pemberitaan oleh *Kompas*. Analisis framing yang digunakan adalah Robert N. Entman.

#### **4.4.1 Teks Berita 1: Pemerintah Tak Dapat Hindari Hukuman**

Harian Umum *Kompas* menurunkan laporan mengenai TKI Ruyati ini pertama kali pada tanggal 20 Juni 2011. Berita dengan judul “Pemerintah Tak Dapat Hindari Hukuman” ditempatkan di halaman 1 namun dengan kolom yang tidak cukup besar.

##### ***Problem Identification***

Harian Umum *Kompas* mengidentifikasi berita pertama-tama dengan informasi kematian seorang warga negara Indonesia yang bekerja sebagai TKI, Ruyati binti Satubino, yang telah dieksekusi mati pada tanggal 18 Juni 2011. Ruyati diberi hukuman pancung karena membunuh majikannya, Khoiriyah Omar Moh Omar Hilwani, di Mekkah pada 12 Januari 2010 setelah bertengkar karena keinginannya untuk pulang tidak dikabulkan oleh majikan.

*Kompas* memperlihatkan posisinya yang menuding pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas eksekusi mati Ruyati yang tanpa diketahui sebelumnya dan tanpa adanya pendampingan. Hal ini terlihat dari kalimat-kalimat yang dimulai *Kompas* dalam berita ini yang langsung mengambil kesimpulan dan memberikan tuduhan kepada pihak pemerintah sebagai lembaga negara yang berfungsi mengurus negara dan rakyatnya.

Meskipun *Kompas* melakukan penyerangan kasus TKI Ruyati atas kesalahan pemerintah, namun pemilihan kata yang “sopan” masih terlihat dengan

ada unsur netralitas seperti kalimat “tidak dapat menghindari” dan bukan “tidak mampu menghindari”, sehingga seakan-akan peristiwa eksekusi mati TKI Ruyati tersebut adalah ketidaksengajaan yang tak terhindarkan oleh pemerintah.

Namun, meski *Kompas* memulainya dengan dugaan yang tidak terlalu menyudutkan, *Kompas* masih menghubungkan peristiwa eksekusi mati TKI Ruyati yang tak diduga tersebut, dengan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai perlindungan terhadap buruh migrant di Konferensi Perburuhan Internasional di Genewa, Swiss.

Jatuhnya hukuman mati yang mengejutkan itu hanya berselang empat hari setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato di Konferensi Ke-100 Perburuhan Internasional Organisasi Buruh Internasional (ILO) di Genewa, Swiss. (20/6/2011)

### ***Causal Interpretation***

Dalam pemberitaan *Kompas* ini, pemerintah diposisikan sebagai pelaku (aktor), sebagai penyebab masalah. Pada berita ini, letak dan awal masalah bukan pada TKI Ruyati yang melakukan pembunuhan, melainkan pada pemerintah yang tidak dapat mencegah eksekusi mati terhadap Ruyati karena kurang koordinasi. Hal ini dipertajam dengan pernyataan dari Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka,

Peristiwa ini semakin membuka kelemahan koordinasi internal pemerintah dan diplomasi internasional.

Penempatan pemerintah sebagai penyebab masalah mengakibatkan berita ini secara keseluruhan mendelegitimasi pemerintah terutama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) karena kecolongan berita eksekusi Ruyati ini. Keteledoran Kemenlu tersebut tertuang dalam kalimat Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di bawah ini,

“Kami sangat terkejut begitu mendengar eksekusi telah dilakukan”

Pemerintah sebagai penyebab masalah, yang dianggap tidak dapat melindungi Ruyati dari hukuman mati, diperkuat dengan menghubungkan terjadinya peristiwa eksekusi mati Ruyati tersebut dengan pidato Presiden SBY dalam Konferensi Perburuhan Internasional yang disebut hanya berselang empat hari. Tudingan terhadap pemerintah sebagai aktor dalam *frame* berita ini juga didukung oleh pernyataan aktivis buruh. Anis Hidayah sebagai Direktur Eksekutif Migrant Care yang menyatakan pada paragraf awal, bahwa eksekusi mati Ruyati, menunjukkan pidato Presiden belum sesuai realitas.

Meskipun demikian *Kompas* tetap menyertakan konfirmasi dari pihak pemerintah. Seperti misalnya pernyataan Jumhur Hidayat yang meminta publik tidak mengaitkan kematian Ruyati dengan pidato Presiden dalam Konferensi Perburuhan Internasional.

“Itu urusan pidana, bukan perselisihan buruh.”

### ***Moral Evaluation***

Berita pertama mengenai kasus eksekusi mati TKI Ruyati ini memberikan penilaian bahwa Ruyati hanya sebagai orang bawah (rendah) yang melakukan pembunuhan kepada majikannya karena dorongan amarah akibat tidak diperbolehkan pulang oleh majikannya di Arab Saudi.

Melalui kisah yang diceritakan anak Ruyati, Een Nuraini, Ruyati mendapat *frame* sebagai orang tertindas karena hak pembayaran gaji Ruyati sebagai Pekerja Rumah Tangga belum dilunasi oleh majikannya.

Tanggal 31 Desember 2010 ibunya menghubungi lewat telepon mengeluh, setelah bekerja setahun empat bulan, ia baru mendapatkan sembilan bulan gaji. Tujuh bulan gajinya belum dibayar. Setiap bulan Ruyati menerima gaji 800 real (Rp. 1.829.235).

Selain gaji yang belum dibayarkan oleh majikannya, Ruyati juga ternyata pernah mendapatkan tindakan kekerasan sebagai buruh ketika bekerja pada majikannya yang akhirnya dia bunuh tersebut.

Ibunya juga pernah bercerita, kakinya patah karena didorong dan jatuh dari lantai dua oleh majikan perempuan.

*Kompas* menuturkan cerita kisah sedih ini diakhir paragraf dalam teks beritanya, seakan ingin menarik kesimpulan penyebab atau faktor yang mendorong Ruyati melakukan pembunuhan kepada majikannya di Arab Saudi. Sehingga pembaca dapat melihat adanya ketidakadilan atas Ruyati selama ia bekerja sebagai PRT.

### ***Treatment Recommendation***

Pada berita ini, *Kompas* memberikan rekomendasi penyelesaian kasus eksekusi mati TKI Ruyati yang didakwa membunuh majikannya, dengan mengajukan nota protes secara resmi terhadap pemerintah Arab Saudi.

Apalagi, eksekusi yang diterima Ruyati ternyata tidak diberitahukan sebelumnya kepada perwakilan Pemerintah Indonesia di Arab Saudi sehingga berita eksekusi Ruyati menjadi sangat mengejutkan.

Hal ini terlihat dalam teks berita seperti berikut,

Marty menyatakan, Pemerintah Indonesia memprotes keras hukuman mati terhadap Ruyati yang dilakukan tanpa terlebih dulu memberitahukan secara resmi kepada Perwakilan RI di Arab Saudi.

Pengajuan nota protes umum dilakukan oleh pemerintah suatu negara kepada pemerintah negara lainnya sebagai keberatan atas suatu keputusan hukum maupun kebijakan yang dianggap melanggar ataupun tidak sesuai dengan aturan internasional.

(Kompas, 20/6/2011) hal 1

|  |  |
|--|--|
| Define Problems<br>(Pendefinisian masalah)                     | Ruyati dihukum mati  |
| Diagnose causes<br>(Memperkirakan masalah atau sumber masalah) | Pemerintah kurang koordinasi. Terutama Kementerian Luar Negeri yang kecolongan eksekusi. |
| Make moral judgement<br>(Membuat keputusan moral)              | Ruyati hanya dipandang sebagai orang bawah   |
| Treatment Recommendation<br>(Menekankan penyelesaian)          | Pemerintah Indonesia mengajukan nota protes kepada Pemerintah Arab Saudi                 |

**Tabel 4.4.1 Framing Teks Berita 1: ‘Pemerintah Tak Dapat Hindari Hukuman’**

#### 4.4.2 Teks berita 2: 23 TKI Terancam Mati

Pada tanggal yang sama, 20 Juni 2011 pada halaman 17 (ekonomi) muncul berita kedua mengenai tragedi ancaman mati atas 23 TKI di luar negeri. Berita ini menjadi satu kesatuan dengan kasus kematian Ruyati karena ancaman mati terhadap 23 TKI terungkap setelah adanya berita eksekusi mati atas Ruyati di Arab Saudi.

##### *Problem Identification*

Berita berjudul ‘23 TKI Terancam Mati’ seakan membangunkan pembaca bahwa masih ada banyak lagi ancaman hukuman mati terhadap TKI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi, selain hukuman mati terhadap Ruyati. *Frame* persoalan yang muncul dalam berita ini adalah masih ada banyak ancaman hukuman mati atas warga negara Indonesia lainnya yang bekerja sebagai TKI di Arab Saudi sebanyak 23 orang.

Salah satu TKI yang menunggu eksekusi hukuman mati adalah Darsem binti Daud Tawar, TKI asal kabupaten Subang, Jawa Barat. *Kompas* menyoroti banyaknya ancaman hukuman mati kepada TKI di Arab Saudi karena negara

tersebut merupakan negara tujuan penempatan TKI terbesar kedua setelah Malaysia. TKI di Arab Saudi berjumlah 1,5 juta orang yang sebagian besar pekerja rumah tangga.

Masih banyaknya antrian TKI yang akan mendapat ancaman hukuman mati ini menunjukkan masih banyaknya permasalahan seputar TKI yang belum mendapatkan porsi perhatian yang cukup untuk mencari solusi yang maksimal.

### *Causal Interpretation*

Berita ini melihat penyebab masalah adalah pemerintah yang tidak maksimal dalam menyelesaikan kasus hukuman atas TKI. Cara pemerintah yang lebih memilih upaya pembayaran ganti rugi (*diyat*) daripada mengupayakan secara maksimal diplomasi dan advokasi litigasi di peradilan dalam menyelesaikan kasus ancaman hukuman dinilai salah.

Padahal, menurut *Kompas*, pemerintah dapat menghindarkan hukuman mati terhadap TKI dengan langkah politik seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Bahkan, *Kompas* melalui Sekretaris Jenderal Indonesia Employment Agency Association, Djamal Aziz, menuding tidak ada upaya perbaikan atas masalah hukuman mati terhadap TKI. Apalagi, pada tahun 1993 terjadi juga hukuman mati terhadap TKI asal Malang, Jawa Tengah yang bernama Suli Kahanan Kadiran.

“Dengan kasus yang menimpa Ruyati, jelas diplomasi Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi tidak ada peningkatan dari tahun 1993.”

Sementara ini, pemerintah lebih fokus pada penyelesaian kasus dengan *diyat* (uang darah), uang yang dibayarkana kepada keluarga korban sebagai ganti darah atas terbunuhnya anggota keluarga. *Kompas* mencontohkan dalam kasus Darsem yang terbukti membunuh pengguna jasanya pada Desember 2007, dimaafkan oleh ahli waris korban dengan uang *diyat* Rp. 4,7 miliar.

### ***Moral Evaluation***

*Frame* pemerintah sebagai penyebab masalah karena kurang maksimalnya langkah politik yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum TKI di Arab Saudi menempatkan penilaian moral atas TKI sebagai korban dari kurangnya upaya perlindungan pemerintah.

Analisis Kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo menuntut langkah tegas dari pemerintah. Hal ini terlihat dalam kalimat seperti di bawah ini.

“Kami menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencopot pejabat yang bertanggung jawab atas kelalaian melindungi TKI.”

Dalam berita ini, Pemerintah digambarkan seakan tidak berusaha keras melakukan diplomasi tingkat tinggi untuk menghindarkan TKI dari ancaman hukuman mati. Padahal, TKI di Arab Saudi yang sebagian besar adalah perempuan mengirim devisa sedikitnya 7,1 miliar dollar As atau Rp. 61 triliun per tahun 2010.

*Kompas* menilai jumlah pemasukan terhadap kas negara ternyata tidak diikuti dengan upaya maksimal pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap pahlawan devisa tersebut.

### ***Treatment Recommendation***

Berita ini menganjurkan pemerintah untuk melakukan langkah politik yang maksimal. Pemerintah juga diharapkan memiliki perjanjian perlindungan TKI dengan negara tujuan penempatan. *Kompas* mencontohkan keberhasilan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 menyelamatkan salah satu pekerja rumah tangga, Siti Zaenah, yang akhirnya terhindar dari hukuman mati melalui perjuangan politik.

Menurut *Kompas*, melalui langkah politik, pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya khusus untuk *diyat* demi menyelamatkan nyawa TKI yang

terancam hukuman mati. Apalagi, menurut Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi IX DPR RI, dalam kasus hukuman mati, pemerintah Arab Saudi pasti mengirim pemberitahuan kepada Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) yang ada di negara tersebut. Bahkan, *Kompas* memaparkan, beberapa TKI di Arab Saudi (termasuk yang akan menjalani hukuman) akhirnya terbebas karena PJTKI bersama pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat mendekati Kerajaan Arab Saudi.

Upaya pencegahan dengan langkah politik dinilai lebih tepat digunakan dalam permasalahan hukuman terhadap TKI ini. *Kompas* melalui Rieke mendorong pemerintah melakukannya seperti yang tertuang dalam kalimat berikut,

“Kami menunggu langkah politik Presiden”

(*Kompas*, 20/6/2011) hal 17

|  |   |
|--|---|
| Define Problems<br>(Pendefinisian masalah)                     | Masih banyak TKI yang terancam hukuman mati   |
| Diagnose causes<br>(Memperkirakan masalah atau sumber masalah) | Upaya diplomasi pemerintah untuk melindungi TKI tidak ada peningkatan                           |
| Make moral judgement<br>(Membuat keputusan moral)              | TKI menjadi korban kurangnya perlindungan karena pemerintah lalai                               |
| Treatment Recommendation<br>(Menekankan penyelesaian)          | Presiden harus melakukan langkah politik, pemerintah harus memiliki perjanjian perlindungan TKI |

**Tabel 4.4.2 Framing Teks Berita 2: '23 TKI Terancam Mati'**

#### **4.4.3 Teks Berita 3: Perlu Jeda Penempatan TKI**

Teks berita ketiga yang akan dianalisis adalah berita dengan judul 'Perlu Jeda Penempatan TKI' yang dipublish pada tanggal 22 Juni 2011 dan ditempatkan di halaman depan *Kompas*. Berita ini sebagai respon atas keresahan terjadinya eksekusi hukuman mati terhadap TKI Ruyati dan masih banyaknya ancaman hukuman mati atas 23 TKI lainnya di Arab Saudi.

### ***Problem Identification***

Identifikasi permasalahan dalam berita berjudul ‘Perlu Jeda Penempatan TKI’ adalah dorongan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, lembaga swadaya masyarakat yang membela hak buruh migrant dan Asosiasi Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) terhadap pemerintah untuk memberlakukan penghentian sementara pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri.

*Kompas* menekankan, penghentian sementara penempatan TKI terutama untuk pekerja rumah tangga dengan tujuan untuk memutus mata rantai persoalan yang ada selama ini terkait dengan TKI. Moratorium ditujukan terutama kepada negara-negara yang belum memiliki nota kesepahaman (MOU) perlindungan.

Desakan moratorium dalam berita ini terjadi karena bergulirnya kasus eksekusi mati TKI Ruyati yang dipancung pada tanggal 18 Juni 2011 karena melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Berita eksekusi Ruyati menjadi fenomenal karena pemerintah tak tahu menahu persoalan sudah dilakukannya eksekusi tersebut.

Berita ini menjelaskan bahwa moratorium TKI merupakan salah satu dari lima rekomendasi keputusan Rapat Paripurna DPR. Moratorium diharapkan akan memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memperbaiki persoalan TKI. Hal ini sesuai seperti yang dinyatakan oleh Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso seperti berikut ini,

“Kami minta pemerintah melakukan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah yang belum memiliki mekanisme perlindungan hukum dan perjanjian dengan Indonesia.”

### ***Causal Interpretation***

*Frame* penyebab terjadinya desakan moratorium TKI adalah akibat kesemrawutan penempatan dan perlindungan TKI yang terjadi selama ini. *Kompas* memaparkan jumlah TKI yang tidak sedikit di Malaysia dan Arab Saudi

sebagai negara tujuan utama penempatan TKI. Sebesar 2,2 juta TKI berada di Malaysia dan 1,5 juta orang TKI bekerja di Arab Saudi.

*Kompas* mengupas kesemrawutan penempatan dan perlindungan TKI yang terjadi di Indonesia dengan memaparkan data-data seperti yang dikatakan oleh Sekertaris Jenderal Apjati Rusdi Basalamah. Ia mengungkapkan terdapat tiga asosiasi pelaksana penempatan TKI swasta yang pada 10 hari yang lalu, telah melaporkan kesemrawutan penempatan TKI kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Permasalahan pertama adanya TKI yang dikirim ke luar negeri padahal belum adanya pernandatanganan perjanjian.

“Bagaimana mungkin calon TKI bisa berangkat sebelum menandatangani perjanjian kerja dengan majikan”

Rudi juga mendukung moratorium TKI untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah membenahi semua masalah dan kembali lagi menempatkan TKI namun dengan posisi tawar yang lebih tinggi.

Permasalahan kedua, menurut *Kompas* adalah adanya agen-agen sponsor yang mencari TKI hingga ke pedesaan untuk imbalan sampai Rp 8 juta perorang, dan hal ini belum serius diberantas oleh pemerintah. Kemudian adanya permasalahan perdagangan sertifikat kompetensi kerja asli tetapi palsu karena calon TKI tidak sepenuhnya mengikuti program pelatihan minimum 200 jam.

Permasalahan-permasalahan tersebut pada akhirnya, dilaporkan *Kompas*, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi sehingga biaya penempatan yang akan dicicil TKI paling cepat dari gaji penuh tujuh bulan bekerja pun akan membengkak.

### ***Moral Evaluation***

Kesemrawutan persoalan penempatan dan perlindungan TKI menempatkan *frame* penilaian moral ada pada TKI yang mengalami ketertindasan. *Kompas* melalui Eva Kusuma Sundari sebagai Wakil Ketua Tim

Khusus Pemantau TKI memaparkan permasalahan TKI di Timur Tengah yang harus segera diatasi oleh pemerintah.

“Gaji yang tak dibayarkan, pemutusan kerja, pelecehan seksual, pembunuhan, dan terlantarnya TKI di Arab Saudi perlu segera diatasi”

TKI yang ditempatkan sebagai korban ketidakadilan atas perlakuan dari majikan mereka di Arab Saudi digambarkan menjadi kelompok marjinal yang tidak dapat melakukan apa-apa karena sistem dan tidak adanya MOU perlindungan yang jelas bagi keselamatan nyawa mereka.

### ***Treatment Recommendation***

Pada berita ini, penyelesaian yang diusulkan oleh *Kompas* adalah upaya pemerintah untuk memperbaiki MOU dengan negara-negara yang menjadi tujuan penempatan TKI, terutama negara-negara di Timur Tengah yang belum memiliki nota kesepahaman perlindungan.

MOU perlindungan TKI, menurut *Kompas*, menjadi syarat mutlak penempatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Menurut Analisis Kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo, masa moratorium dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki UU No. 39/ 2004 tersebut yang hanya memiliki satu pasal tentang sanksi dan lebih berorientasi bisnis penempatan.

Pemerintah, masih menurut Wahyu, dapat meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Pekerja Domestik dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga (PRT) untuk memperkuat diplomasi melindungi TKI PRT. *Kompas* juga memberikan rekomendasi pembentukan satgas (satuan tugas) khusus untuk menangani kasus TKI yang terancam mati.

(Kompas 22/6/2011)

|  |   |
|--|---|
| Define Problems<br>(Pendefinisian masalah)                     | DPR, organisasi nonpemerintah pembela hak buruh migrant, Apjati desak moratorium TKI                              |
| Diagnose causes<br>(Memperkirakan masalah atau sumber masalah) | Kesemrawutan penempatan dan perlindungan TKI  |
| Make moral judgement<br>(Membuat keputusan moral)              | TKI tertindas karena tidak dipenuhinya hak mereka, adanya tindakan kekerasan                                      |
| Treatment Recommendation<br>(Menekankan penyelesaian)          | Perbaiki MOU dengan negara tujuan penempatan, Pembentukan satgas khusus penanganan TKI yang terancam hukuman mati |

**Tabel 4.4.3 Framing Teks Berita 3: ‘Perlu Jeda Penempatan TKI’**

#### **4.5 Temuan lain dalam Berita “Hukum Pancung TKI Ruyati”**

Selain menemukan suara politisi perempuan, penulis juga menemukan suara perempuan lainnya yang tidak berprofesi sebagai politisi yang muncul dalam pemberitaan kasus TKI Ruyati. Uniknya, pendapat dari perempuan yang bukan politisi mendapat porsi yang cukup besar dengan pernyataan yang dikutip panjang.

Pada berita *hard news*, penulis menemukan suara Anis Hidayah, seorang aktivis perempuan yang berkonsentrasi di bidang perburuhan. Anis Hidayah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Migrant Care.

Pada berita yang pertama kali muncul mengenai eksekusi Ruyati yang berjudul ‘Pemerintah Tak Dapat Hindari Hukuman’, Anis Hidayah menyatakan,

eksekusi mati Ruyati menunjukkan pidato Presiden belum sesuai dengan realitas. (20/6/2011)

Anis Hidayah juga tampil dalam berita lainnya dengan judul ‘Indonesia Desak Arab Saudi’ berkaitan dengan wacana moratorium TKI dan perlindungan

TKI. Pada berita ini, Anis Hidayah menyampaikan permintaannya kepada pemerintah untuk tidak serampangan mempercepat proses kesepakatan, terutama terkait dengan MOU perlindungan TKI dengan pemerintah Arab Saudi.

*“Jangan buru-buru. Negosiasinya harus berkualitas. Pemerintah juga harus menjadikan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) 169 sebagai dasar MOU” (23/6/2011)*

Tentu sebagai aktivis dan pembela hak buruh, suara Anis Hidayah sangat dibutuhkan ketika terjadi kasus yang membelit TKI seperti dalam kasus Ruyati. Apalagi lembaga yang dipimpin oleh Anis Hidayah, Migrant Care, menjadi salah satu LSM yang vokal menyuarakan hak-hak dan perlindungan terhadap buruh migrant. Pendapat dan pernyataan Anis dianggap mewakili buruh-buruh migrant yang tidak memiliki kuasa dan tanpa daya dalam menghadapi permasalahan yang mereka alami.

Kapasitas Anis sebagai Direktur Eksekutif Migrant Care tampaknya lebih dianggap *capable* oleh *Kompas* dalam memilih narasumber terkait kasus TKI Ruyati. Selain porsi suara Anis Hidayah yang lebih banyak dalam kedua berita tersebut, isi pernyataan Anis pun menyangkut pendapatnya mengenai permasalahan secara langsung.

Temuan lainnya yang ditemukan oleh penulis terkait dengan berita kasus TKI Ruyati adalah kemunculan suara politisi laki-laki yang juga mendapat tempat di *Kompas*.

Suara politisi laki-laki yang muncul diantaranya adalah Wakil Ketua DPR RI yang juga berasal dari Partai Golkar, Priyo Budi Santoso. Dalam berita ‘Perlu Jeda Penempatan TKI’, Priyo menyatakan

kami minta pemerintah melakukan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah yang belum memiliki mekanisme perlindungan hukum dan perjanjian dengan Indonesia. (22/6/2011)

Selain politisi laki-laki, pemberitaan kasus TKI Ruyati memang didominasi oleh suara laki-laki seperti suara Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan,

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Secara umum, suara laki-laki seperti Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar serta Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat melakukan pembelaan terhadap pihak pemerintah. Mereka menilai telah melakukan upaya maksimal dalam kasus TKI Ruyati. Bahkan meskipun salah satu TKI mendapat eksekusi mati, desakan moratorium juga tidak begitu saja langsung dilakukan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa moratorium penempatan TKI ke Arab Saudi membutuhkan waktu.

Pemerintah harus menoleransi TKI PRT lain yang sukses bekerja tanpa masalah di luar negeri. (22/6/2011)

Dominasi suara laki-laki dalam pemberitaan kasus TKI Ruyati memang tidak serta merta diartikan bahwa *Kompas* bias gender dalam menyampaikan beritanya dengan lebih memilih dan mendahulukan suara narasumber laki-laki dibandingkan suara narasumber perempuan. Namun, juga menjadi sebuah pertanyaan besar jika dihubungkan dengan pemberian kesempatan yang seimbang terhadap narasumber perempuan terutama politisi perempuan yang duduk di DPR RI sebagai perwakilan dari perempuan Indonesia.

#### **4.6 Latar Belakang Feminisme Narasumber**

Penulis menyadari diperlukannya wawancara dengan narasumber-narasumber yang dapat memberi informasi sehubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis sebagai bentuk konfirmasi. Penulis melakukan wawancara kepada kedua politisi perempuan yang namanya muncul di dalam berita TKI Ruyati, yaitu Rieke Diah Pitaloka (anggota DPR RI Komisi IX) dan Eva Kusuma Sundari (anggota DPR RI Komisi III). Meskipun memiliki jadwal yang padat, kedua politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut

bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pandangan dan perspektif mereka mengenai keberadaan suara mereka di *Kompas* dan keterkaitan antara politisi perempuan secara umum dan media massa.

Selain politisi perempuan, penulis juga mewawancarai salah satu wartawan *Kompas* yang menulis teks berita mengenai TKI Ruyati, Windoro serta seorang wartawan senior *Kompas* Maria Hartaningsih. Wawancara ini untuk melihat frame wartawan sebagai penulis berita dan penyaji informasi, serta untuk melihat seberapa besar pengaruh kerangka besar *Kompas* sebagai sebuah industri terhadap sebuah berita yang ditulis. Penulis berharap dengan melakukan konfirmasi dan wawancara kepada wartawan *Kompas*, tesis ini menjadi cukup berimbang dalam penyajiannya dan mampu memaparkan fakta dan data yang ada serta menguak persoalan dan masalah sesungguhnya yang terjadi sehubungan dengan suara politisi perempuan di media cetak.

Kesempatan untuk mewawancarai baik politisi perempuan maupun wartawan *Kompas* yang ada secara sinergi memberikan pandangan yang lebih luas bagi penulis untuk melihat permasalahan penelitian dari berbagai sudut pandang. Tidak hanya itu, penulis juga mendapatkan fakta dan data yang lebih komprehensif untuk melakukan analisis lebih jauh dan mendalam sehubungan dengan tema penelitian penulis. Dengan melakukan wawancara terhadap narasumber-narasumber yang dapat memberikan informasi ini, penulis berharap analisis yang dilakukan berbasis data sehingga tidak hanya berisi kecenderungan penulis secara pribadi untuk melakukan penilaian dan penghakiman.

### **Pengaruh Latar Belakang Feminisme pada Berita**

Perempuan oleh sistem dan kultur patriarki telah menjadi residu dan berada di posisi terbawah dengan persoalan-persoalan yang menerpa mereka. Wawasan gender mengedepankan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan untuk mendapat tempat dan hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Termasuk keadilan dalam penyajian sebuah teks.

Sebuah berita yang ditulis oleh pekerja media atau wartawan, tidak hanya menjadi suatu tulisan laporan informasi belaka namun juga menyertakan unsur *framing* terhadap berita tersebut. Proses seleksi yang terjadi di dalam penulisan teks berita tidak hanya dilakukan oleh editor, namun telah pula dilakukan oleh wartawan itu sendiri ketika melakukan peliputan. Pemilihan narasumber, pernyataan narasumber hingga penempatan narasumber dalam teks ternyata mengandung arti.

Menurut wartawan Senior HU *Kompas*, Maria Hartaningsih, pada dasarnya wartawan akan mengambil keputusan dan berlaku sesuai dengan apa yang diketahuinya.

Kita cari narasumber dari apa yang ada dibelakang kepala kita. Saya punya pengetahuan feminisme, saya mau nulis tentang perempuan dan politik, saya akan pilih Siti Zuhro. Tapi kan harus lihat narasumbernya. (Kalo) jenis kelaminnya aja yang perempuan tapi mereka sendiri blank? (wawancara Selasa 22 Mei 2012)

Maria Hartaningsih adalah salah satu wartawan perempuan yang banyak menulis di *Kompas* dengan gaya bahasa yang khas dan berwawasan gender. Maria sadar benar bahwa unsur keperempuanan dalam dirinya memberi banyak pengaruh terhadap ketertarikannya atas persoalan-persoalan yang melibatkan perempuan seperti prostitusi, perdagangan perempuan dan tenaga kerja perempuan. Maria memiliki wawasan feminisme yang memberikannya kesadaran untuk ikut andil menuliskan berita yang mewakili suara para perempuan yang berada dalam lingkaran sistem yang membuatnya menjadi korban.

Kesadaran akan sensitifitas terhadap persoalan perempuan tidak dimiliki oleh semua wartawan *Kompas*. Maria Hartaningsih hanya salah satu dari jumlah wartawan *Kompas* yang memiliki kepekaan atas isu feminisme. Oleh sebab itu penulisan berita dan artikel yang dilakukan Maria berdasarkan insting dan keinginannya menyalurkan suara perempuan-perempuan tertindas tersebut ke atas sebuah media cetak sehingga dapat setidaknya diketahui oleh masyarakat luas.

Sementara itu, wartawan *Kompas* lainnya yang menulis teks berita dalam penelitian ini, Windoro, mengaku tidak memiliki latar belakang feminisme sama sekali. Namun ia menyadari sebagai seorang wartawan harus peka terhadap isu yang sedang berkembang di masa kini, sehingga ada ketertarikan untuk memahami feminisme. Windoro yang telah berkarir selama 20 tahun di *Kompas* menuturkan,

Untuk wartawan secara umum, setiap isu menarik pasti kita angkat kok. Termasuk isu gender. (wawancara Jumat 15 Juni 2012)

Melalui pertimbangan latar belakang pengetahuan dan pengalaman, banyak wartawan sebagai peliput berita tidak memahami sudut pandang feminisme sehingga memengaruhi penulisan berita yang mereka lakukan, disadari atau tanpa disadari. Kesadaran yang minim atas wacana feminisme memang tidak sepenuhnya menjadi salah wartawan, karena tidak semua wartawan harus melakukan liputan mengenai gender dan berspektif perempuan. Namun, pengetahuan mengenai feminisme akan membantu wartawan untuk memahami dan memberikan kesempatan yang sama cukup dan besarnya kepada perempuan sehingga berita yang disajikan tidak menjadi bias gender.

Masalah zero kesadaran feminisme ternyata tidak hanya berasal dari latar belakang wartawan sebagai peliput berita, namun juga narasumber yang menjadi sumber penulisan berita. Dalam melakukan liputan berita, untuk menjadikan berita sebagai data dan fakta yang mengandung informasi, wartawan membutuhkan narasumber untuk memberikan pendapat, penilaian, komentar maupun klarifikasi atas sebuah persoalan tertentu. Tentunya dalam liputan, wartawan melakukan proses memilih narasumber yang tepat untuk berita yang ingin ditulis, baik dari unsur keahlian, profesi maupun kedekatan dengan persoalan yang diberitakan.

Pemilihan narasumber yang ditentukan oleh wartawan ternyata juga mengalami seleksi. Wartawan tidak hanya asal melakukan wawancara terhadap seorang narasumber, namun pula melihat kualitas dari pernyataan narasumbernya untuk memberikan pemberitaan yang akurat. Latar belakang pengetahuan,

pengalaman, data yang terpercaya dan kedekatan menjadi faktor yang dapat mendorong seorang wartawan untuk memilih narasumbernya bergantung pada berita yang akan ditulisnya.

Maria Hartaningsih sebagai seorang wartawan senior menyatakan, pemilihan narasumber bergantung pula pada pengetahuan narasumber yang tersedia. Maria mencontohkan, misalnya dalam kasus pemberitaan mengenai perempuan dan feminisme.

tidak semua perempuan memiliki pengetahuan mengenai feminisme, justru terkadang perempuan itu sendiri yang menyalahkan apa yang terjadi dengan perempuan lainnya. (wawancara Selasa 22 Mei 2012)

Sementara Windoro sebagai penulis berita terkait kasus TKI Ruyati yang berjudul ‘Pemerintah Tak Dapat Hindari Hukuman’ dan ‘23 TKI Terancam Mati’, berpendapat, pemilihan narasumber juga dipengaruhi oleh hubungan kedekatan antara wartawan dan narasumbernya, termasuk politisi perempuan. Selain itu, wartawan juga melihat *track record* narasumber yang terkait.

Rieke, memang fokus pada problem TKI memang gede. Dia memang konsen di bidang itu. Konsistensinya besar. Tiap email atau ketemu saya pasti ngomongnya TKI terus. (wawancara Jumat 15 Juni 2012)

Pada berita mengenai kasus “Hukum Pancung TKI Ruyati” yang menjadi objek penelitian penulis, hanya ditemukan dua suara politisi perempuan sebagai narasumber yang berpendapat dan memperjuangkan keadilan bagi Ruyati. Kedua politisi perempuan yang muncul dalam berita adalah Rieke Diah Pitaloka dan Eva Kusuma Sundari.

Anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari berpendapat, selektifitas narasumber yang dilakukan wartawan wajar saja terjadi. Apalagi tidak semua anggota DPR RI memiliki data untuk berbicara.

Temen-temen (wartawan) itu kan nyari yang ngasih berita mba. News yah. Bukan sekedar berita. Aku mau imbangi juga yah, sebenarnya yang dilaporin Migrant Care soal Ruyati itu bukan cuma aku sama Rieke aja. Banyak. (wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Eva melihat banyak politisi perempuan yang enggan mempelajari kasus dan tidak mau direpotkan dengan kasus-kasus sosial yang terjadi. Bagi Eva, itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki komitmen bekerja untuk rakyat.

Kualitas narasumber dalam berbicara memang menjadi pertimbangan besar bagi wartawan untuk melakukan wawancara, apalagi untuk sebuah harian umum sebesar *Kompas*. Rieke Diah Pitaloka berkomentar sama ketika diminta pendapat tentang sedikitnya politisi perempuan yang berbicara mengenai kasus TKI Ruyati.

Belum tentu medianya ngga diangkat. Saya juga pernah di media. Sebenarnya kredibilitas narsum diperhitungkan. Bukan hanya asal *statement* terus diangkat. Orang ini cuma *statement* atau punya kerja politik, itu diperhitungkan. (wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Rieke Diah Pitaloka dan Eva Kusuma Sundari merupakan dua politisi perempuan yang sering muncul di media untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan kaum kecil maupun perempuan. Kepada penulis, kedua politisi ini mengaku memiliki latar belakang feminisme di dalam diri mereka sehingga dalam melakukan kerja politik mereka, pertimbangan feminisme juga diperhitungkan.

Eva Kusuma Sundari secara khusus mengikuti pelatihan gender tahun 1991 di Lombok. Dampak dari pelatihan gender tersebutlah yang membawa frame berpikir Eva dalam melakukan analisis kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan.

Policy (kebijakan) itu mengkonstruksi sistem kan mba. Kalo kita mau melihat, perempuan sekedar sebagai input. Sekedar mencari efektivitas dan efisiensi di ekonomi, karena pendekatan kita yang fungsi ekonominya moneter, pada finance. Perempuan termasuk tkw jd residu, karena perekonomian desa tidak mau dikembangkan. Perkotaan terus. Konstitusi kita ngga dipakek sebagai panduan, karena lebih ke resep-resep IMF yang kalo kita lihat sangat jauh dengan konstitusi, akibatnya reses terhadap satu kelompok perempuan yg termarginal. (wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Rieke juga menilai kebijakan politik yang diambilnya dipengaruhi oleh perspektif feminisme yang dimilikinya. Berbeda dengan Eva yang mengikuti pelatihan untuk memperdalam keingintahuannya mengenai gender, Rieke menilai keperempuannya menjadi faktor yang membuatnya sadar gender.

Sebenarnya perspektif sebagai perempuan pasti ada. Itu yg disebut perspektif gender. Pengalaman yang dialami sebagai perempuan, yg tidak dialami oleh laki-laki. Itu melatarbelakangi keputusan politik yang saya ambil. (wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Penulisan berita terutama terkait dengan permasalahan atau kasus yang berhubungan dengan perempuan mengalami konstruksi baik oleh wartawan yang menulis berita maupun oleh narasumber yang menjadi sumber penulisan berita. Pengetahuan mengenai kesadaran gender menjadi penentu kerangka berita. Selain wawasan gender ini dipengaruhi oleh pewarta yang mengarahkan tulisannya, juga dipengaruhi oleh narasumber sebagai penentu kualitas isi berita.

## BAB V

### ANALISIS PENELITIAN

#### 5.1 Bingkai Suara Politisi Perempuan dalam Kasus ‘Hukum Pancung TKI Ruyati’ di *Kompas*

Kehidupan kita sebagai manusia yang memasuki masa global tidak pernah lepas dari terpaan komunikasi. Setiap hari, kita mendapatkan informasi baik dari televisi, radio, internet maupun dari media cetak. Informasi-informasi tersebut berseliweran di sekitar kita dari waktu ke waktu dengan paparan yang berbeda-beda, dengan cara penyampaian yang berbeda dan tentu dengan agenda-agenda yang berbeda.

Sebagai negara berkembang yang telah dimasuki proses demokrasi, Indonesia memberikan pacuan kepada perekonomiannya untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini tidak dapat dielakkan menjadi motor penggerak bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Industri-industri tumbuh, siklus perputaran uang meningkat dan setiap orang semakin lama semakin kritis dan merespon cepat terhadap teknologi yang muncul untuk melengkapi kebutuhan hidup mereka. Tidak terkecuali dengan informasi. Informasi tumbuh menjadi produk yang sangat “berharga” dan memiliki nilai yang tinggi. Pertumbuhan media massa menjadi semakin kuat dan besar memberikan lapangan pekerjaan bagi pemuda Indonesia dan membuka kesempatan untuk menjadikan informasi sebagai ladang perdagangan.

*Kompas* sebagai salah satu media cetak tua yang telah membuktikan dirinya dapat bertahan lama dalam perkembangan pergantian kepemimpinan di Indonesia, juga telah tumbuh menjadi sebuah industri besar. *Kompas* tidak lagi hanya “gembel” bermodal niat untuk mendistribusikan informasi, namun telah menjadi raksasa yang menguasai pasar dan memiliki kekuasaan dan keluasan jangkauan dalam produksinya. *Kompas* telah tumbuh menjadi sebuah *brand* yang berhasil mengukuhkan dirinya sebagai harian umum yang independen dan

dipercaya banyak masyarakat Indonesia sebagai pembaca setia. Sebagai sebuah industri, tentu *Kompas* memiliki kepentingan ekonomi untuk “laku” di pasaran dan mendapatkan keuntungan sebagai bonus modal yang dikeluarkan.

Konsep pemberitaan sebagai barang yang “laku” bagi *Kompas* juga dibenarkan oleh watawan *Kompas*, Windoro Adi. Ia mengungkapkan,

“Sebagai pekerja media massa, tentu orientasi kita itu berita ini laku apa ngga. Sehingga, itu yang menjadi salah satu faktor pemilihan berita.”  
(wawancara Jumat 15 Juni 2012)

Sementara itu, *Kompas* juga sebagai sebuah media massa memiliki unsur *framing* (pembingkai) yang terjadi oleh karena proses produksi berita yang panjang. *Framing* dimulai dari wartawan sebagai peliput yang melihat berita melalui perspektifnya, bagaimana wartawan ini melihat konstruksi realitas yang ada di lapangan kemudian menuliskannya dalam sebuah teks berita. Setelah itu, bagian redaktur pun juga akan melakukan seleksi atas setiap berita yang ditulis wartawannya sesuai dengan patron dan kerangka pedoman yang dianut *Kompas* sebagai sebuah ideologi.

Menurut Eriyanto, yang kita lakukan pertama kali adalah melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Peristiwa dipahami bukan sesuatu yang *taken for granted*. Sebaliknya, wartawan dan medialah yang secara aktif membentuk realitas.

Realitas tercipta dalam konsepsi wartawan. Berbagai hal yang terjadi, fakta, orang diabstraksikan menjadi peristiwa yang kemudian hadir di hadapan khalayak. Jadi, dalam penelitian *framing*, yang menjadi titik persoalan adalah bagaimana realitas/ peristiwa dikonstruksi oleh media. Lebih spesifik, bagaimana media membingkai peristiwa dalam konstruksi tertentu. (Eriyanto, 2002: 7)

Pada penelitian yang berjudul “Suara Perempuan di Media Cetak, Analisis *Framing* Suara Politisi Perempuan Sebagai Komunikasi Politik dalam Kasus “Hukum Pancung TKI Ruyati” di *Kompas*” ini, penulis ingin melihat bagaimana *Kompas* melakukan *frame* terhadap suara politisi perempuan. Peneliti telah

menganalisis tiga buah teks berita yang berisi suara politisi perempuan dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman.

*Frame* yang dilakukan *Kompas* terhadap berita TKI Ruyati sendiri memperlihatkan bahwa *Kompas* membingkai Ruyati sebagai warga kelas bawah yang menjadi korban, karena aktor penyebab masalah di dalam tiga teks berita bukanlah Ruyati yang melakukan pembunuhan melainkan pemerintah yang dinilai lalai dalam melakukan koordinasi internal serta tidak mampu memaksimalkan langkah politik untuk mencegah eksekusi mati Ruyati. Pemerintah juga dianggap *Kompas* melalui *framenya* tidak dapat mengatasi kesemrawutan pengiriman dan penempatan TKI serta tidak mampu mencegah adanya praktik perekrutan TKI secara ilegal.

Penilaian moral yang diberikan *Kompas* melalui frame bahwa Ruyati sebagai TKI adalah penyumbang devisa yang besar hingga Rp. 6,1 triliun pada tahun 2010 hanya menjadi korban kekerasan karena mengalami tindakan kekerasan dari majikannya yang mendorongnya dari lantai dua hingga Ruyati patah kaki. Selain itu, pemerintah sebagai penyebab masalah *diframe* tidak mampu memperjuangkan keadilan bagi Ruyati dan banyak TKI lainnya yang tidak mendapat gaji yang penuh atau bahkan tidak dibayarkan.

*Kompas* juga merekomendasikan penyelesaian masalah Ruyati dan TKI secara umum dengan mengajukan nota protes serta melakukan moratorium untum memebenahi persoalan TKI yang masih ruwet dan membentuk Satgas (satuan tugas) Khusus Perlindungan TKI yang bermasalah.

Dalam tiga teks berita yang telah dianalisis oleh penulis tersebut, ditemukan dua nama politisi perempuan yang bersuara dalam kasus Ruyati. Nama pertama adalah Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi IX DPR RI periode 2009-2014. Rieke muncul sebanyak dua kali dalam dua berita berbeda namun dalam satu hari penerbitan yang sama. Berita pertama yaitu berjudul 'Pemerintah Tak Dapat Hindari Hukuman' sementara berita kedua berjudul '23 TKI Terancam Mati'.

Pada teks berita berjudul ‘Pemerintah Tak Dapat Hindari Hukuman’ yang ditempatkan pada halaman pertama dengan kolom yang tidak besar, Rieke mendapatkan porsi kecil di paragraf kedua dengan kalimat yang ditulis *Kompas*:

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, menilai, peristiwa ini semakin membuka kelemahan koordinasi internal pemerintah dan diplomasi internasional. (20/6/2011)

Penempatan pernyataan Rieke untuk membingkai berita hanya untuk menegaskan penyebab permasalahan yang terjadi yang berakibat pada kematian seorang warga negara karena mendapat hukuman pancung. Tidak ada penempatan foto Rieke dalam berita tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan Rieke sebagai politisi perempuan tidak diutamakan dalam teks berita ini. Rieke hanya dianggap sebagai pelengkap berita mewakili anggota dewan untuk memberikan pendapatnya terkait kasus eksekusi Ruyati tersebut.

Kemunculan kedua Rieke terdapat pada judul berita ‘23 TKI Terancam Mati’ pada hari yang sama namun ditempatkan pada halaman 17, bagian ekonomi. Rieke muncul pada paragraf akhir sebagai tambahan dari pemberitaan mengenai ancaman hukuman mati terhadap 23 TKI lainnya di Arab Saudi. Dalam berita ini Rieke mengatakan,

“Kami menunggu langkah politik Presiden,”(20/6/2011)

Pernyataan Rieke tersebut terkait dengan teks mengenai langkah politik yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mampu menyelamatkan satu nyawa TKI yang terancam pada tahun 1999. *Frame* atas Rieke yang ditempatkan sebagai sosok yang berseberangan dengan pemerintah, mewakili oposisi, seakan memberi peringatan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melakukan langkah politik yang sama dengan yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur.

Pada berita kedua ini, kemunculan Rieke juga tidak dengan foto, sehingga *frame* Rieke tidak menjadi inti atau dipentingkan dalam berita ini. Padahal, Rieke dikenal sebagai aktivis pembela buruh sebelum bergabung di DPR RI. Rieke juga

berada di Komisi IX, di mana persoalan TKI menjadi wilayah kerjanya. Semestinya kehadiran Rieke di berita ini mendapat porsi yang lebih besar karena latar belakangnya yang pro keadilan terhadap buruh serta apalagi ditunjang posisinya di Komisis IX, yang artinya kasus Ruyati menjadi persoalan pokok dalam daftar kerjanya.

Nama politisi perempuan lainnya yang muncul dalam pemberitaan kasus ‘Hukum Pancung TKI Ruyati’ adalah Eva Kusuma Sundari, Anggota DPR RI Komisi III. Eva Kusuma Sundari muncul dalam berita tertanggal 22 Juni 2011 yang berjudul ‘Perlu Jeda Penempatan TKI’. Berita ini memang ditempatkan di halaman depan *Kompas*, namun hanya dimulai dengan pembuka saja. Berita kemudian dilanjutkan di halaman 15 (bagian umum) di mana nama Eva muncul.

Eva, yang ditulis sebagai Wakil Ketua Tim Khusus Pemantau TKI, ditempatkan di tengah-tengah teks berita, terkait dengan pernyataannya mengenai permasalahan-permasalahan TKI di Timur Tengah, seperti di bawah ini,

“Gaji yang tak dibayarkan, pemutusan kerja, pelecehan seksual, pembunuhan, dan telantarnya TKI di Arab Saudi perlu segera diatasi”  
(22/6/2011)

Pernyataan singkat Eva berbeda jika dibandingkan dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, di halaman yang sama, yang mendapat porsi lebih besar dengan pernyataannya mengenai keputusan DPR dalam Rapat Paripurna. *Frame* terhadap Eva ini memperlihatkan bahwa pernyataan Eva tidak sama pentingnya dengan Priyo, namun memberikan argumen yang jelas atas persoalan TKI yang terjadi. Meskipun Eva berada di Komisi III, namun program-program kerjanya yang banyak bersentuhan dengan buruh dan gender, menjadikan dia narasumber yang dicari jika terkait dengan kasus-kasus tersebut.

Penulisan Eva sebagai Wakil Ketua Tim Khusus Pemantau TKI tidak membuat Eva mendapat porsi penulisan berita yang lebih banyak. Padahal jika melihat, posisi Eva dalam teks tersebut, yang tidak digambarkan sebagai Anggota DPR RI Komisi III, Eva sebenarnya dekat dengan sumber persoalan karena ia

berada dalam Tim Khusus yang artinya memiliki keleluasan, kewenangan dan data yang lebih valid dan akurat.

*Frame* yang terjadi pada suara Rieke dan Eva dalam teks berita terkait kasus TKI Ruyati, *Kompas* jelas tidak melihat posisi kedua politisi perempuan tersebut sebagai perempuan yang dapat memberikan respon sensitifitas yang lebih besar jika dihubungkan dengan perempuan lainnya sebagai korban, dalam hal ini Ruyati.

*Kompas* memang memandang Rieke dan Eva sebagai sisi yang memiliki orientasi terhadap perlindungan buruh, dengan bukti pernyataan yang dikutip *Kompas* mengenai kedua politisi perempuan ini adalah pernyataan mereka mengenai rendahnya perlindungan TKI oleh pemerintah. Namun demikian, sesuai dengan kebiasaan penulisan berita di mana narasumber utama biasanya ditempatkan di awal ataupun di tengah dengan penekanan pada porsi, hal ini tidak terjadi dengan Rieke dan Eva.

Menurut buku 'Panduan Praktis Bagi Wartawan' yang diterbitkan oleh BBC World Service Trust, dalam penulisan berita nilai penting sebuah berita berada pada paragraf awal,

Sedangkan sebuah berita harus berisi esensi dari berita itu justru di paragraf yang paling awal. Paragraf pertama yang sangat penting ini biasa disebut 'lead' atau 'intro'. (Frauenrath dan Nur, 2003: 32)

Hal ini juga dinyatakan oleh seorang wartawan Senior *Kompas*, Irwan Julianto. Ia mengungkapkan dalam penulisan berita tidak ada aturan baku mengenai penentuan urutan narasumber yang penting di awal penulisan. Namun telah menjadi kebiasaan dalam dunia jurnalisme, narasumber *prominent* atau utama ditempatkan di awal. Hal ini seperti kebiasaan pada pedoman penulisan berita piramida terbalik.

Kedua penjelasan mengenai pemilihan penempatan narasumber dalam teks berita tersebut memberikan bukti bahwa *Kompas* memframe suara Rieke dan Eva sebagai politisi perempuan tidak penting. Padahal, untuk membicarakan persoalan

yang menimpa perempuan, tidak ada yang lebih mengerti dan memahami persoalan tersebut selain perempuan itu sendiri tentunya. Hal ini seperti dinyatakan oleh Ani Widyani Soetjipto (Soetjipto, 2005: 60), walaupun sama-sama peduli pada masalah-masalah ekonomi, perempuan akan lebih berminat pada masalah upah, pensiun, kerja paruh waktu. Sementara, laki-laki cenderung tertarik pada masalah seperti isu pengangguran dan lainnya yang sejenis.

Apalagi Rieke dan Eva bukanlah perempuan biasa tanpa posisi. Mereka adalah anggota DPR RI yang secara tidak langsung menjadi representasi/perwakilan dari perempuan Indonesia, di mana dalam hal ini, pandangan dan perspektif mereka mengenai kasus Ruyati seharusnya menjadi penting dan diutamakan. Melihat fakta tersebut, dapat dikatakan seperti pernyataan Azza Karam (Karam dkk, 1999: 33) bahwa media massa cenderung meminimalkan pengungkapan berbagai peristiwa dan organisasi-organisasi kepentingan terhadap perempuan.

Berita berperspektif gender memang belum menjadi pilihan media massa, hal ini menurut Billy Sarmono (Sarwono, 2004: 33) dikarenakan, kalangan jurnalis pada umumnya sangat percaya bahwa berita memang tidak perlu diapresiasi secara gender. “berita adalah berita” apakah itu ditampilkan oleh jurnalis laki-laki atau perempuan. Bagi mereka yang lebih penting adalah standar kesahihan atau keakuratan, keseimbangan, penyajian, dan penerapan etik yang secara setara terhadap semua jurnalis tanpa harus mempertimbangkan persoalan gender di dalamnya.

Padahal, media memegang peranan penting dalam memperjuangkan berbagai isu. Tekanan dari media dapat menjadi kekuatan yang efektif. Parpol-parpol dan para anggota parlemen tentu berkepentingan menjaga citra mereka di mata media, dan oleh karena itu cenderung memberi dukungan pada isu-isu populer. Oleh sebab itu, dengan meminta bantuan media kita dapat mengendalikan tindakan para aktor politik (Soetjipto, 2005: 157). Melalui berita yang berperspektif perempuan, atau setidaknya memberikan kesempatan yang besar kepada politisi perempuan untuk bersuara memperjuangkan keadilan atas persoalan perempuan, media telah memberikan bantuan yang besar bagi

perempuan sebagai kekuatan yang mampu memunculkan isu perempuan sebagai isu yang penting.

*Framing* yang dilakukan terhadap Rieke Diah Pitaloka dan Eva Kusuma Sundari sebagai politisi perempuan dalam kasus TKI Ruyati oleh *Kompas* memang masih belum menunjukkan keberpihakan yang berimbang kepada politisi perempuan. Perempuan masih dianggap belum penting dengan penempatan kutipan kalimat kedua politisi ini tidak pada ‘lead’ berita dan hanya menjadi pelengkap dari berita itu sendiri. Pada dasarnya, media memang telah memiliki opininya sendiri mengenai suatu berita, dan narasumber (dalam hal ini politisi perempuan) digunakan untuk mempertegas dan hanya untuk memberikan unsur ‘menjual’ dalam sebuah berita. Seperti yang dinyatakan oleh wartawan *Kompas*, Windoro Adi,

“Jika ada dua narasumber. Yang satu laki-laki dan yang satu perempuan, kapabilitasnya sama nih. Sama-sama pintar, sama-sama jago, maka wartawan pasti pilih yang perempuan. Karena lebih laku buat dijual. Gitu loh.” (wawancara Jumat 15 Juni 2012)

Pernyataan Windoro mempertegas bahwa *frame* terhadap politisi perempuan selain hanya sebagai pelengkap dari sebuah berita memiliki unsur daya tarik “menjual” yang tinggi. Sehingga, *Kompas* sebagai kaum kapitalis, masih melihat posisi perempuan sebagai kelas bawah, yang digunakan untuk melariskan dagangan mereka. Hal ini memperlihatkan *Standpoint* politisi perempuan yang diposisikan oleh *Kompas* sebagai kelas proletar yang berada di bawah kepentingan *Kompas* sebagai sebuah industri yang hanya memedulikan keuntungan dan kepentingan kaum elit (kapitalis) saja. Praktik ini menunjukkan penindasan yang dilakukan insititusi *Kompas* terhadap politisi perempuan.

Pendekatan feminis dalam ekonomi media yaitu fokusnya pada penindasan wanita oleh pria dan institusi-institusi yang ditanamkan oleh pria, termasuk praktik komunikasi sehari-hari dan pesan-pesan yang disebarkan lewat media. (Ibrahim, 2005: xxx)

Kritik terhadap media juga diungkapkan oleh Mills (Hardt, 2005: 211), dia memandang media sebagai pemimpin ‘dunia palsu’ (*pseudo-world*), yang menyajikan realitas eksternal dan pengalaman internal serta penghancuran privasi dengan cara menghancurkan “peluang untuk pertukaran opini yang masuk akal dan tidak terburu-buru serta manusiawi”. Ketidakberimbangan pandangan (*frame*) terhadap suara politisi perempuan yang dikonstruksi *Kompas* dalam berita TKI Ruyati ini menunjukkan bahwa kepentingan *Kompas* sebagai sebuah institusi patriarki (kapitalis) hanya menganggap perempuan dan persoalan-persoalan yang meliputinya sebagai kelas bawah.

*Kompas* menilai persoalan perempuan seperti eksekusi TKI Ruyati yang tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia sebagai peristiwa yang “tidak seksi” dibanding peristiwa ekonomi. Padahal, Ruyati mewakili ribuan TKI hanyalah perempuan yang terjebak dalam sistem perekonomian kota yang tidak memberi mereka pilihan untuk bekerja sebagai TKI dan juga bahwa keberadaan mereka sebagai TKI memberikan kontribusi besar atas perekonomian negara melalui devisa. Perjuangan dan benefit yang dihasilkan TKI tidak membuat TKI memiliki posisi penting untuk diperjuangkan secara serius. Begitu pula dengan politisi perempuan yang meskipun memiliki kedudukan politik, ternyata belum memenuhi kriteria sebagai narasumber yang penting dalam persoalan perempuan. Mereka hanya dikonstruksi sebagai perempuan pintar yang duduk di parlemen untuk membuat dagangan *Kompas* laku.

### ***Standpoint* Politisi Perempuan terhadap Ruyati sebagai Perempuan yang Dieksekusi Mati**

Eksekusi mati terhadap TKI Ruyati yang terjadi tanggal 18 Juni 2011 menggemparkan Indonesia. Meskipun berita eksekusi ini baru diangkat ke media cetak oleh *Kompas* pada tanggal 20 Juni 2011, respon keberatan dan kekecewaan atas peristiwa tersebut tetap bergulir. Kasus Ruyati menjadi begitu besar dan membuka mata karena melihat rentannya resiko atas keberadaan TKI terutama perempuan yang mendominasi bidang pekerja rumah tangga (PRT) yang bekerja

di luar negeri. Tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi pada mereka hingga mengorbankan fisik mulai dari patah tulang hingga luka dalam memperlihatkan tidak adanya perlindungan atas fisik mereka dari negara sebagai buruh di luar negeri.

Kasus Ruyati akhirnya melahirkan keputusan moratorium TKI selama 1 tahun yang dilakukan ke negara-negara tujuan dengan prosentase kekerasan yang tinggi seperti Malaysia dan Arab Saudi. Moratorium ini sebagai bentuk dukungan atas perbaikan proses penempatan dan pengiriman TKI ke luar negeri yang banyak mengalami permasalahan mulai dari agen-agen ilegal yang nakal hingga berujung perdagangan manusia. Kasus Ruyati pun akhirnya mendesak pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk mengurus persoalan kekerasan terhadap TKI di luar negeri. Meskipun Ruyati hanya satu contoh korban dari keruwetan sistem dan kurangnya perhatian pemerintah dan negara terhadap keselamatan warganya, tapi Ruyati mampu mendorong pemerintah melakukan sesuatu dan melahirkan kebijakan yang positif seperti moratorium TKI tersebut.

TKI sendiri menurut HU *Kompas* tanggal 20 Juni 2011 halaman 17, menjadi penyumbang pendapatan negara non pajak yang besar untuk perekonomian negara Indonesia.

Sebagian besar pekerja rumah tangga itu perempuan yang mengirim devisa sedikitnya 7,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp. 6,1 triliun tahun 2010. (20/6/2011)

Angka itu termasuk angka fantastis sebagai pendapatan terbesar kedua setelah migas. Namun, ternyata angka Rp. 6,1 triliun tidak mampu menjadikan TKI sebagai target prioritas untuk mendapat perlindungan dan keselamatan kerja yang tinggi yang dapat mendukung produksi kerja mereka. .

Pemberitaan Ruyati yang muncul pada tanggal 20 Juni 2011 dan mulai hilang 1 Juli 2011 dengan meledaknya kasus Korupsi Wisma Atlet dengan tersangka M. Nazaruddin, menarik untuk ditelusuri ketika kasus yang menimpa sebagian besar pekerja perempuan ini hanya memunculkan dua nama politisi

perempuan. Dua politisi yang muncul, yaitu Rieke Diah Pitaloka dan Eva Kusuma Sundari.

Rieke, ketika diwawancara pada hari Kamis, 14 Juni 2012 di ruang tamu Komisi IX Gedung Nusantara I DPR RI, berpendapat kasus Ruyati hanya satu dari banyaknya persoalan TKI yang membelit pemerintah. Menurut Rieke, buruh hanya menjadi korban dari ketidakpedulian pemerintah dan elit politik atas rakyat. Sementara Eva Kusuma Sundari menyadari bahwa kasus Ruyati menunjukkan kelemahan dari sistem struktural yang akhirnya mengorbankan perempuan.

”Dalam kasus Ruyati, kan pemerintah harusnya melihat secara lebih kongkret, tidak hanya kasus hukuman mati itu sendiri tetapi alasan mengapa kasus itu dapat terjadi. Ruyati memang membunuh, namun alasan mengapa dia membunuh, itu kan persoalan sebenarnya. Itu mengapa secara struktural, sistem kita memang menjadikan perempuan dalam posisi yang lemah.” (wawancara Kamis, 14 Juni 2012)

Ruyati sebagai figur perempuan yang melakukan peperangan terhadap kemiskinan, bergelut dengan keharusan untuk mencari pekerjaan dengan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya, akhirnya memilih bekerja sebagai PRT di Arab Saudi. Ruyati telah berangkat sebanyak tiga kali sebagai TKI. Selama dua kali keberangkatannya, Ruyati berhasil menyekolahkan anak-anaknya, berhasil memberi pasokan dana segar untuk orangtua dan keluarganya. Dalam kasus Ruyati, dia hanya perempuan yang tersisihkan dari sistem ekonomi kapitalis Indonesia yang tidak peduli pada rakyat bawah. Namun, meskipun Ruyati melakukan perjuangan untuk memutar roda perekonomian, akhirnya Ruyati pun menjadi korban dari ketidakpedulian sistem padanya.

Rieke, yang berlatar belakang aktivis buruh dan melakukan pembelaan yang cukup serius terhadap buruh, berpendapat, pada dasarnya ajaran Kartini dapat menjadi panduan kita untuk menilai dan melakukan perjuangan yang lebih kongkret. Emansipasi yang diusung Kartini adalah emansipasi rakyat. Yaitu adanya kesetaraan antara manusia dengan manusia lainnya tanpa ada yang boleh menindas yang lainnya. Sebagai bagian dari manusia, TKI menjadi tidak setara posisinya karena perlakuan yang tidak baik dan tindakan kekerasan yang mereka

alami menjadikan mereka berada pada posisi yang lebih rendah dari majikannya. Terutama keterkaitan perempuan sebagai bagian dari TKI.

“Karena perempuan berada sebagai pihak yang rentan, mereka sebagai korban yang seharusnya kita perjuangkan (hak-hak) mereka.” (wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Sementara Eva menilai, sistem dihasilkan oleh kebijakan negara sebagai garis besar yang menentukan arah dan jalannya pemerintahan. Dalam wawancara yang dilakukan, Eva mengkritik posisi perempuan yang tidak pernah dipikirkan secara serius sebagai bagian dari pergerakan ekonomi yang seharusnya dapat dilibatkan lebih besar dan luas.

“*Policy* (kebijakan) itu mengkonstruksi sistem kan mba. Kalo kita mau melihat, (saat ini) perempuan sekedar sebagai input. Sekedar mencari efektivitas dan efisiensi di ekonomi, karena pendekatan kita yang fungsi ekonominya moneter, pada *finance*. Perempuan, termasuk TKW akhirnya jd residu, karena perekonomian desa tidak mau dikembangkan. Perkotaan terus.” (wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Bagi Eva, perempuan yang berangkat dari desa menuju kota atau negara lain untuk mencari pekerjaan adalah korban ketidakberdayaan mereka atas himpitan harga kebutuhan pangan yang tinggi, himpitan aktualisasi sekolah bagi anak-anak mereka, sementara di desa mereka tidak dapat melakukan banyak hal karena perekonomian desa yang tidak dikembangkan. Padahal, jika perekonomian desa dikembangkan, perempuan yang mendominasi dalam bidang tenaga kerja PRT tidak harus mengambil resiko besar untuk berada jauh dari keluarga dan tanpa perlindungan sama sekali.

Menurut Eva, sistem perekonomian yang cenderung kapitalis ini dikarenakan konstitusi negara tidak digunakan sebagai panduan, dan lebih memilih mengikuti resep-resep dan anjuran dari IMF, yang diakui Eva sangat jauh dengan konstitusi. Akibat dari mengikuti cara-cara di luar konstitusi inilah yang menyebabkan reses terhadap satu kelompok perempuan yang termarginalkan. Keadaan ketidakadilan inilah yang kemudian mengembangkan opini untuk

melakukan perjuangan yang lebih besar atas hak-hak bagi perempuan sebagai kelompok marjinal dan terbawah.

Sementara wartawan senior *Kompas*, Windoro Adi yang telah bekerja di *Kompas* selama 20 tahun menilai kasus Ruyati mencerminkan kasus-kasus yang umum terjadi pada TKI bidang PRT. Oleh sebab latar belakang pendidikan dan kemampuan sosial mereka yang rendah, buta hukum, dan mudah hanyut dengan kebohongan tentang “pintu surga”, TKI yang didominasi perempuan ini terjebak dalam perekrutan ilegal.

Mereka umumnya direkrut para pencari tenaga kerja perorangan yang menjadi kepanjangan tangan sub-sub agen biro jasa TKI yang sebagian besar berkantor di Jakarta Timur. Para pencari tenaga kerja ilegal ini menyisir para calon TKI sampai pelosok desa. Mereka umumnya menawarkan dua iming-iming. Iming-iming upah yang tinggi, dan bekerja di negeri yang dekat dengan “pintu surga”. (wawancara Jumat 15 Juni 2012)

Windoro berasumsi, para calon TKI mendapatkan cuci otak yang dilakukan ketika mereka dalam penampungan. Cuci otak yang dilakukan adalah menekankan ganjaran keselamatan dunia dan surga jika para calon TKI tersebut bekerja di Timur Tengah. Namun mereka tidak mendapat informasi mengenai kultur negara Arab. Mereka juga tidak disertai pelatihan keterampilan dasar dan khusus dalam melakukan kegiatan rumah tangga yang biasa dilakukan di negara Arab. Calon TKI tersebut pada dasarnya tidak mengerti mengenai dokumen-dokumen legal yang harus mereka siapkan. Mengenai perlindungan hukum dan cara mendapat perlindungan hukum.

Para calon tidak memiliki kemampuan meneliti dan mengoreksi kontrak kerja sebelum kontrak kerja ditandatangani. (wawancara Jumat 15 Juni 2012)

Ketidakmampuan dan ketidakmengertian calon TKI yang umumnya berpendidikan rendah dan jauh dari informasi, hanya bermodalkan percaya dan niat beramal inilah yang menjadi celah pintu terjadinya berbagai tindakan

penipuan, kekerasan, pelecehan seksual hingga pembunuhan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri. Kelalaian pemerintah dalam mengawasi kegiatan-kegiatan pengiriman dan penempatan TKI ilegal dan permasalahan yang menyertai mereka tidaklah wajar adanya. Selain pemerintah memiliki kekuasaan dan keleluasaan untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadap agen TKI swasta yang bermasalah, TKI merupakan akibat ketidakberdayaan pemerintah menciptakan tenaga kerja dan memutar roda perekonomian di pedesaan sehingga memberikan peluang bagi lahirnya pilihan menjadi TKI.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berita Ruyati di *Kompas*, *frame* yang muncul adalah kecenderungan mendukung posisi Ruyati sebagai orang yang berada di kelas bawah yang berjuang hingga tiga kali periode menjadi TKI untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Ruyati digambarkan sebagai perempuan yang tidak berdaya dan mendapatkan penindasan dalam bentuk tidak dibayarkan sebagian uang gajinya dan mengalami patah kaki karena didorong oleh majikannya dari lantai dua.

Dilihat dari sisi *feminist standpoint*, dengan perspektif kritis konstruktivisme yang menyatakan bahwa dalam hierarki sosial masyarakat, kaum atas (elit) yang memiliki peran besar dalam menggerakkan kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, Ruyati sebagai masyarakat kelas bawah tidak mampu berbuat apa-apa dan melakukan pembunuhan untuk karena tekanan dari majikannya. Kepentingan Ruyati sebagai kaum proletar untuk mendapatkan gaji dan perlakuan yang baik tidak diutamakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan (kaum elit) yang didominasi oleh laki-laki

Kasus Ruyati hanya puncak dari gunung es permasalahan TKI yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya mengorbankan harta dan nyawa, pada akhirnya kasus Ruyati juga mengorbankan harga diri bangsa yang direndahkan dan disepelekan oleh negara lain karena hanya dianggap sebagai pengimpor pembantu belaka sehingga nilai nyawanya tidaklah sepadan. Padahal, hubungan yang dibangun semestinya adalah hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Perjuangan Ruyati yang melakukan pembunuhan untuk membela kebebasan dirinya yang ingin pulang mungkin hanya dilihat sebagai tindakan pidana dan

kejam, namun patutkah kita menilai Ruyati sebagai aktor kejam ketika ada faktor-faktor yang menjadi biang dari perbuatan yang dilakukan Ruyati?

### ***Standpoint* Politisi Perempuan Mengenai Peran dan Posisi Strategisnya**

Politik tidak hanya menjadi masa gegap gempita setiap lima tahun sekali ketika pesta demokrasi dilaksanakan di seluruh Indonesia. Politik menjadi efek domino dari setiap pilihan dan keputusan yang dihasilkan oleh langkah-langkah politisi di parlemen. Ketertindasan yang dialami perempuan mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, upah yang lebih rendah dari laki-laki, hingga aspek ekonomi dan hukum yang tidak dapat mereka akses dengan mudah menjadi buah ketidakadilan yang perempuan alami.

Sarwono Kusumaatmadja di dalam buku *Perempuan dan Politik* berpendapat, untuk dapat memperbaiki dan mengubah ketidakadilan yang terjadi ada baiknya kita memahami akses dan kontrol perempuan terhadap jalannya Pemilu dan peta perpolitikan di tanah air. Akses dan kontrol adalah kesempatan, jaminan sekaligus kemampuan perempuan dalam mewujudkan hak-hak dan perannya dalam politik tidak terkecuali kesejahteraan perempuan.

Karena kesejahteraan adalah hal perempuan menerima manfaat dari keputusan yang diambil dan sebagaimana laki-laki, perempuan pun berhak menggunakan dan memperoleh hasil pengelolaan sumberdaya hidup seperti tanah, mineral, hutan, air, dan sebagainya. Padahal selama ini penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam selalu diputuskan oleh laki-laki tanpa pernah terpikirkan ada hak-hak perempuan di sana, sementara keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan sangat minim dan boleh dibilang terpinggirkan. (Kusumaatmadja, 2007: 87)

Pandangan Sarwono tersebut memperlihatkan kebutuhan perempuan untuk memasuki politik sebagai bagian dari perjuangan haknya melalui konstitusi yang mana selama ini dinomorduakan dan tidak mendapat porsi perhatian yang lebih besar. Politik menjadi pintu dibukanya kesempatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik yang mengikat dan menjadi landasan bagi kesejahteraan hidup perempuan Indonesia yang mendominasi jumlah populasi.

Melalui kesempatan dan perjuangan, akhirnya terbuka pintu lebar bagi politisi perempuan untuk ikut mengubah wajah parlemen dan mengubah arah dan warna keputusan agar lebih ramah gender dengan kuota 30% yang diberikan oleh negara.

Menurut Ani Widyani Soetjipto (Soetjipto, 2005: 43) masih banyak lagi persoalan-persoalan kritis yang dihadapi di Indonesia yang juga punya implikasi pada perempuan. Masalah dampak dari krisis ekonomi, otonomi daerah, atau persoalan-persoalan lain seperti amandemen UUD'45 adalah sebagian saja persoalan nasional yang sekarang diperbincangkan, yang tentu punya dampak luas bagi perempuan. Selain itu, dalam isu-isu yang sering dianggap sebagai *low politics* (meskipun istilah ini sebetulnya sangat bias jender), masalah-masalah seperti PHK buruh perempuan, kekerasan, terhadap perempuan atau masalah persoalan perempuan yang erat dengan masalah agama seperti hak waris, perceraian, poligami dan lainnya, masih merupakan soal pelik yang sulit tersentuh atau masih sulit untuk mendorong ke arah perubahan.

Bagi Ani, Semua agenda tersebut adalah permasalahan yang sepatutnya menjadi perhatian serius bagi perempuan anggota parlemen di Indonesia. Di samping itu, perempuan anggota parlemen masih juga mempunyai persoalan-persoalan sehubungan dengan keberadaan mereka di dunia politik, persoalan institusional (afiliasi partai/ golongan/ platform partai) maupun kendala structural (sistem politik) yang turut menghambat partisipasi mereka di bidang politik.

Sementara itu, mereka juga berpacu dengan tuntutan yang begitu besar dari masyarakat terhadap percepatan kemajuan situasi perempuan di Indonesia. (Soetjipto, 2005: 43)

Anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari yang duduk di Komisi III melihat dirinya sebagai bagian dari kepentingan perempuan di luar untuk mencapai keadilan dalam ekonomi dan hukum. Eva menyadari bahwa perempuan masih menjadi kelas dua dalam prioritas persoalan yang harus diselesaikan oleh negara melalui konsentrasi merancang Undang-Undang.

Ketika ditanya mengenai pandangannya terhadap posisinya sebagai politisi perempuan, Eva mengaku bahwa perannya sangat berpengaruh. Dia menilai, seorang politisi harus datang ke DPR RI dengan visi yang kuat, sehingga tahu akan melakukan apa ketika tiba di DPR RI. Menurut Eva, *platform* yang dianutnya berdasarkan partai adalah untuk mewakili *wong cilik*, di mana isu perempuan termasuk ke dalam isu *wong cilik* yang juga mendapat perhatiannya. Namun, tentu selain platform, harus juga ada portofolio kinerja yang memperlihatkan perkembangan dan konsistensi anggota dewan tersebut dalam menyanggah profesinya sebagai wakil rakyat.

“Sekarang aku merasa, *when there are minority problem*, aku yang dicari. Itu kan artinya orang berpikir, kalo masalah minoritas Eva orangnya. Masalah gender, Eva orangnya. Berarti portofolioku jelas, kerja-kerja programku jelas, minimal aku ngga *asbun* lah, ngga cuma ada secara fisik di DPR, sehingga kalo soal *labor*, gender orang mencariku.” (wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Program kerja yang jelas, yang telah dilakukan Eva, memang membutuhkan proses panjang dan memakan tenaga, waktu dan pikiran yang besar. Tapi Eva yang saat diwawancara tampil anggun dengan paduan blazer biru gelap dan rok sewarna mengungkapkan dia melakukan semua program kerja tersebut dengan ikhlas karena memang itulah pekerjaannya dan tugasnya sebagai anggota DPR. Padahal, waktu dan masa-masa rapat di DPR seringkali hingga pukul 1 atau 3 pagi. Menyita waktu istirahatnya dan mengurangi kualitas waktunya dan keluarga, namun Eva merasa itu resiko yang sepadan dengan kepuasannya memperjuangkan program-program kerjanya yang salah satunya untuk kepentingan perempuan.

Eva menyatakan, dalam menilai dan menganalisis sebuah kasus atau persoalan, dia berlandaskan pada kebutuhan dan bukan karena kasus tersebut “seksi” atau tidak untuk diperjuangkan. Kebutuhan yang dimaksudkan Eva yaitu karena memang pada kenyataannya terdapat persoalan di lapangan dan ada fakta

pendukungnya yang didapatkan dari laporan media massa ataupun LSM yang terkait dengan isu tersebut.

Begitu pula dengan politisi perempuan lainnya Rieke Diah Pitaloka yang menilai posisinya sebagai politisi sangat membantu gerak aktivis perburuhan yang menjadi perhatiannya. Namun Rieke menuturkan untuk tidak melupakan bahwa politisi di DPR RI merupakan perpanjangan tangan fraksi, sementara fraksi merupakan perpanjangan tangan partai politik. Oleh sebab itu, menurut Rieke, setiap garis partai yang menjadi garis fraksi dijalankan oleh politisi sehingga menyebabkan politisi tidak sepenuhnya otonom.

Hal inilah menurut Rieke yang dapat memengaruhi kebijakan yang lebih ramah gender di DPR RI.

“Persoalannya apakah kita bisa mendesaknya (kepentingan perempuan). Pertama, partainya sendiri harus pro perempuan. Tujuannya bukannya agar perspektif perempuan hanya ada di wajah politisi perempuan, tapi massif, menjadi perspektif partai.” (wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Rieke mencontohkan, supaya pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki kebijakan yang berperspektif gender yang akan mendorong garis partai dan fraksi agar lebih memprioritaskan kepentingan perempuan, Rieke memulainya dengan berbicara di forum RAKORNAS (Rapat Koordinasi Nasional) partainya, mendesak partai melalui argumen dan bukti-bukti dari data yang terdapat di lapangan untuk mendorong partai agar lebih condong mengambil kebijakan yang pro perempuan.

Meskipun kehadiran perempuan sebagai politisi di DPR RI memberikan angin segar bagi masa depan perempuan Indonesia, ternyata tidak semua politisi perempuan memiliki kesadaran dan visi yang sama mengenai memperjuangkan nasib dan keadilan bagi perempuan Indonesia. Pada penelitian ini, penulis hanya menemukan dua suara politisi perempuan dalam pemberitaan Ruyati di *Kompas*. Padahal dengan kebijakan kuota 30% yang telah memberikan kesempatan yang besar bagi perempuan untuk ikut bersanding di parlemen, perempuan-perempuan yang menjabat sebagai politisi dapat menggunakan momentum kasus Ruyati untuk memberikan dukungan dan bertarung memperjuangkan solusi bagi

persoalan perempuan. Jika para perempuannya saja tidak peduli dan bersikap acuh terhadap persoalan perempuan lainnya, bagaimana permasalahan yang mengukung perempuan akan terpecahkan?

Azza Karam memaparkan, kendati kehadiran satu perempuan dapat membuat perbedaan perubahan signifikan jangka panjang akan semakin disadari jika ada jumlah perempuan yang cukup di parlemen yang didorong untuk menghadirkan perhatian perempuan. Perlunya minoritas perempuan yang signifikan mempengaruhi perubahan politik dirujuk oleh ilmuwan politik feminis sebagai “massa yang kritis”. Menurut Drude Dhedup, suatu tes untuk melihat apakah massa perempuan yang kritis hadir adalah dengan melihat percepatan pengembangan representasi perempuan lewat tindakan untuk memperbaiki situasi diri mereka sendiri dan bagi perempuan pada umumnya. Tindakan ini adalah perilaku kritis dari pemberdayaan. (Karam dkk, 1999: 120)

Anggota DPR RI, Eva Kusuma Sundari berpendapat, tidak semua perempuan mau ikut serta mencari solusi atas permasalahan perempuan. Bahkan menurut Eva Kusuma Sundari, pengetahuan feminisme politisi perempuan di DPR RI minim.

“Kelaminnya aja mba yang vagina, kepalanya penis (patriarki). Mereka sudah dijajah oleh kepentingan-kepentingan laki-laki.” (wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Eva menuding para politisi perempuan yang tidak mau bersuara memang tidak memiliki visi dalam menjalani profesinya sebagai anggota dewan yang terhormat. Bahkan menurut Eva, sebagian besar dari politisi perempuan tersebut hanya menganggap posisi politisi sebagai gaya hidup (*life style*) mereka saja.

Eva secara terbuka mengaku kecewa terhadap teman-teman sesama politisi perempuan yang ada di DPR RI, yang dia rasakan tidak mau bertindak untuk memberikan harapan besar atas sampainya perempuan di parlemen dengan kekuasaan terbesar sebagai pembuat Undang-Undang yang akan memayungi

setiap peraturan dan kebijakan di sektor-sektor operasional dalam industri, perkantoran pemerintah maupun swasta.

“(Saat ini) Aku agak sinis dengan kuota perempuan. Agak males. Karena aku udah kampanye susah payah perjuangankan mereka (politisi perempuan), mereka sampe sini, UUD PRT (Pekerja Rumah Tangga) mereka tidak mau tanda tangan. UUD Perlindungan TKI mereka ngga mau. Jadi mengecewakan. Karena mereka *lifestyle* aja. Jadi politisi itu cuman untuk gaya. Mereka ngga melakukan program yang pro perempuan, jadi perempuan ngga tertolong.” (wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Eva bahkan sangat kecewa kepada politisi-politisi yang berasal dari partai berbasis Islam, yang ikut menolak kebijakan-kebijakan yang pada dasarnya untuk kepentingan perempuan seperti UUD PRT (Pekerja Rumah Tangga) yang didominasi oleh kaum perempuan dan UUD Perlindungan TKI yang masih menjadi korban kekerasan hingga saat ini. Bagi Eva, perjuangan untuk menggolkan kebijakan-kebijakan tersebutlah yang seharusnya dilakukan oleh politisi perempuan sebagai pertanggungjawaban mereka atas posisi mereka sebagai perwakilan perempuan. Sayangnya menurut Eva, lebih banyak dari politisi perempuan yang sampai ke Senayan hanya untuk memenuhi kuota 30% dan tidak memiliki kepedulian terhadap persoalan perempuan.

Sama seperti Eva, Rieke juga merasa sedikit kekecewaan dengan perjuangan mencapai kuota 30% sementara politisi perempuannya tidak memiliki kontribusi untuk kepentingan perempuan.

“Saya orang yg memperjuangkan kuota 30%. Namun tentu kuota ini harus diimbangi dengan kualitas. Tidak hanya persoalan kuantitas. Kalo partainya menginstruksikan tidak mau, dia berani melawan ngga.” (wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Rekrutmen para politisi perempuan inilah yang menjadi salah satu faktor munculnya politisi perempuan yang tidak menyadari peran dan posisi mereka yang sangat penting bagi kehidupan perempuan. Selama ini, Eva menilai, dari segi kualitas masih lebih baik periode 2004 dibandingkan periode 2009. Dalam pandangan Eva, dewasa ini partai tidak melakukan seleksi individu tiap politisi. Padahal semestinya partai melakukan *scanning* terhadap politisinya.

Yang tidak kalah penting adalah peran partai politik terutama dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif yang juga berdampak besar bagi representasi perempuan. Bagi perempuan untuk terpilih dalam parlemen mereka harus melalui tiga rintangan. *Pertama*, mereka harus menseleksi dirinya sendiri untuk pencalonan. *Kedua*, mereka perlu diseleksi sebagai kandidat oleh partai dan *ketiga*, mereka perlu diseleksi oleh pemilih. (Soetjipto, 2005: 55)

Selain karena tidak adanya pengetahuan gender dan kesadaran gender dalam diri politisi-politisi perempuan lainnya yang enggan bersuara, Eva juga menduga faktor ketidaksiapan perempuan untuk bertarung sebagai salah satu pendukung tidak vokalnya politisi perempuan di DPR RI.

“Aku melihatnya kesiapan untuk tarung. Punya networking ngga untuk kasih data. Banyak kok yang mau kasih data. Tapi kalo you *close yourself*, ngga mau direpotkan, ya susah. Aku sendirian juga bisa kok bikin pasal di DPR. Ini problemnya politisi perempuan itu petarung atau ngga. Siap punya konsep apa ngga. Mau kerja ngga.” (wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Faktor politisi perempuan yang tidak memiliki kesadaran mengenai feminisme dan keberanian untuk bertarung argumen berdasarkan data dengan politisi laki-laki memang menjadi permasalahan bagi politisi perempuan yang sudah berada di DPR RI. Selain, tentu dikarenakan politik Indonesia memang merupakan politik patriarki. Rieke mengaku sangat sulit menembus kebijakan, karena harus melakukan proses komunikasi hingga lima jalur yaitu, komunikasi partai, komunikasi sesama anggota fraksi, komunikasi kepada anggota fraksi yang lain, komunikasi kepada LSM, dan komunikasi kepada media massa. Rieke juga berpendapat bahwa peran menjadi politisi seharusnya diresapi dengan kerelaan.

“Kualitas harus ditingkatkan, bukan cuma teoritis, tapi kerelaan kita menjalin komunikasi. Jadi kita ngga masuk dengan tangan kosong. Sehingga orang sulit mengintimidasi kita. Visinya harus jelas.” (wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Persoalan kualitas politisi perempuan ini juga dinyatakan oleh wartawan *Kompas*, Windoro Adi. Windoro berpendapat, sebagian besar perempuan politisi

di parlemen masih sangat lemah memperjuangkan hak-hak kaumnya karena sejumlah kendala. Kendala pertama, soal jam terbang, kendala kedua soal kultur yang menempatkan perempuan sebagai “pria berahim” (*womb man*) yang harus tunduk pada pria, dan kendala ketiga soal isu agama. Hal ini yang pada akhirnya memengaruhi kebijakan politik yang dihasilkan oleh politisi perempuan,

“Tentang keputusan politik yang pro perjuangan perempuan, masih sangat lemah. Selain karena menyangkut jumlah perempuan politik di parlemen yang masih sangat sedikit, mereka belum percaya diri menghadapi tiga kendala seperti saya sebutkan tadi dan cenderung lebih emosional ketimbang pria politisi yang sudah memiliki jam terbang cukup untuk bersandiwara di depan publik.” (wawancara Jumat 15 Juni 2012)

Pendapat Windoro juga ditegaskan oleh Siti Mudah Mulia. Menurutnya, sejumlah penelitian menemukan kenyataan bahwa kendala yang dihadapi oleh para politisi perempuan dalam tugas-tugas mereka di bidang politik adalah sebagai berikut: (Mulia, 2008: 189)

Pertama, kendala individual dalam bentuk keterbatasan pendidikan dan pengalaman. Sejak awal, politik selalu dicitrakan sebagai dunia laki-laki. Citra ini sedemikian kuat sehingga penampilan politik selalu memiliki wajah dan gaya hidup laki-laki. Perempuan yang memasuki arena ini selalu mendapat pandangan dan bahkan stigma negatif seperti perempuan ambisius, perempuan tidak tahu diri, perempuan tidak bermoral.

Kedua, kendala struktural. Anggapan perempuan tidak mampu berpolitik, karena perempuan tidak memiliki hak-hak politik sebesar yang di miliki oleh laki-laki. Tidak mendapat dukungan suami atau keluarga. Perempuan kurang memiliki rasa percaya diri karena tidak mendapat dukungan dari partai politik.

Ketiga, kendala kultural. Umumnya, perempuan masih dibebani oleh peran-peran tradisional. Perempuan selalu dilekatkan dengan label pemikul beban ganda, yakni beban domestik sebagai ibu atau isteri atau anak perempuan yang harus mengurus keluarganya dan beban publik sebagai pengurus parpol.

Meskipun banyak kendala yang dihadapi oleh para politisi perempuan, Ani Widayani Soetjipto (Soetjipto, 2005: 59) melihat ada strategi yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pengaruh perempuan dalam proses legislatif, yaitu mempelajari aturan, menggunakan aturan dan mengubah aturan. Dengan strategi tersebut, ada 4 perubahan yang bisa diamati, jika perempuan bisa membuat satu perbedaan sebagai berikut:

1. Perubahan institusional/ procedural yang menghasilkan peraturan-peraturan yang lebih ramah terhadap perempuan
2. Perubahan representasi perubahan representasi termasuk tindakan di parlemen yang dirancang untuk menempatkan perempuan dalam posisi penting di parlemen dan menjamin keberadaan mereka di pemerintahan. Ini harus melibatkan pula perubahan di dalam parpol untuk menarik lebih banyak perempuan
3. Perubahan terhadap keluaran (output). Ini terutama terlihat dari feminisasi legislasi yang dihasilkan dan kebijakan lain, yaitu bagaimana Undang-undang atau regulasi itu dapat mempengaruhi keinginan perempuan (*gender sensitive*)=>hal 60
4. Perubahan diskursus melibatkan perubahan di dalam dan di luar parlemen. Menjadikan berpolitik sebagai sikap yang wajar dan membuat akses yang lebih besar bagi media dan publik kepada parlemen.(Soetjipto, 2005: 59)

Bagi Windoro, faktor yang membuat politisi perempuan berkualitas sehingga dapat berperan sebagai perwakilan perempuan di DPR RI adalah basis pendidikan yang bagus, dan pengalaman mereka menjadi aktivis atau pengalaman mereka berorganisasi, serta dukungan kuat pasangannya dan atau keluarganya.

Jika dilihat dari sisi *Feminist Standpoint*, posisi politisi perempuan masih berada dalam bayang-bayang politik patriarki yang tidak mendukung mereka bergerak. Pertama-tama, kebijakan partai yang masih sangat maskulin, sehingga menomorduakan persoalan perempuan untuk dibahas di DPR RI, hal ini berimbas pada keputusan individu politisi perempuan yang mengikut garis partai dan fraksi. Kedua, ketidakberanian politisi perempuan sebagai kaum bawah dalam urutan posisi di dalam partai untuk bertarung memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang pro perempuan ketika hal tersebut melawan keputusan partai sebagai penguasa (kaum elit) yang lebih memegang *status quo* maskulinitas mereka.

### ***Standpoint* Politisi Perempuan Mengenai Hubungannya dengan Media Massa**

Perempuan dan media massa mengalami hubungan pasang surut. Studi-studi media selama ini telah membuktikan bahwa media massa memiliki kecenderungan untuk menjadikan perempuan sebagai objek dalam pemberitaan dengan menonjolkan sisi feminitas mereka semata seperti lemah, tidak mandiri, bergantung pada pria, tidak pintar dan hanya bermodalkan kecantikannya saja. Padahal, dalam segi kehidupan, apalagi politik Indonesia yang masih patriarki dan sistem Pemilu yang menurut Eva Kusuma Sundari masih brengsek, perjuangan perempuan untuk mendapatkan pengakuan dan tempat bukanlah perjuangan yang mudah.

Azza Karam berpendapat, media massa, termasuk publikasi-publikasi perempuan, tidak secara memadai menginformasikan hak dan peran perempuan dalam masyarakat; tidak juga mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan langkah-langkah pemerintah untuk memperbaiki posisi perempuan. (Karam dkk, 1999: 33)

Demi mendapatkan pengakuan dan tempat dalam politik, upaya-upaya perempuan melakukan pendekatan dengan media massa sebagai bentuk komunikasi politik mereka pun dilakukan. Menurut Eva Kusuma Sundari, peran media massa menurutnya sangat penting dalam lingkup kerjanya sebagai politisi perempuan.

“Aku kan butuh kerja-kerjaku diketahui publik. Untuk akuntabilitas (pertanggungjawaban). Dan untuk itu aku butuh media. Karena memang *core business*ku bicara dan butuh media untuk mengkapitalisasi (hal tersebut). Dan aku uda pelajari polanya. Kalo aku kirim ke detik, akan diambil banyak media. Aku kirim ke antara juga nyebar banyak.” (wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Eva menilai, penguasaan media massa oleh laki-laki memang tidak dapat ditampikan, namun keterampilan sebagai politisi perempuan menjalin hubungan yang baik dengan media massa akan memberikan tempat tersendiri bagi politisi perempuan untuk mendapat tempat dan kesempatan berbicara di media massa. Menurut pengalaman Eva, keterampilan menjalin hubungan dengan hegemoni media massa membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Eva bercerita, ketika

pertama kali dia berada di DPR RI, dia belum mengetahui cara-cara berhubungan dengan media massa, dia ditekan dan diperas oleh banyak harian umum berlabel “kuning”, yang melakukan praktik meminta uang atas setiap berita yang mereka tulis. Wartawan yang melakukan praktik ini biasanya disebut dengan wartawan bordeks.

Namun, setelah Eva belajar selama enam bulan untuk mengetahui cara-cara yang benar, karena dia menolak untuk melakukan proses suap-menyuap, Eva pada akhirnya menemukan pola hubungan yang nyaman bagi dirinya dengan media massa. Tidak lagi berfokus pada harian umum yang melakukan pelecehan profesi dengan memeras Eva untuk setiap pemberitaan yang mereka lakukan, namun belajar menulis *release* yang akan dikirim ke wartawan-wartawan media massa lainnya, termasuk *Kompas*, sebagai wartawan yang memiliki akuntabilitas yang baik di mata publik. Menurut Eva, hal ini dikarenakan media itu sendiri membutuhkan politisi-politisi yang tidak ikut-ikutan melakukan praktik membayar berita sebagai dukungan atas profesi wartawan mereka yang tengah mereka geluti.

Sejauh ini, Eva mengakui bahwa terdapat hambatan dalam menjalani hubungan dengan media. Namun, bagi Eva poinnya adalah pada keterampilan politisi perempuan tersebut untuk membangun *relation* dengan media dan juga kemampuan membuat *news* (berita) yang memiliki daya nilai yang tinggi. Eva menilai, tidak adanya bimbingan dan pelatihan dari partai politik kepada kadernya dalam bentuk persiapan mereka berhubungan dengan media memang cukup menjadi kendala bagi kesiapan politisi ketika terjun langsung di parlemen. Namun, kepedulian terhadap politisi perempuan lainnya dengan melakukan tutorial mengenai keterampilan berkomunikasi dengan media, membawa Eva untuk membantu politisi-politisi perempuan lainnya yang tidak memiliki pengetahuan jam terbang yang tinggi seperti politisi laki-laki lainnya.

Ya sisterhood toh. Aku kan butuh mereka juga untuk *engineering* politik. sekarang mata PDIP kan terbuka. Ternyata yang lebih maju perempuan-perempuannya, aku, Rieke, Dewi. Sekarang, partai sadar, kalo ngga ada aku sama Rieke gimana? Dan lebih sehat juga kan karena (keberadaan kami) bukan karena Puan bukan karena ini itu. (wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Penguasaan media massa, termasuk *Kompas*, oleh laki-laki menjadikan politisi perempuan harus cekatan dan handal memainkan peran mereka sebagai politisi dalam menjalin hubungan yang baik dan memiliki kualitas dengan wartawan. Termasuk pengorbanan kualitas waktu dengan keluarga dan kesediaan aktifnya *handphone* selama 24 jam, untuk dihubungi oleh wartawan. Hal ini memang cenderung bertentangan dengan patron patriarki yang selama ini ada di masyarakat, bahwa tidak baik bagi perempuan untuk pulang malam dan berhubungan dengan laki-laki lain pada malam hari. Pemikiran patriarki inilah yang biasanya menjadi batu halangan bagi politisi perempuan dalam menjalankan peran sebagai politisi karena adanya “aturan-aturan” tidak tertulis yang mengekang gerak perempuan, yang tidak terjadi pada laki-laki.

Padahal, dominasi laki-laki dalam media mulai dari posisi wartawan, redaktur, pimpinan redaksi, hingga pimpinan pada tingkat korporasi tidak dapat ditampik, dan ruang gerak serta cara-cara kerja media tergambar sebagai cara-cara kerja laki-laki. Sehingga, ketika keberadaan politisi perempuan membutuhkan media untuk diakses oleh publik, mau tidak mau perempuan harus mengikuti cara-cara laki-laki tersebut. Termasuk dengan melanggar patron-patron “keharusan cara perempuan” yang selama ini hidup di dalam masyarakat. Meskipun pada akhirnya politisi perempuan pula yang mendapat sanksi sosial dengan cap sebagai perempuan yang tidak tahu diri, melawan suami dan lain sebagainya.

Pada titik ini, jika dilihat dari *Feminist Standpoint*, keberadaan politisi perempuan dalam hubungannya dengan media massa, memang tidaklah sejajar. Politisi perempuan harus berusaha mengejar dan beradaptasi dengan cara-cara kerja laki-laki yang mendominasi media massa yang umumnya bekerja di lapangan dan tidak memiliki batasan waktu dalam bekerja (laki-laki tidak dipermasalahkan jam kerjanya sementara perempuan cenderung mendapat patron tidak boleh bekerja pada malam hari). Perjuangan politisi perempuan inilah yang tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai politisi, berargumen untuk mendukung kebijakan yang ramah gender, namun juga harus berjibaku beradaptasi dan menentang patron budaya secara umum untuk mengikuti pola kerja laki-laki termasuk akses terhadap media massa.

## 5.2 Pertimbangan Peningkatan Suara Politisi Perempuan dalam Kasus 'Hukum Pencung TKI Ruyati' di *Kompas*

Penulisan berita pada media sebesar *Kompas* memiliki sebuah kerangka kerja (frame) besar. Kerangka kerja berfungsi untuk menjadi patron dalam produksi kerja karyawan *Kompas*. Melalui kerangka kerja besar ini, arah pemberitaan dan posisi *Kompas* dalam sebuah kasus atau peristiwa akan terlihat. Kerangka ini juga menjaga unsur-unsur produksi melakukan kinerja keluar dari ideologi yang dianutnya. Kerangka inilah yang akan melatarbelakangi peningkatan yang dilakukan oleh *Kompas* dalam penulisan beritanya. Hal ini dimulai dari pemilihan narasumber yang dilakukan oleh wartawan yang melakukan liputan di lapangan.

Dalam wawancara, wartawan *Kompas*, Windoro Adi yang mengungkapkan faktor-faktor dan pertimbangan yang dilakukannya dalam memilih narasumber.

Pertimbangan saya, integritas, popularitas, tingkat kecerdasan, dan kedekatan dengan narasumber. Selain itu, persetujuan pimpinan redaksi (asisten redaktur, redaktur, redaktur pelaksana sampai pemimpin redaksi). Di tempat saya bekerja, pimpinan bersikap konservatif dan sangat berhati-hati menyetujui narasumber yang akan dikutip. (wawancara Jumat 15 Juni 2012)

Menurut Windoro, persetujuan narasumber oleh pimpinan yang memiliki kuasa akhir atas penulisan berita memang berpengaruh besar. Kecuali pada wartawan-wartawan tertentu yang sudah menjadi tokoh di *Kompas*. Namun jumlahnya sangat sedikit menurut Windoro. Windoro juga bercerita ada sebuah budaya di *Kompas*, di mana narasumber yang "dipakai" pada awalnya oleh senior-senior di *Kompas*, setelah beberapa kali nama narasumber tersebut naik dalam pemberitaan, maka wartawan lainnya akan mengikuti untuk memakai narasumber yang sama itu. Windoro berasumsi hal inilah yang mengakibatkan nama-nama politisi perempuan yang muncul di *Kompas* hanya yang itu-itu saja.

Windoro juga menyatakan, ada keengganan menggunakan narasumber baru, misalnya dalam hal ini politisi perempuan selain Rieke Diah Pitaloka

ataupun Eva Kusuma Sundari, karena dalam budaya *Kompas* ada sistem pengujian terlebih dahulu atas konsistensi narasumbernya. Jika dalam *track recordnya* dan perkembangannya, narasumber telah dianggap konsisten, maka narasumber tersebut barulah akan digunakan sebagai narasumber oleh *Kompas*.

Windoro juga mengakui unsur kedekatan dengan narasumber menjadi salah satu alasan pemilihan narasumber dalam penulisan beritanya. Contohnya, ia berpendapat, bahwa hubungannya dengan Rieke Diah Pitaloka sudah sangat dekat. Ia memantau pergerakan Rieke sejak Rieke masih menjadi aktivis, Rieke juga dinilai Windoro memiliki konsistensi dengan program dan kepeduliannya pada kasus-kasus buruh dan TKI. Sehingga, jika terdapat kasus dan pemberitaan mengenai buruh dan TKI, Windoro akan menghubungi Rieke.

Di sisi lain, Rieke juga membenarkan bahwa hubungan kedekatan dengan wartawan yang membuatnya memiliki suara di media massa.

Pertama kali ke sini (DPR RI), saya mencoba untuk melakukan pengorganisasian, berbicara dengan mereka dari hati-ke hati. Alhamdulillah baik. Jadi harus ada *trust*. Biar ke kita juga dibangun (hubungannya). (wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Sama seperti Rieke, politisi Eva Kusuma Sundari juga menyadari pentingnya menjalin hubungan dengan wartawan. Eva bercerita, bahwa sebelum dia menemukan pola hubungan yang baik dan nyaman dengan wartawan, dia menggali keterampilannya membuat *release* terkait dengan suatu kasus ataupun peristiwa. Menurut Eva, posisi dirinya sebagai seorang pejabat publik (politisi) membuatnya membutuhkan media.

Aku melihat perlu juga hubungan politisi dan media pada level personal, sampe ada *trust* (percaya). Aku ikut 12 kelompok pewarta. Aku selalu diundang. Hubungan dengan media erat. Hubunganku tak bangun *berdasarkan personal relationship*. Waktu film Aung San Suu Kyi, tak aku ajak mereka. 25 orang. (wawancara Kamis 14 Juni 2012)

Hubungan kedekatan dengan wartawan memberikan akses kepada Rieke dan Eva untuk melakukan proses berbicara di media sebagai bagian dari

akuntabilitas (pertanggung jawaban) mereka sebagai politisi yang kerja-kerjanya perlu diketahui publik.

Selain pemilihan narasumber oleh wartawan sebagai penentu *frame* suatu berita, Windoro juga menyatakan adanya pedoman utama sebagai garis yang menjadi landasan bagi wartawan untuk menulis berita. Menurut Windoro, basis pbingkaian (*framing*) di *Kompas* adalah “*humanisme transcendent*”.

Humanisme transendental adalah cara pandang terhadap manusia yang memiliki religiusitas, martabat kemanusiaan, dan memiliki hak azasi yang harus dilindungi dan dihormati. Agama, kultur, dan tradisi tidak boleh sedikitpun memasung martabat dan hak azasi manusia, melainkan memuliakannya. Narasumber pilihan *Kompas* umumnya memiliki unsur ini. Untuk menjaga landasan ini, *Kompas* bersikap independen. (wawancara Jumat 15 Juni 2012)

Windoro menambahkan dalam hal pemilihan penempatan teks berita di *Harian Umum*, maupun penempatan narasumber dalam teks berita tersebut, bergantung pada kebijakan redaktur yang dikonfrontir di rapat para pimpinan redaksi. Windoro mengatakan bahwa seluruh tulisan, foto, dan karikatur yang dimuat di *Kompas*, tidak boleh melanggar visi misi *Kompas* yang tak lain adalah *humanisme transcendent* tersebut. Foto dan tulisan misalnya, tidak boleh menggambarkan rinci mengenai kekejian manusia, atau menunjukkan nafsu manusia yang vulgar.

Melalui basis tersebut, menurut Windoro, akan terseleksi isu-isu yang akan menjadi bahan pemberitaan. Namun, meskipun demikian, Windoro memaparkan bahwa penting atau tidaknya satu kasus “ditiup”, tergantung keputusan rapat pimpinan redaksi dan bukan pada wartawan di lapangan seperti dirinya. Windoro mengungkapkan bahwa terdapat banyak variabel yang mempengaruhi keputusan rapat redaksi.

Hal yang mempengaruhi di antaranya adalah pertimbangan keamanan dan stabilitas bagi kelangsungan *Kompas*. Hal ini kemudian di *breakdown* lagi menyangkut kepentingan opini publik, politik, ekonomi, sosial, dan

budaya *Kompas*. Setiap media massa memiliki pertimbangan serupa itu sesuai cara pandang masing-masing. (wawancara Jumat 15 Juni 2012)

Pertimbangan keamanan dan stabilitas bagi keberlangsungan *Kompas* tentu berhubungan dengan posisi *Kompas* sebagai sebuah industri yang membutuhkan situasi yang tenang dan stabil sehingga tidak mengganggu angka produktivitas berita maupun mengganggu kinerja dari bisnis *Kompas* lainnya seperti percetakan dan penerbitan Gramedia. Hal ini memperkuat argumen penulis bahwa sebagai sebuah media yang menyajikan informasi, *Kompas* tetaplah sebuah industri yang harus memperhatikan dan mengedepankan kepentingan-kepentingan roda perekonomiannya agar selalu berputar dan tidak terganjal.

Jacob Oetama, memberikan argumennya (Oetama, 2001: 204), tidak mungkin lagi, hanya bidang redaksi yang dipacukankan. Juga manajemen secara umum, tata usaha, sirkulasi, periklanan, pemasaran, penarikan uang langganan, semua itu merupakan upaya-upaya biasa di bidang bisnis. Berlaku pola-pola hukum, keterampilan dan etika bisnis. Koran adalah komoditas idiiil itu supaya laku dijual, dituntut berlakunya visi dan keterampilan bisnis dan manajemen. Ini bukan langkah surut ataupun berlawanan dengan panggilan dan tugas idiiil pers. Hal itu wajar. Bagian-bagian dari Koran sebagai organism sosial.

Hamad menilai tindakan *Kompas* sebagai resiko masuknya unsur kapital dalam produksi kerjanya.

Dengan masuknya unsur capital, media massa mau tak mau harus memikirkan pasar demi memperoleh keuntungan (revenue) baik dari penjualan maupun dari iklan. Tak terkecuali dalam menyajikan peristiwa politik, karena pengaruh modal ini media massa akan lebih memperhatikan kepuasan khalayak (pelanggan dan pengiklan) sebagai pasar mereka dalam mengkonsumsi berita-berita politik. (Hamad, 2004: 3)

Faktor basis ekonomi tersebut juga secara tidak langsung memperlihatkan *frame Kompas* yang lebih mengarah pada kapitalisme dan tidak memprioritaskan kepentingan publik secara umum sebagai masyarakat yang tidak memiliki

kekuasaan informasi. Hal ini dikarenakan, *Kompas* tidak akan mengangkat isu-isu yang akan membenturkannya pada masalah hukum yang akan mengancam pergerakannya sebagai sebuah industri meskipun isu tersebut merupakan isu yang rentan dan mewakili kebenaran hakiki dari fakta yang ada dilapangan.

Menurut Roger Fidler (Fidler, 2003: 398), hal ini dikarenakan kepribadian (ideologi) setiap media berbeda. Masing-masing publikasi memiliki suatu gaya dan kepribadian yang unik yang oleh para pembaca dianggap sebagai jaminan kepercayaan dan keandalan. Sebagaimana disebutkan di atas, konteks dalam nama informasi itu disajikan merupakan petunjuk-petunjuk penting tentang hakikat dari isinya.

Sama halnya dengan keberadaan politisi perempuan yang dipilih *Kompas*. Pada akhirnya jika muncul politisi perempuan yang bersuara lantang dan menggugat kekuasaan pemerintah secara radikal, misalnya, untuk memperjuangkan perlindungan dan keselamatan bagi perempuan-perempuan Indonesia lainnya, dia tidak mungkin diangkat oleh *Kompas* karena pernyataan dan sikapnya akan membuat posisi *Kompas* sebagai sebuah industri mengalami tekanan. Dalam hal ini, seperti pemahaman *Feminist Standpoint*, politisi perempuan adalah kaum kelas rendah yang berada di bawah hegemoni kekuasaan elit *Kompas* sebagai sebuah institusi besar yang menjunjung kapitalisme.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 6.1 Kesimpulan Penelitian

Penelitian yang berjudul ‘Suara Perempuan di Media Cetak Sebagai Komunikasi Politik’ dengan melakukan analisis framing suara politisi perempuan pada kasus ‘Hukum Pancung TKI Ruyati’ di *Kompas* menghasilkan beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

*Frame* politisi perempuan di dalam *Kompas* sebagai figur yang tidak terlalu dipentingkan, yang dibuktikan dengan penempatan narasumber politisi perempuan yang tidak berada di ‘lead’ berita (pada paragraph awal), dan dipilih untuk membuat berita “laku” di pasaran. Selain itu teks berita tidak didukung gambar foto politisi perempuan dalam berita “Hukum Pancung TKI Ruyati”. Perempuan belum dianggap sebagai isu utama dan hanya diliput sebagai pelengkap dalam pemberitaan.

Pertimbangan *Kompas* melakukan *frame* tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya tingkat penilaian kredibilitas politisi perempuan oleh wartawan, hubungan kedekatan wartawan dan politisi perempuan, hasil keputusan rapat redaksi, kepentingan *Kompas* untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan industrinya. Latar belakang inilah yang pada akhirnya ikut mengkonstruksi politisi perempuan di *Kompas*.

*Frame* yang dilakukan *Kompas* terhadap politisi perempuan tersebut sesuai dengan teori *Feminist Standpoint* yang berpendapat perempuan seperti dalam kelas ekonomi merupakan kelas bawah dalam sistem patriarki. Hasil analisis mengukuhkan perempuan sebagai kelas bawah (proletar) yang berada di bawah hegemoni kaum elit (penguasa), dalam hal ini *Kompas* sebagai sebuah industri kapitalis yang tidak peduli pada kepentingan kaum kelas bawah dan lebih mementingkan kapitalisme dalam pengambilan keputusannya.

## 6.2 Rekomendasi Penelitian

Permasalahan TKI yang didominasi oleh perempuan, seperti pada kasus TKI Ruyati membutuhkan partisipasi politisi perempuan sebagai bagian dari unsur perempuan. Partisipasi dan dukungan politisi perempuan dalam bentuk kebijakan akan memberikan bantuan perlindungan dan solusi atas persoalan yang muncul. Penulis memberikan rekomendasi yang terbagi ke dalam rekomendasi akademis dan rekomendasi praktis.

### 6.2.1 Rekomendasi Akademis

Penelitian yang dilakukan penulis dapat menjadi kajian tambahan mengenai wacana keterwakilan suara politisi perempuan di media massa. Selain memperkaya kajian mengenai *frame* politisi perempuan di media massa, penelitian ini juga dapat menjadi literatur untuk melihat *standpoint* politisi perempuan.

Selain itu, penulis juga merekomendasi kepada peneliti yang tertarik mengangkat tema politisi perempuan dan media massa untuk meneliti hubungan diantara politisi perempuan dan wartawan agar mendapat gambaran pola hubungan yang tercipta diantara politisi perempuan dan media massa. Sehingga penelitian mengenai keterwakilan suara politisi perempuan di media massa dapat terlihat dari pola hubungan ini.

### 6.2.2 Rekomendasi Praktis

Pada penelitian ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi praktis. Pertama, penulis merekomendasikan *Kompas* untuk mendukung percepatan gerak politisi perempuan dengan memberikan kesempatan dan porsi yang berimbang kepada politisi perempuan dan isu perempuan di dalam pemberitaannya. Sehingga *Kompas* pada akhirnya melakukan perannya untuk memberikan literasi publik

kepada masyarakat, memberikan pemahaman baru tentang wacana yang pro gender.

Selain itu, penulis merekomendasikan politisi perempuan untuk menjalin hubungan yang baik dan erat dengan media massa, dalam hal ini *Kompas*. Mengingat salah satu pertimbangan pemilihan narasumber yang dilakukan oleh wartawan adalah unsur kedekatan. Dengan menjalin hubungan yang erat, politisi perempuan dapat menyuarakan aspirasi dan perjuangannya terhadap permasalahan perempuan seperti pada kasus TKI Ruyati ini secara vokal.



## DAFTAR REFERENSI

- Alwasilah, A. Chaedar. 2006. *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Amiruddin, Mariana. 2004. *Suara Hak-hak Perempuan di Radio Jurnal Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Ardianto, Elvinaro. 2007. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arif, Bustanul. *Partisipasi Politik Perempuan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Di Daerah Jawa Timur*. Surabaya: Yayasan Cakrawala Timur.
- Bakti, Andi Faisal. 2012. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*. Tangerang: Churia Press.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cavallaro, Dani. 2004. *Critical and Cultural Theory Teori Kritis dan Teori Budaya*. Niagara: Yogyakarta.
- Darma, Yoce Aliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: YRAMA WIDYA.
- Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna, Lincoln, S. (ed). 2000. *Handbook of Qualitative Research*. California: Thousand Oaks. London, New Delhi: Sage Publication Inc.
- Effendy, Onong Uchjana. 1993. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Entman, Robert M dan David L. Paletz. 1981. *Media. Power. Politics*. New York: The Press A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
- Eriyanto, 2002. *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang.
- Fairclough, Norman. 1995. *Media Discourse*. London: Edward Arnold.

- Fidler, Roger. 2003. *Mediamorfosis*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Frauenrath, Maria dan Yonis Ali Nur. 2003. "Jadi, bagaimana menurut pendapat anda..?" *Buku Panduan Praktis Bagi Wartawan*. London: BBC World Service Trust.
- Griffin, EM. (2006). *A First Look At Communication Theory*. New York McGraw-Hill.
- Hall, Stuart. 1997. *Representation Cultural Representation and Signifying Practices*. London: SAGE Publication Ltd.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit
- Hardt, Hanno. 2005. *Critical Communication Studies: Sebuah Pengantar Komprehensif Sejarah Perjumpaan Tradisi Kritis Eropa dan Tradisi Pragmatis Amerika*. Bandung: Jalasutra.
- Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi Manipulasi Media, kekerasan dan pornografi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Heiner, Robert. 2006. *Social Problems: An Introduction to Critical Constructionism*. New York: Oxford University Press.
- Ibrahim, Idi Subandy dan Hanif Suranto. 1998. *Wanita dan Media Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Karam, Azza dkk. 1999. *Perempuan di Palembang: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. 1999. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Krishna, Sen and David T. Hill. 2001. *Media, budaya dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI).
- Kalbfleisch, Pamela J. 2005. *Communication YearBook 29*. London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Kusumaatmadja, Sarwono. 2007. *Politik dan Perempuan*. Depok: KOEKOESAN.
- Littlejohn, Stephen W and Karen A. Foss. 2008. *Theories of Human Communication (Ninth Edition)*. USA: Thomson Wadsworth.

- Mallarangeng, Rizal. 2010. *Pers Orde Baru Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- McQuails, Dennis. 2000. *Mass Communication Theory*. London: SAGE Publications Ltd.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Mass Communication Theory*. London: SAGE Publications Ltd
- Miles, Matthew B dan Michael Huberman A. 1994. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Mulia, Siti Musdah. 2008. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*. Yogyakarta: Kibar Press.
- Mulyana, Deddy, 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Tumber, Howard. *News a Reader*. 1999. London: Oxford University Press.
- Nugroho, Alois A. 2001. *Etika Komunikasi Politik*. Jakarta: Universitas Indonesia Atma Jaya.
- Oetama, Jacob. 2001. *Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Owers, James dkk. 1998. *Media Economics Theory and Practice Second Edition*. United states of America: New Jersey.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2000. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Ritzer, George dan Douglas J Goodman. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media group.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Santana K., Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Shoemaker, Pamela J and Stephen D. Reese. 1996. *Mediating The Message Theories of Influences on Mass Media Content (Second Edition)*. USA: Longman Publisher.
- Sobur, Alex. 2009. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Soetjipto, Ani Widyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Storey, John. 2007. *Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop Pengantar Komprehensif Teori dan Metode*. Jalasutra: Yogyakarta&Bandung.
- Sudibyo, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS
- Supiandi, Yusuf dkk. 2007. *Modul Pelatihan Perempuan Kader ORSOSPOL "Kesadaran Bela Negara"*.
- Van-Zoonen, Liesbet. 1994. *Feminist Media Studies (Media, Culture & Society Series)*. New Delhi: SAGE Publication Ltd.
- West, Richard and Lynn H. Turner. 2010. *Introducing Communication Theory Analysis and Application (Fourth Edition)*. Singapore: Mc Graw-Hill International Edition.

Tesis:

1. Perempuan Dalam Berita Kampanye Pemilu 2004 Di Media Cetak Nasional oleh Loina Lalolo K. Perangin-Angin, Universitas Indonesia Agustus 2004
2. Perempuan Sebagai Calon Legislatif Pemilu 5 April 2004 Di Media Televisi oleh Irene Erlyska, Universitas Indonesia 2004
3. Tesis Analisis Isi Berita Tokoh Perempuan di Harian Nasional Kompas Pada Kampanye Pemilu 2009 (12 Juli 2008-5 April 2009) oleh Nucha Ayuningrum, Universitas Indonesia.

4. Tesis Pencerminan Integritas Elite Politik Perempuan Komitmen dan Implementasi Studi kasus: Nursyahbani Katjasungkana, SH. Oleh Hj. Samrotunnajah Ismail 2008, Universitas Indonesia.
5. Tesis Standpoint Jurnalis Perempuan Dalam Ruang Redaksi (Studi Kasus Pada Jurnalis Perempuan Di Majalah Bisnis Dan Ekonomi) oleh Diah Amalia 2010, Universitas Indonesia.
6. Tesis Analisis Framing: Pembingkaihan Pekerja Migran Perempuan oleh Reinanda Sarah Manalu 2011, Universitas Indonesia.

Disertasi:

1. Disertasi Pemaknaan Karir Politik Presiden Perempuan dalam Masyarakat Patriarki oleh Billy K. Sarwono 2004, Universitas Indonesia.
2. Disertasi Media Massa dan Hegemoni Negara Terhadap Realitas Politik Perempuan: Analisis Gramscian Atas Proses Perjuangan Affirmative Action, Kuota 30% oleh Umaimah Wahid 2006, Universitas Indonesia. (DS/009/KOM/WAH/M/2006).

Jurnal:

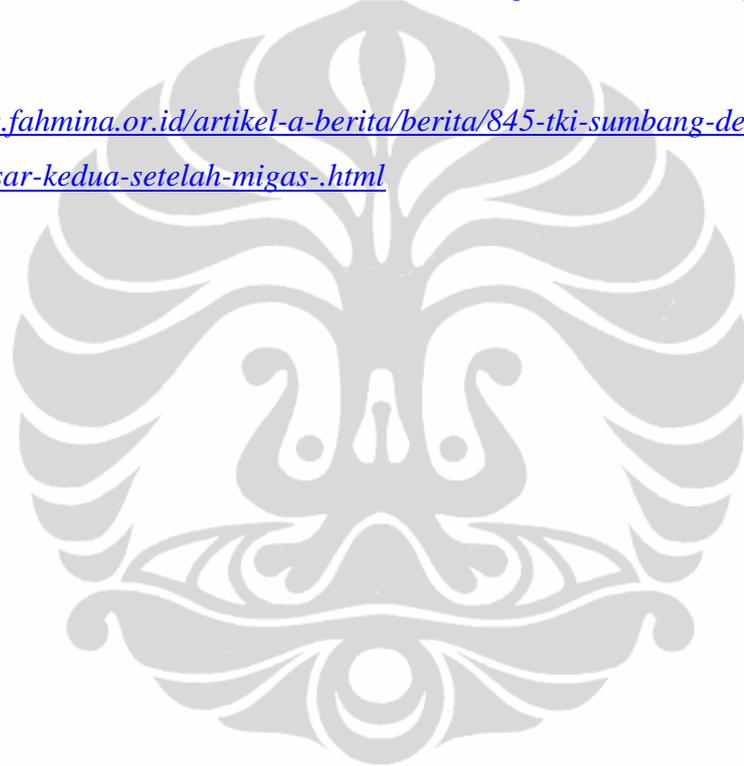
1. Media dan Pendidikan Politik Perempuan oleh Ida Wiendijarti dan Susilastuti Dwi N (Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 3 No. 2, Mei-Agustus 2005), Universitas Pembangunan Nasional.
2. Perempuan, Politik dan Media oleh Abdul Rozak (Jurnal Komunikasi Vol 02 No.01, April 2009).
3. Dikotomi Kualitatif – Kuantitatif dan Variasi Paradigmatik Dalam Penelitian Kualitatif oleh Hidayat, Dedy N (Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, Vol. 2, No. 2, Juli 2008: 81 – 94)

Media Cetak:

1. *Kompas* tanggal 20 Juni 2011
2. *Kompas* tanggal 22 Juni 2011

Website:

1. (<http://www.tempo.co.id/hg/peraturan/2004/03/16/prn.20040316-04.id.html>)
2. (<http://bisnis.vivanews.com/news/read/227831-berapa-besar-sumbangan-devisa-tki>).
3. (<http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/berita/845-tki-sumbang-devisa-negara-terbesar-kedua-setelah-migas-.html>)



## LAMPIRAN

## 1. Kliping Berita Kasus ‘Hukum Pancung TKI Ruyati’

a) *Kompas*, 20 Juni 2011 Hal 1

## PERLINDUNGAN TKI

Pemerintah Tak Dapat  
Hindari Hukuman

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak dapat menghindari seorang tenaga kerja Indonesia, Ruyati binti Saibino (54), dari hukuman mati oleh pengadilan Arab Saudi, Sabtu (18/6) pagi, di Mekkah. Jatuhnya hukuman mati yang mengejutkan itu hanya berselang empat hari setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato di Konferensi Ke-100 Perburuhan Internasional Organisasi Buruh Internasional (ILO) di Geneva, Swiss.

Dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono menekankan pentingnya perlindungan terhadap buruh migran. Analisis kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo, dan Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah di Jakarta, Minggu (19/6), menyatakan, eksekusi mati Ruyati itu menunjukkan pidato Presiden belum sesuai realitas. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Ewie Diah Pitaloka, menilai, peristiwa ini semakin membuka kelemahan koordinasi internal pemerintah dan diplomasi internasional.

Namun, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Moharomad Jumhur Hidayat meminta publik tidak mengaitkan peristiwa itu dengan pidato Presiden dalam Konferensi Ke-100 Perburuhan Internasional. "Tu urusan pidana, bukan perselisihan buruh," ujar Jumhur. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha memutarakan, Presiden Yudhoyono menyesalkan eksekusi itu. "Pemerintah Indonesia tentu tidak bisa mencampuri proses hukum yang berlangsung di negara lain," kata Julian.

Presiden, menurut Julian, sudah menerima laporan lengkap kasus itu dari Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Marty menyatakan, Pemerintah Indonesia memprotes keras hukuman mati terhadap Ruyati yang dilakukan tanpa terlebih dulu memberitahukan secara resmi kepada Perwakilan RI di Arab Saudi. "Kamu sangat terkejut begitu mendengar eksekusi telah dilakukan," ujar Marty. Menurut dia, pemerintah telah mendampingi Ruyati bahkan sejak awal kasus itu muncul dan disidangkan pada Januari tahun lalu.

Ruyati, warga Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, didakwa membunuh istri pengguna jasanya, Omar Mohammad Omar Hilwani, yang bernama Khoiriyah, 12 Januari 2010. Mahkamah Tamyiz (semacam pengadilan banding) mengesahkan hukuman mati (*qishash*) pada 14 Rajab 1431 Hijriah yang diperkuat oleh Mahkamah Agung. *Qishash* merupakan salah satu bentuk hukuman dalam Islam yang berarti sanksi yang setimpal dengan perbuatan bagi pelaku kejahatan.

Een Nuraini (35), anak kandung Ruyati, menjelaskan, tanggal 31 Desember 2010 ibunya menghubungi lewat telepon mengesahkan, setelah bekerja setahun empat bulan, ia harus mendapatkan sembilan bulan gaji. Tujuh bulan gaji lainnya belum dibayar. Setiap bulan Ruyati menerima gaji 800 real (Rp 1.829.235). Ibunya juga pernah bercerita, kakinya patah karena didorong dan jatuh dari kantai dua oleh majikan perempuan.

(DWA/HAM/INK/WLN/WHY/ATO)



DK 0009 5474

BACA JUGA HAL 17

b) Kompas, 20 Juni 2011 Hal 17

# 23 TKI Terancam Mati

Presiden Abdurrahman Wahid Dapat Menghindari Hukuman Mati

**JAKARTA, KOMPAS** — Sebanyak 23 tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi menghadapi ancaman hukuman mati. Hukuman mati itu sebenarnya dapat dihindarkan dengan langkah politik, seperti pernah dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid.

Selain hukuman mati Ruyati, kasus terakhir adalah Darsena bioti Daud Tawar, TKI asal Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam kasus Darsena, pemerintah lebih berkonsentrasi dalam pembayaran *diyat* (uang darah) ketimbang melakukan advokasi litigasi di pengadilan atau diplomasi secara maksimal. "Kami menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menepati pejabat yang bertanggung jawab atas keafatan melindungi TKI," ujar analis kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo, di Jakarta, Minggu (19/6).

Arab Saudi merupakan negara tujuan penempatan TKI terbesar kedua setelah Malaysia. Jumlah TKI di Arab Saudi berjumlah sedikitnya 1,5 juta orang, yang sebagian besar pekerja rumah

tangga. Sebagian besar pekerja rumah tangga itu perempuan yang mengirim *diyasa* sedikitnya 7,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 61 triliun tahun 2010.

Sekretaris Jenderal Indonesian Employment Agency Association Djamal Azis menyebutkan, hukuman mati juga pernah dialami Siti Rahayu Kadim, TKI asal Malang, Jawa Timur, tahun 1993. "Dengan kasus yang menimpa Ruyati, jelas diplomasi Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi tidak ada peningkatan dari tahun 1993," kata Djamal.

Darsena, yang terbukti membunuh pengemudi jasanya pada Desember 2007, lolos dari hukuman mati setelah ahli waris korban, Asim bin Sali Assagid,

bersedia memaafkan perbuatannya pada 7 Januari 2011. Keputusan ini tercatat sebagai peranan Lajnah Islah (Komisi Jasa Baik untuk Perdamaian dan Pemberian Maaf) di Riyadh dengan uang *diyat* 2 juta real atau sekitar Rp 4,7 miliar.

"Untuk kasus Darsena, pemerintah masih terus berupaya mencari solusi soal pembayaran *diyat* Rp 4,7 miliar itu. Kami mencari dana dari anggaran bantuan sosial, masyarakat, dan semua pihak yang peduli dengan TKI. Pemerintah tidak pernah menganggarkan khusus uang untuk *diyat* seperti dalam kasus ini," ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Mohammad Jahmar Hidayat.

## Langkah politik Gus Dur

Wahyu Susilo memantapkan, para TKI dapat selamat atau terhindar dari hukuman mati apabila ada langkah politik Pemerintahan Indonesia, seperti dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999. "Karena perjalanan politik Gus Dur (Ab-

durrahman Wahid) kala itu, pemerintah rumah tangga, Sri Zaenab, bisa terhindar dari hukuman mati," ujar Wahyu.

Koordinator Aliansi TKI Sumatera, Madura, Jawa Timur, Rosirah, menilai, eksekusi mati terhadap Ruyati dapat dihindari jika pemerintah memiliki perjanjian menyangkut perlindungan TKI. "Banyak TKI yang mengalami hukuman di Arab Saudi, tetapi yang diungkap oleh pemerintah hanya sedikit," kata Rosirah.

Pada saat, tambah anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka, setiap ada TKI yang menjalani proses hukum di Arab Saudi, pemerintah sempat pasti mengirim penberitahuan kepada Perusahaan Jasa TKI (PUTKI) yang menempatkan ke negara tersebut.

Bahkan, hebesapa TKI di Arab Saudi, termasuk yang akan menjalani hukuman, akhirnya bebas karena RTKI bersama pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat mendekati Kerajaan Arab Saudi. "Kami menunggu langkah politik Presiden," kata Rieke. (EKA/HAM/WIN)



## 2. Transkrip Hasil Wawancara

### Anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari

*Apakah ibu memiliki pengetahuan feminisme?*

Oh iya, aku ikut pelatihan kok. 91 kayaknya mba. Sebelum di partai. Aku masih dosen kok. Ya, anu sih. Sebagai.. sebetulnya sambil jalan krn keinginan tahu. aku di buruh dulu, nganu kasus marsinah. Lalu oh ini kan isu gender. Aku ikut pelatihan di Lombok. Sejak itu aku paham ohh framenya sangat jelas tentang feminisme, itu kemudian yang membuat aku masuk advokasi, dan itu yg aku bawa ke penelitian pada saat di pusat studi wanita. Aku kan kuliahnya ekonomi. Gender ekonomik lah.

Policy itu mengkonstruksi sistem kan mba. Kalo kita mau melihat, perempuan sekedar sebagai input. sekedar mencari efektivitas dan efisiensi di ekonomi, karena pendekatan kita yang fungsi ekonominya moneter, pada finance. perempuan termasuk tkw jd residu, karena perekonomian desa tidak mau dikembangkan. Perkotaan terus. Konstitusi kita ngga dipakek sebagai panduan, karena lebih ke resep2 imf yang kalo kita lihat sangat jauh dengan konstitusi, akibatnya reses terhadap satu kelompok perempuan yg termarjinal.

*Bagaimana ibu melihat peran dan posisi ibu sebagai politisi perempuan?*

Ini kan platform. Masing2 politisi harus punya platform. Platformku wong cilik, yah isu perempuan termasuk isu wong cilik yang aku perhatikan. Tapi politisi kalo ngga punya portofolio, ya ngga jelas apa yang mau dilakukan. Ngga ada visi.

Sekarang aku merasa, when there are minority problem, aku yang dicari. Itu kan artinya org berpikir, kalo masalah minoritas Eva orangnya. Masalah gender, Eva orangnya. Berarti portofolioku jelas, kerja-kerja programku jelas, minimal aku ngga asbun lah, ngga Cuma ada secara fisik did pr, sehingga kalo soal labor, gender orang mencariku.

Aku basisnya kebutuhan bukan seksi ato ngga. Kebutuhan karena ada persoalan real dan ada faktanya. Itu menjadi isu politik. basis nya realitas dan kebuuthan. Memang ada persoalan, kayak perdagangan perempuan dan tki aku bisa masuk. Pertimbangannya merespon kebutuhan.

*Bagaimana hubungan ibu dengan media massa?*

Aku butuh media massa, karena tugasku kan bicara. Kalo bicaraku ngga terdesiminasi ya percuma. Dan mereka juga butuh berita. Pola hubungannya sudah pada membutuhkan. Aku ngga pernah bayar. Kalo kamu perhatiin, beritaku banyak. Karena keterampilan bikin release. Aku struggle pada posisi aku ngga punya duit, aku ngga mau bayar. Aku latihan sendiri bikin release krn kan ngga dilatih sama partai. Cukup diterima publik, karena yang kuangkat tentang kebutuhan dari masyarakat tadi. Kombinasi antara advokasi dengan berbagai model mulai dari statement sampai lapangan dan lobi dan seterusnya.

Aku ikut 12 kelompok pewarta. Aku selalu diundang. Hubungan dengan media erat. Hubunganku tak bangun berdasarkan personal relationship. Waktu film aung san suu kyi, tak aku ajak mereka. 25 orang. Aku kan butuh kerja2ku diketahui publik. Untuk akuntabilitas. Dan untuk itu aku butuh media. Karena memang core bisnisku bicara dan butuh media untuk mengkapitalisasi. Dan aku uda pelajari polanya. Kalo aku kirim ke detik, akan diambil banyak media. Aku kirim ke antara juga nyebar banyak.

*Media berbasis industri/ ekonomi. Hegemoni media lebih ke laki-laki daripada ke perempuan. Pandangan ibu?*

Untuk isu-isu perempuan aku yang setor. pidatonya megawati ttg kartini aja naek kok. Kan aku yg tulis. Itu kan programnya di probolinggo. Itu kan keterampilan. Aku ngga mau yang poin-poin,

aku mau sesuai dengan kebutuhanku. Intinya aku indirectly dan directly. Kalo ada yg salah langsung dikoreksi. Karena memang salah. Terus diralat.

*Apakah ibu memiliki hambatan dengan media massa?*

Lebih ke keterampilan kita membangun relation, kemampuan kita membuat news. Aku kan ngasistensi politisi2 di awal. Dewi, puti. Ada tutorial. Waktu tere keluar aku menyesal, krn di demokrat ngga ada yg berendah hati untuk tutorial. Kalo aku siapa yang nanya, tak jawab. Prinsipku kan satu akuntabilitas dan transparansi. Dan itu membutuhkan media. Supaya mendidik juga, supaya masyarakat tidak terjebak korupsi.

### **Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka**

*Apakah ibu memiliki pengetahuan feminisme?*

Sebenarnya perspektif sebagai perempuan pasti ada. Itu yg disebut perspektif gender. Pengalaman yang dialami sebagai perempuan, yg tidak dialami oleh laki-laki. Itu melatarbelakangi keputusan politik yang saya ambil.

Sebenarnya saya lebih ke arah kartini yg menjadi inspirasi saya. Emansipasinya adalah rakyat. Kesetaraan antara manusia dengan manusia lainnya. Krn perempuan berada sebagai pihak yang rentan, mereka sebagai korban kita memperjuangkan mereka.

*Bagaimana ibu melihat peran dan posisi ibu sebagai politisi perempuan?*

Pada tataran politik tidak bisa kita mendikotomikan laki2 dan perempuan, tapi ekksesnya lebih banyak kepada perempuan iyah.

Orang kadang lupa, politisi di dpr itu perpanjangan tangan fraksi. Fraksi perpanjangan tangan partai. Jadi, setiap garis partai, garis fraksi dijalankan oleh politisi. Kita ngga otonomi.

Supaya ada kebijakan berperspektif gender, yang didorong garis partai dan fraksinya. Saya berbicara di forum, rakornas untuk partai lebih condong mengambil kebijakan perempuan.

Persoalannya apakah kita bisa mendesaknya. Pertama, partainya sendiri harus pro perempuan. Tujuannya bukannya agar perspektif perempuan hanya ada di wajah politisi perempuan, tapi massif, menjadi perspektif partai.

Ketika berbicara ttg perempuan, tidak bisa lari dari konteks ini perjuangan sebagai hak azasi manusia dan pemenuhan dasar perempuan sebagai bagian dari hak azasi manusia.

*Bagaimana hubungan ibu dengan media massa?*

Penting sekali. Di era politik saat ini saya kira, apalagi politisi ngga bisa menemui rakyat satu-satu. Apalagi dpr. Parle kan bicara. Kalo ngga ada media ngga bisa kita fight.

Belum tentu medianya ngga angkat. Sebenarnya kredibilitas narsum diperhitungkan. Bukan hanya asal statement diangkat. Org ini Cuma statement atau punya kerja politik, itu diperhitungkan. Saya belum pernah punya masalah sama media.

Pertama kali ke sini, saya mencoba utk melakukan pengorganisan, berbicara dgn mereka dari hati-ke hati. Alhamdulillah baik. Jd harus ada trust. Biar ke kita jg dibangun.

### Wartawan *Kompas* Windoro Adi

*Bagaimana pandangan bapak mengenai kasus TKI Ruyati?*

Kasus Ruyati mencerminkan kasus-kasus yang umum terjadi pada pada TKI pembantu rumah tangga di negara-negara Timur Tengah. Latar belakang pendidikan dan kemampuan sosial mereka rendah, buta hukum, dan mudah hanyut dengan kebohongan tentang “pintu surga”. Mereka umumnya direkrut para pencari tenaga kerja perorangan yang menjadi kpanjangan tangan sub-sub agen biro jasa TKI yang sebagian besar berkantor di Jakarta Timur. Para pencari tenaga kerja ilegal ini menyisir para calon TKI sampai pelosok desa.

Hampir seluruh “korban” tidak mendapat informasi yang lengkap mengenai hak dan kewajiban mereka. Mengenai bekal ketrampilan minimal yang harus mereka miliki. Mengenai dokumen-dokumen legal yang harus mereka siapkan. Mengenai perlindungan hukum dan cara mendapat perlindungan hukum. Para calon tidak memiliki kemampuan meneliti dan mengoreksi kontrak kerja sebelum kontrak kerja ditandatangani.

*Pandangan mengenai politisi perempuan?*

Sebagian besar perempuan politisi di parlemen masih sangat lemah memperjuangkan hak-hak kaumnya karena sejumlah kendala. Kendala pertama, soal jam terbang, kendala kedua soal kultur yang menempatkan perempuan sebagai “pria berahim” (*womb man*) yang harus tunduk pada pria, dan kendala ketiga soal isu agama.

Tentang keputusan politik yang pro perjuangan perempuan, masih sangat lemah. Selain karena menyangkut jumlah perempuan politik di parlemen yang masih sangat sedikit, mereka belum percaya diri menghadapi tiga kendala seperti saya sebutkan tadi dan cenderung lebih emosional ketimbang pria politisi yang sudah memiliki jam terbang cukup untuk bersandiwara di depan publik.

*Apa saja pertimbangan memilih narasumber?*

Pertimbangan saya, integritas, popularitas, tingkat kecerdasan, dan kedekatan dengan narasumber. Selain itu, persetujuan pimpinan redaksi (asisten redaktur, redaktur, redaktur pelaksana sampai pemimpin redaksi). Di tempat saya bekerja, pimpinan bersikap konservatif dan sangat berhati-hati menyetujui narasumber yang akan dikutip.

Basis pembingkai (*framing*) di *Harian Kompas* jelas, “*humanisme transendental*”. Humanisme transendental adalah cara pandang terhadap manusia yang memiliki religiusitas, martabat kemanusiaan, dan memiliki hak azasi yang harus dilindungi dan dihormati. Agama, kultur, dan tradisi tidak boleh sedikitpun memasung martabat dan hak azasi manusia, melainkan memuliakannya. Narasumber pilihan *Kompas* umumnya memiliki unsur ini. Untuk menjaga landasan ini, *Kompas* bersikap independen.

Penting atau tidaknya satu kasus “ditiup”, tergantung keputusan rapat pimpinan redaksi. Bukan pada reporter di lapangan seperti saya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keputusan rapat redaksi. Hal yang mempengaruhi di antaranya adalah pertimbangan keamanan dan stabilitas bagi kelangsungan *Kompas*. Hal ini kemudian di *breakdown* lagi menyangkut kepentingan opini publik, politik, ekonomi, sosial, dan budaya *Kompas*. Setiap media massa memiliki pertimbangan serupa itu sesuai cara pandang masing-masing.

Soal pemilihan penempatan tergantung kebijakan redaktur yang dikonfrontir di rapat para pimpinan redaksi. Pendeknya, seluruh tulisan, foto, dan karikatur yang dimuat di *Kompas*, tidak boleh melanggar visi misi *Kompas* yang tak lain adalah humanisme transendental tadi. Foto dan tulisan misalnya, tidak boleh menggambarkan rinci mengenai kekejian manusia, atau menunjukkan nafsu manusia yang vulgar.

